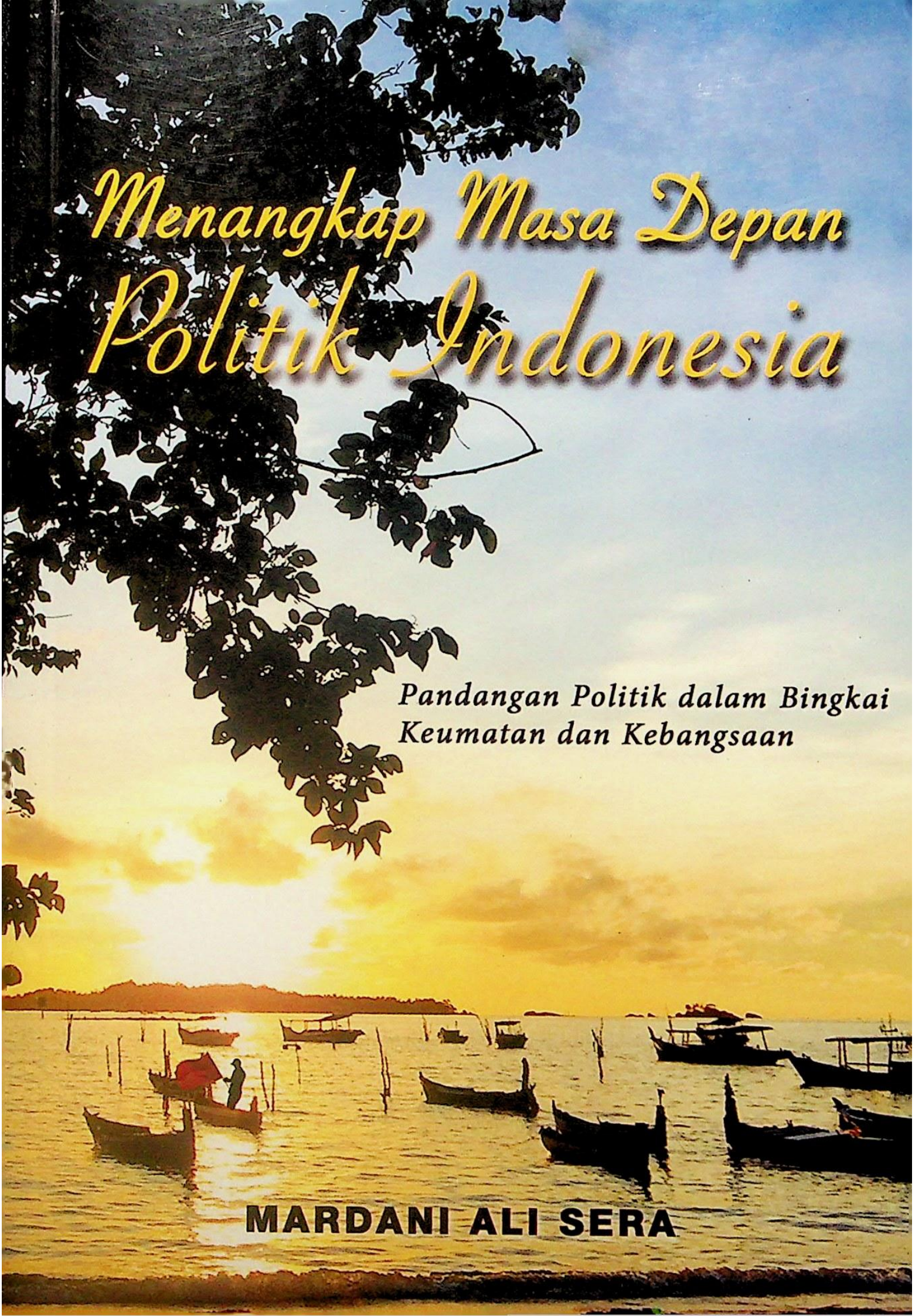


Menangkap Masa Depan Politik Indonesia

Pandangan Politik dalam Bingkai Keumatan dan Kebangsaan

MARDANI ALI SERA



"Panglima Pemenangan Anies-Sandi adalah Mardani Ali Sera"

Prabowo Subianto, Ketua DPP Gerindra



"Mardani (cocok) sebagai cawagub DKI di Pilkada DKI 2017"

M. Sohibul Iman, Presiden PKS



"Kehebatan Mardani Ali Sera (sebagai pemimpin) yang bergerak secara senyap untuk membangun 21 sayap (pemenangan Pilkada)"

Anies R. Baswedan, Pemenang Pilkada DKI 2017

Menangkap Masa Depan Politik Indonesia

Pandangan Politik dalam Bingkai Keumatan dan Kebangsaan

Oleh Mardani Ali Sera

Diterbitkan pertama kali oleh TIM MAS

(Ummu Harits, Yachya, Munadhil, Ridwan R., Wijaya, Punky, Dzaky, Koswandeni)

Cetakan Pertama, Agustus 2017

N. _____

PERPUSTAKAAN

KONGRESUM PEMUDA AGRARIA



Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT Rabb Semesta Alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, dengan Rahmat dan Karunia-Nya saya berkesempatan menyelesaikan penyusunan buku ini.

Buku ini adalah kumpulan tulisan di Majalah Intima yang digawangi oleh Akh Indra Kurniawan. Beliau menghubungi saya pada sekitar awal tahun 2012 dan meminta saya mengisi salah satu kolom dalam Majalahnya. Buat saya ini tantangan sekaligus peluang. Tantangan karena diminta rutin dan peluang karena bisa men-*share* pikiran saya pada publik walau terbatas.

Saya mencoba menulis tema dan problema keummatan dalam konteks Politik Umat di Indonesia. Ini harus jadi pandangan politik yang dibingkai dalam visi keumatan dan kebangsaan. Ringan dan Aktual, tapi tetap tidak meninggalkan asas keislaman dan keindonesiaan. Beberapa tulisan mungkin kini sudah tidak *up to date*, tapi saya mengajak para pembaca melihat sisi-sisi yang dapat diambil pelajaran betapa pada masanya kita harus

membuat keputusan. Dan keputusan itu, mesti memiliki data dan dasar analisa yang kuat.

Ada banyak topik yang beragam coba di*cover* dengan buku ini. Walau, jika disederhanakan, prinsipnya ada tiga: pertama persiapkan payung sebelum hujan. Umat perlu tekun mengerjakan PR nya sejak awal kembali. Kedua, terbuka untuk melihat kebaikan dan kelebihan pihak lain karena hikmah itu milik mu'min yang sempat hilang. Dan ketiga, jangan lupakan Allah SWT selalu punya rencana terbaik. Tugas kita mematutkan diri biar dipilih masuk dalam barisan pejuangNya.

Tak ada gading yang tak retak dan pandangan dalam tulisan di buku ini semuanya adalah sedikit pikiran penulis yang boleh jadi banyak kekhilafan dan kelemahan. Penulis mohon dibukakan pintu maaf dan monggo dikoreksi dan disampaikan kritik, salam dan masukannya.

Akhirul kalam, semoga kumpulan tulisan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, Insya Allah.

Bekasi, 21 Juli 2017

Mardani Ali Sera

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Membangun Politik Asketis	1
The Jokowi Effect dan Masa Depan Dakwah	4
Membangun Kelas Menengah Kader	11
Tsunami Jokowi	15
Leadership Factor Pada Pilpres 2014	19
Membangun Sistem Keuangan Partai	25
Jati Diri PKS	29
Antara Mamma Mia dan Palestina	35
Nikmatnya Mengenal Dapil	40
Membangun Pasar Umat	46
Tiga Pelajaran dari Pemilu 2014	51
Menuju Capres Umat	56
Kekuatan Jangka Panjang	60

Pilpres 2014 65
Skenario Pasca Pilpres 2014 70
Menyikapi Kemenangan Jokowi 76
KMP Membangun Koalisi Keumatan 80
Kabinet Kerja dan Kerja Dakwah 85
Faktor Moral 90
Pemimpin Membangun Masa Depan 94
Pro Active Political Party 98
KPK-POLRI: Ujian Kepemimpinan Nasional 102
Kapasitas Pemerintahan 106
Menembus Batas Pertumbuhan 110
Be The Elephant 114
Pilkada Serentak dan Peluang Dakwah 118
Suksesi PKS: Jundi, Ibadah dan Kontribusi 123
Membangun Good Party Governance 128
Membangun Dakwah Kultural dan Struktural 133
Membangun Komunikasi Politik 137
Meneropong Politik Ekonomi Indonesia 142
Menangkap Masa Depan Politik Indonesia 146
Fenomena Gerakan Sosial Partisan 150
Mencari Figur DKI 1 154
Logika Tokoh dan Peluang Politik 158
Ahok dan Fenomena DKI 162

Membangun Politik Asketis

Dalam sebuah dialog membahas masa depan partai politik Indonesia menjelang 2014 pada medio Februari lalu, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan kerinduannya pada parpol aksetis. Partai yang mampu menampilkan kinerja optimal dengan memberikan contoh melalui pengelolaan keuangan partai yang transparan, menjadikan politik sebagai wadah perjuangan nilai bukan transaksional-pragmatis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, askétisisme adalah paham yang mempraktikkan kesederhanaan, kejujuran, dan kerelaan berkorban. Jadi, politik asketis adalah pilihan politik yang mengedepankan fungsionalitas dengan menjadikan kesederhanaan, kejujuran dan berkorban jalan hidup. Dalam hiruk pikuk dunia politik Indonesia menjelang 2014, adakah politik asketis di Indonesia?

Mas Silih Agung Wasesa, penulis best seller Political Branding, dalam sebuah pertemuan mengatakan bahwa bukunya tersebut murni terispirasi oleh apa yang dilakukan PKS pada periode 1999-2004 tatkala jargon bersih dan peduli benar-benar nyata

dirasakan masyarakat. Di Yogya, tempat kuliah beliau, klinik pelayanan kesehatan PKS buka 24 jam melayani. Bahkan tidak jarang menjemput pasien. Para dokter dan perawat yang mayoritas kader dan simpatisan, bekerja tekun tanpa berharap imbalasn bahkan tak jarang nombok dana sendiri agar klinik tetap berjalan. Di Kelapa Gading tatkala terjadi banjir besar, kepanduan PKS dengan seragam coklatnya menolong sampai ke pelosok dimana aparatpun kadang sulit menjangkau-nya. Banyak diantara yang dibantu itu warga keturunan. Semua dilayani dengan ihsan. Tatkala diberikan imbalan, pejuang keadilan itu dengan senyum tulus menolak sambil mengatakan, "Kami gembira dapat menolong Bapak dan Ibu. Ini peluang pahala dan nilai yang diajarkan oleh PKS pada kami."

> ...pilihan politik yang mengedepankan fungsionalitas dengan menjadikan kesederhanaan, kejujuran dan berkorban jalan hidup.

Di ranah legislatif, kita temukan gelombang para aleg DPRD PKS yang dengan teguh menolak politik uang. Mulai dari akh Yudi Widiana di DPRD Jabar menolak uang kadeudeh, akh Yuswar Hidayatullah di DPRD Sumsel dan diikuti oleh kader lain dipelosok Idonesia. Di Pusat sosok Hidayat Nurwahid yang tampil lugas dengan kebersahajaannya mempesona publik. Salah satu stasiun TV sampai kesulitan untuk membawa peralatannya karena harus masuk jalan sempit menuju rumah Pak Hidayat.

Salah satu kenangan indah tatkala pendiri Forum Lingkar Pena ukhti Helvy memindahkan sketsa indah kehidupan kader PKS itu kedalam buku fenomenal: 'Bukan Dari Negeri Dongeng'. Bahwa, kesederhanaan, kejujuran dan kerelaan berkorban itu

bukan hanya ada dalam nash Al Qur'an atau tuturan baginda Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam atau teks buku akhlaq tapi wujud dalam sekumpulan orang-orang biasa yang terduduk dalam madrasah tarbiyah dalam lingkungan kader PKS.

Satu dekade telah berlalu. Panggung politik kini banyak dihiasi cerita pak Jokowi yang *blusukan* mendengar dan menyapa masyarakat. Di banyak hasil survei, popularitas dan elektabilitas Jokowi jauh mengungguli calon yang nota bene sudah beriklan untuk menjadi salah satu kandidat Presiden RI. Profil Jokowi yang merendah, *blusukan*, mendengar dan mencoba sibuk melayani masyarakat sebetulnya mengulang kembali pesan bahwa publik dari dulu memiliki nurani dan *connected* dengan organisasi, orang atau siapa pun yang memang fokus menjalankan politik asketisme ini.

"Semua dilayani dengan Ihsan Tatkala diberikan imbalan pejuang keadilan itu dengan senyum menolak."

Kita, para aktivis dakwah, sebenarnya sejak awal diingatkan menjalankan sikap ini. Imam Hasan Al Bana, pernah menggadaikan rumah tanpa ada seorangpun yang tahu untuk membiayai dana bulanan beberapa keluarga dakwah yang suami-suaminya sedang 'sekolah' di madrasahnya Nabi Yusuf. Kata Imam Hasan Al Bana, "Andai masyarakat tahu, kita lebih mencintai mereka ketimbang kita mencintai keluarga kita sendiri." Sehingga wajar tatkala seorang ikhwah mengingatkan dulu 90% waktu kita untuk dakwah dan hanya 10% untuk diri dan keluarga. Sekarang, kita para aktivis dakwah, perlu berbenah agar harapan publik pada politik asketis bisa terwujud.

The Jokowi Effect dan Masa Depan Dakwah

Perkenalan saya dengan Pak Jokowi agak unik. Saat jadi Sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat PKS, saya mendapat amanah menjadi panitia Seminar Nasional MPP PKS dengan tema: Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat. Idenya sederhana, setelah lebih dari satu dekade pelaksanaan otonomi daerah, MPP PKS ingin melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan dan dampak otonomi daerah tersebut pada kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tupoksinya, tugas MPP PKS adalah melakukan pengkajian dan memberikan rekomendasi kebijakan strategis partai kepada DPP PKS.

Salah satu daerah yang kami nilai cukup berhasil melaksanakan otonomi daerah adalah Kota Solo. Kebetulan PKS adalah partai pendukung pak Jokowi selama dua kali pilkada di Solo. Dari Mas Haris, sekarang Wakil Walikota Salatiga, saya dapat nomor HP Pak Jokowi. Nomornya amburadul, bukan nomor cantik. Saat saya mengirimkan sms yang isinya undangan menjadi narasumber seminar kami, tidak sampai lima menit sudah ada

sms jawaban, *"Siap Mas, mohon kirim TOR ke ajudan saya. Ini emailnya."*

Saya pun mengirim *term of reference* ke email dimaksud dan kemudian meng-sms balik Pak Jokowi untuk pemberitahuan email sudah dikirim. Kembali dapat jawaban, *"Siap Mas, mohon diingatkan."*

Perkenalan saya dengan Pak Jokowi agak unik. Saat jadi Sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, saya mendapat amanah menjadi panitia Seminar Nasional MPP PKS ...

Tiga hari sebelum acara, saya ingatkan beliau. Sayang jawabannya, "Mas maaf saya tidak dapat hadir karena Menkominfo akan datang ke Solo pada waktu bersamaan. Dan menteri sampean ini sudah tiga kali ke Solo saya tidak bisa menemani. Jadi saya akan kirim Pak Sekda untuk mewakili."

Pagi hari saat seminar di Taman Ismail Marzuki Pak Sekda Kota Solo hadir dan memberi paparan yang sesuai dengan maksud kami menggali peluang dan tantangan otonomi daerah dikaitkan dengan kesejahteraan rakyat.

Setelah itu tidak pernah ada hubungan lagi dengan beliau. Sampai kemudian terjadilah urut-urutan kejadian beliau maju di Pilkada DKI. Dengan *trade mark blusukan* beliau sukses memberi fenomena baru yang segar, merakyat dan yang utama dengan strategi atau *personal identity* yang khas menjadi *media darling* hingga saat ini.

Gebrakannya pada hari kedua melakukan sidak ke kelurahan dan kecamatan, diikuti kunjungan ke pusat-pusat kekumuhan

masyarakat tanpa mengikuti protokoler yang menimbulkan kesan suspen 'kejutan' bagi khalayak dan media, berhasil menjadi magnet berita yang sangat kuat. Termasuk diantaranya menciptakan *momen of turth* seperti pelantikan Walikota Jakarta Timur di lapangan bola di salah satu kampung di kelurahannya, juga kebijakannya merotasi Walikota Jakarta Selatan menjadi Kepala Dinas Perpustakaan Daerah, menjadikan Pak Jokowi buruan utama media.

Diantara gebrakan fundamentalnya adalah menyebarkan KJS (Kartu Jakarta Sehat) yang langsung heboh dan dimanfaatkan masyarakat, serta penyebaran poster berukuran 1 x 1.5 m sampai ke RT dan RW yang berisi informasi APBD Jakarta yang lebih dari 46 triliun itu. Seorang *ikhwah* yang ketua RT gembira sekali dengan poster ini karena beda dengan tahun-tahun sebelumnya, musrenbang dilakukan tanpa mengetahui besaran alokasi untuk kelurahannya. Sekarang detail alokasi per item di kelurahan bisa diketahuinya dengan akurat.

Tak heran di banyak hasil survei beliau selalu masuk ke dalam jajaran kandidat potensial untuk capres. Karena popularitasnya pulalah, PDIP memanfaatkannya untuk mendongkrak elektabilitas calon kepala daerahnya seperti kejadian di Jawa Barat dan Sumut. Kebetulan didua pilkada itu, pak Jokowi mendukung calon yang menjadi penantang calon dari PKS.

Dalam konteks dakwah, kita sebagai partai dakwah, dimanakah menempatkan Pak Jokowi? Bagaimana masa depan dakwah dikaitkan dengan *The Jokowi Effect*? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa hal yang perlu kita elaborasi bersama.

Pertama, fenomena *Jokowi Effect* menunjukkan betapa media, dengan segala lininya—baik cetak, online, elektronik dan yang

utama social media, menjadi salah satu pilar utama pembentuk persepsi publik. Mengutip bahasa Mas Silih Agung Wasesa, salah satu pakar marketing politik, di akhir Desember 2011 Pak Jokowi tidak masuk dalam radar media nasional secara masif, tapi di bulan Juni 2012 beliau sudah memenangkan putaran pertama pilkada DKI. Dalam waktu enam bulan, proses transformasi dari tokoh lokal menjadi tokoh nasional dapat dilakukan. Pelajaran pentingnya, klise tapi berulang-ulang terjerembab di lubang yang sama, media adalah sarana dakwah yang utama. Dan iklan bukan lagi pembentuk *branding* utama. Tetapi pemberitaan, pembahasan di media sosial, sampai bisik-bisik di pasar dan warteg itulah yang menjadi *endorser* utama pembentukan citra dan *branding* seseorang.

Itulah sebabnya setelah pilkada DKI, muncul kajian tentang 10:90 marketing strategy, dimana yang dilakukan adalah menyiapkan produk yang baik dengan *branding* sesuai sikon (10% pekerjaan) dan biarkan public melalui kanal-kanalnya membincangkan itu dan mem-*viral*nya, menggulungnya—yang merupakan tahap termahal mestinya hingga menjadi masif dan gelombang besar—yang merupakan 90% pekerjaan.

Kedua, personality seseorang merupakan *brand equity* paling mahal. Bahasa *You cannot train a duct to fly*, bisa kita pahami. Pak Jokowi memang sudah punya bahan dasar yang berkualitas. Kesuksesannya membangun kota Solo menjadi ikon bagi para pedagang. Tindakannya membangun mental melayani di kalangan birokrat plus sikap *humble* (rendah hati), menjawab sms dan telepon, mengambil satu ikon mobil nasional, berani teguh mempertahankan prinsip tidak memberi izin *mall* dan supermarket/mini market adalah satu diantara contoh bahan dasar itu.

Hati manusia akan tersentuh oleh *akhlaqul karimah*. Dan *akhlaqul karimah* pejabat publik tidak dilihat dari kebijakan personalnya, tapi dilihat dari kebijakan publiknya. Tidak memberi izin pada *mall* dan supermarket atau minimarket, jelas menunjukkan pemihak-kannya pada ekonomi kecil melawan para pemodal. Membela yang kecil tidak membawa pada keuntugan ekonomi, malah lebih sering mendatangkan tantangan dan tekanan.

...iklan bukan lagi pembentuk branding utama. Tetapi pemberitaan, pembahasan di media sosial, sampai bisik-bisik di pasar dan warteg itulah yang menjadi endorser utama pembentukan citra dan branding seseorang.

Personality pak Jokowi adalah anugerah bagi PDIP. Dulu ditahun 2010 dalam sebuah pertemuan yang digagas oleh Puskaptis UI, saya duduk berdampingan dengan pak Amir Syamsudin, saat itu beliau masih menjabat sebagai Sekjen partai Demokrat sebelum kongres, melihat fenomena banyaknya partai-partai hanya dijadikan kendaraan oleh para tokoh dan pemilik modal dalam banyak pilkada, beliau berujar, *"Kami memimpinkan suatu saat nanti kita akan ambil kader terbaik, kita dukung dan back up dana untuk menjadi pemenang dalam pilkada. Kemudian akan menerapkan nilai-nilai partai dalam pemerintah daerahnya. Bukan menjadi figur yang sibuk membalas jasa para pemodalnya."*

Keberadaan figur yang memiliki bahan mentah berkualitas ini sangat penting. Saat saya mendapat kesempatan meliput Pilpres Amerika November 2012 lalu, delapan hari menyusuri 12 negara bagian Amerika dan bertemu dengan beberapa pengurus partai Demokrat disana, mereka mengatakan, *"We found the man."*

Kami telah menemukan orangnya. Obama adalah figur yang dicari untuk mengalahkan calon partai Republik yang telah berkali-kali mengalahkan Demokrat pada dua pilpres terakhir. Mereka sangat yakin Obama menang di 2008 dan 2012 karena kualitas personal Obama memang memiliki bahan mentah yang baik.

Ketiga, ada ciri yang sama antara tokoh-tokoh yang mampu membangun penerimaan publik dan media yang luas. Bukan uang, bukan citra sesaat bukan juga kekuatan besar yang mendukung. Tapi kejujuran, kebersahajaan, karakter mereka itulah yang menjadi modal utama. Dalam *inter-connected world* yang ada sekarang, pejabat publik hidup laksana dalam akuarium transparan yang memiliki *zooming*. Ketulusan dan pencitraan sangat jelas bedanya. Kerja keras dan tebar pesona nyata adanya.

Masa depan dakwah sangat cerah, karena melalui contoh kecil Pak Jokowi di DKI, kita belajar bahwa melayani dengan keterbukaan dan penghargaan pada publik dengan tulus dapat membuat basis dakwah meluas dan menjadi rahmat bagi semua.

Lalu apa hubungan semua dengan masa depan dakwah? Ada banyak. Yang pertama, dakwah perlu di *back up* media. Yang kedua, dakwah memerlukan pribadi-pribadi mempesona dikarenakan kekuatan iman dan kesederhanaannya; pribadi-pribadi bersahaja yang berani mengambil keputusan. Ketiga, dakwah perlu menyayangi kader-kader utamanya ketimbang mementingkan pemilik modal. Keempat, masa depan dakwah sangat cerah, karena melalui contoh kecil Pak Jokowi di DKI, kita belajar bahwa melayani dengan keterbukaan dan penghargaan

pada publik dengan tulus dapat membuat basis dakwah meluas dan menjadi rahmat bagi semua. *Wallahu a'lam bishawab.*

Membangun Kelas Menengah Kader

Jika melihat sirah Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam, kita akan tahu bahwa di antara pengikut awal beliau adalah sahabat berkategori kuat secara ekonomi. Sebut saja diantaranya Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf dan Umar bin Khattab. Bahkan Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam bersama sang istri Khadijah ra. termasuk dalam kelompok ekonomi kuat sebagai pedagang sukses. Tidak heran jika dalam al Qur'an ada banyak ayat yang memerintahkan infaq, zakat dan sedekah. Hanya dua ayat saja yang memuat tentang *fuqara* dan *masakin*.

Tidak hanya itu, keempat Imam Besar kita: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, semuanya terkategori sebagai pedagang besar yang memiliki *financial freedom*, sehingga sangat tegas dalam memberikan fatwa. Maka nampak jelas bahwa hubungan dakwah dengan ekonomi sejak awal sangat simbiosis mutualisme.

Pada awalnya dakwah memerlukan *back up* kekuatan ekonomi kadernya. Tapi pada kondisi ketika dakwah sudah meluas

dan mendapat dukungan publik, justru ekonomi kader dan jamaah akan sangat terbantu. Pada tahap inilah kegagalan menyeimbangkan antara prestasi rekrutmen dakwah dengan penyiapan 'kelas menengah kader' akan membawa dampak pada tidak kokohnya perkembangan dakwah.

Pada suatu kondisi, dakwah harus memasuki tahap objektifikasi nilai-nilainya menjadi prestasi amal kebajikan dengan semua instrumennya. Publik harus merasakan keindahan nilai dakwah melalui layanan-layanannya baik barang atau jasa yang diakui publik. Dalam konteks perjuangan dakwah kita di Indonesia, dimana medan politik menjadi salah satu medan utamanya, biaya politik cukup tinggi. Oleh karena itu, terbentuknya 'kelas menengah kader' akan menjadi tulang punggung utama. Tanpa dukungan kelas menengah, ada kecenderungan yang mesti diperhatikan: merebaknya 'ekonomi rente', 'ekonomi orang tengah/makelar' hingga dijadikannya kader atau institusi sebagai kendaraan bagi mereka yang memiliki kekayaan. Jika ini terjadi perkembangan dakwah bisa terganggu.

Lalu bagaimana kelas menengah kader dibangun? Yang pertama perlu didefinisikan apa yang dimaksud dengan 'kelas menengah'. Dalam kategori ekonomis, 'kelas menengah' didefinisikan mereka yang berpenghasilan 2 - 20 dolar sehari. Biasanya dengan penguatan ekonomi, kelas menengah juga menikmati posisi sebagai *pressure group* di masyarakat. Lebih mandiri dan lebih vokal. Latar belakangnya bisa mereka yang dengan kekuatan intelektualnya menjadi birokrat, kelompok *middle* manajemen di perusahaan hingga mereka yang mempraktekkan wirausaha.

Dalam konteks inilah hadits Nabi bahwa 9 dari 10 pintu rizki itu melalui bisnis. Imam Hasan Al Bana bahkan mengingatkan

kita dengan kata-katanya, "Berdaganglah kalian karena Nabimu pun seorang pedagang." Ustadz Anis Matta pun pernah menjelaskan, dari tiga kelompok masyarakat, kalangan *privat sector* (usahawan penggerak ekomomi) jauh lebih powerful dibanding kalangan *public sector* (pemerintah dan negara dengan seluruh perangkatnya) dan *third sector* (sektor ketiga yang terdiri dari kekuatan masyarakat sipil). Seorang Bill Gates, pada 2004 memiliki kekayaan 56 bilyun US dolar mendekati angka APBN Indonesia pada tahun itu 600 trilyun rupiah. Seorang George Sorros dapat memporak-porandakan perekonomian negara-negara Asean ditambah Korea pada tahun 1997 lalu.

Dalam kategori ekonomis, 'kelas menengah' didefinisikan mereka yang berpenghasilan 2 - 20 dolar sehari.

Tidak ada langkah instan dalam membangun bisnis. Jika melihat biografi para pahlawan ekonomi yang berjuang melalui jalur bisnis, biasanya mereka memiliki karakter diri yang amat mirip dengan pejuang dakwah. Di antaranya:

Pertama, memiliki etos kerja yang tahan banting. Seperti juga da'i yang tak pernah menyerah dalam membina umat, seorang *enterpreneur* selalu mampu bangkit dari berbagai krisis atau tekanan yang datang. Perhatikanlah kisah Liem Shio Liong, keluarga Suryajaya, keluarga Riady hingga keluarga Haji Kalla atau keluarga Bakrie.

Kedua, selalu inovatif dalam melihat peluang bisnis. Seorang dai akan sukses jika mampu menampilkan dakwah yang berkesan, relevan dan diperlukan, demikian juga usahawan. Kisah pak Utomo melahirkan minuman kemasan Aqua atau group Ciputra yang mengubah kawasan Bintaro jadi *The Professional City* bukti

Membangun kekuatan dakwah tanpa dibarengi kekuatan ekonomi pasti pincang... wajib hukumnya bagi gerakan dakwah untuk segera mewujudkan 'kelas menengah kader' yang menjadi tiang bagi kekuatan dakwah itu sendiri

betapa pasar bukan hanya dicari tapi diciptakan.

Terakhir, usahawan selalu tahu rumus: makin dermawan makin banyak untung. *Google* adalah perusahaan paling cepat berkembang di dunia. Rahasianya satu: dermawan memberikan layanan *search engine google* dan layanan email gratis *gmail* dengan kapasitas yang terus meningkat. Da'i pun demikian, tingkat keberkesa-nannya ditentukan tingkat keikhlasan dan kedermawanan-nya.

Membangun kekuatan dakwah tanpa dibarengi kekuatan ekonomi pasti pincang. Karena itu, wajib hukumnya bagi gerakan dakwah untuk segera mewujudkan 'kelas menengah kader' yang menjadi tiang bagi kekuatan dakwah itu sendiri. *Wallahu a'lam.*

Tsunami Jokowi

Dalam teori perang Tsun Zu, salah satu faktor utama adalah mengenal musuh/kompetitor. Dalam pemilu 2009, diluar semua faktor mesin politik, kerja caleg dan gerakan serangan darat yang dilakukan para kader, faktor utama yang sangat mempengaruhi pileg 2009 adalah tsunami SBY yang mengantarkan Demokrat jadi pemenang pemilu. Faktor ketokohan SBY dalam beberapa analisis memberi kontribusi 86% bagi kemenangan Demokrat.

Banyak analisis dilakukan terkait dengan Tsunami SBY setelah itu, yang mengemuka ada tiga hal:

Pertama, figur SBY sangat sulit ditandingi. Dalam beberapa kaidah *political marketing*, tokoh itu dilahirkan. David Axelord, mengatakan saat menilai Obama,"*We found the man.*" Kombinasi fisik yang good looking, karakrer dan kejujuran serta momentum yang pas menjadi rahim yang melahirkan tokoh. SBY dengan *treatment* yang tepat mampu menyapu kemenangan 2009.

Kedua, faktor masyarakat Indonesia yang rata-rata usia sekolah 7.5 tahun sangat memerlukan sosok figur yang menyederhanakan persepsi pemilih.

Ketiga, di negara maju pun faktor tokoh tetap memberi dampak utama. Kisah Obama, Tony Blair, Shintaro Abe sampai Angela Merkel menunjukkan peran tokoh yang penting.

Bagaimana dengan 2014?

Potensi tsunami juga mungkin terjadi melalui tokoh Jokowi. Sejak terpilih menjadi Gubernur DKI popularitas dan elektabilitas Jokowi terus unggul dibanding yang lain. Dukungan *socmed* dan *citizens journalizm* terus mengemuka. Beberapa keputusan Jokowi dianggap sesuai dengan harapan publik: transparansi anggaran, membuat tandingan PRJ dan ide memindahkannya ke Monas, rekrutmen terbuka untuk jabatan Lurah dan Camat serta kontroversi KJS. Tak heran PDIP banyak menggunakannya dalam pilkada.

Ada anggapan citra Jokowi akan hilang karena masih lebih setahun menjelang pilpres. Tapi jika melihat almanak politik ke depan, tidak terdapat momen sebesar pilkada DKI. Ada pilkada Jatim, tapi nilai lokalnya lebih tinggi ketimbang isu nasional. Pileg melulu mengemuka, urusan caleg dan mesin politik. Karena itu peluang kompetitor Jokowi dalam survey tidak lebih dari 10 kandidat. Dan melahirkan kandidat instan dalam iklim politik yang bising sangat kecil.

Apa pelajaran yang bisa diambil?

Menurut saya ada dua hal: Pertama, perlu usaha serius dan berbasis *merit system* melahirkan tokoh. Salah satu kandidat penantang Jokowi adalah Prabowo. Di 2009 lalu Prabowo hanya cawapres yang kalah. Tapi dengan ketekunan dan terus memelihara modal yang ada, kini hasil survei menempatkannya di posisi dua.

Sejak terpilih menjadi Gubernur DKI popularitas dan elektabilitas Jokowi terus unggul dibanding yang lain. Dukungan socmed dan *citizens journalizm* terus mengemuka.

Di 2004 ketokohan HNW setara SBY. Sayangnya modal sosial yang mahal tidak berlanjut. Setelah amanah Ketua MPR tidak ada lagi panggung utama yang tersedia. Upaya memajukan HNW di pilkada DKI sulit mengisi gap yang ada.

Beberapa menteri yang berprestasi pun seperti mengulang nasib HNW. Nama Anton Apriantono sebagai peletak pondasi pertanian modern mulai hilang tak terdengar. Karena itu, tokoh-tokoh seperti Anis Matta, M. Sohibul Iman, Fahri Hamzah, Muzammil Yusuf atau Tifatul Sembiring perlu terus mengasah diri. Dan jangan lupa ramah media. Rumus ramah media sederhana: tulus dan melayani. Sebagian berpendapat, jika pemilik media meninggalkan Jokowi popularitasnya akan turun. Tapi dunia tidak vakum.

Kedua, hargai ruang publik. Sakralitas ruang publik perlu kita selalu jaga. Lagi-lagi rumus ruang publik sederhana: integritas. Sama kata dengan perbuatan. Bagi publik, dasar kekuasaan adalah kepercayaan. Tingginya kepercayaan kepada Jokowi diantaranya janji KJS, transparansi anggaran dan dana kelurahan serta pamong praja sebagai pelayan mulai diwujudkan. Dan dua hal ini sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam bahwa sebagai mu'min tiap kita mesti menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan al Qur'an sudah mengingatkan, *"Kaburo maktan 'indallah an taquulu ma laa ta'lamun."*

Dengan sistem pengkaderan yang rapi. Sisrem seleksi, promosi dan nominasi yang baik, stok calon pemimpin bangsa dari PKS sangat berlimpah. Tugas kita menjaga dan mengembangkannya.

Wallahu a'lam bishawab.

Leadership Factor Pada Pilpres 2014

... visi keummatan adalah wujudnya kebijakan yang pro pada penguatan ekonomi umat (ekonomi syariah, koperasi syariah, UKM ummat hingga pengelolaan zakat yang lebih optimal dengan peran negara), institusi pendidikan umat (masrasah, pesantren dan turunannya) ataupun ormas-ormas Islam yang perlu diperkuat basis institusi, manajerial hingga SDM nya.

John C. Maxwell dalam bukunya, *The Leadership Gold* (2008), menjelaskan bahwa *'almost everything rise and fall on leadership.'* Hampir segalanya jatuh dan bangun karena kemimpinan.

Di awal kemerdekaan hingga tahun 60-an kepemimpinan Sukarno—terlepas dari keruwetan politik dan ekonomi dalam negeri—menginspirasi banyak negara untuk merdeka dan mewujudkan martabat bangsa Indonesia yang mampu membangun Gelora Senayan yang terbesar dikawasan Asia, menyelenggarakan Asian Games tahun 1964 hingga

terbangunnya Gedung Kesenian dan museum-museum yang berkualitas.

Pasca reformasi, khususnya masa kemimpinan SBY, banyak pihak menyayangkan hilangnya peluang emas berupa *demograpic benefit* dimana tidak semua negara memiliki keuntungan jumlah dan usia produktif penduduk terbesar didunia. Kebijakan pendidikan yang tambal sulam, kebijakan ekonomi yang tidak ekspansif hingga ketergantungan pada asing yang tetap tinggi merupakan sedikit fakta yang tampak nyata.

Lalu kepemimpinan seperti apakah yang dibutuhkan Indonesia, khususnya menjelang Pilpres 2014? Dan apakah gerakan dakwah sudah menyiapkan diri memgambil momentum perubahan?

Pentingnya menyiapkan diri menghadapi Pilpres 2014 bagi gerakan dakwah sangat menentukan orientasi bangsa ini ke depan. Terpilihnya Capres seperti Jokowi, Prabowo atau Sri Mulyani sangat memungkinkan membuat Indonesia menjadi negara yang maju, kuat secara ekonomi, komitmen pada demokrasi—tapi minus visi keummatan.

Maksud visi keummatan adalah wujudnya kebijakan yang pro pada penguatan ekonomi umat (ekonomi syariah, koperasi syariah, UKM ummat hingga pengelolaan zakat yang lebih optimal dengan peran negara), institusi pendidikan umat (madrasah, pesantren dan turunannya) ataupun ormas-ormas Islam yang perlu diperkuat basis institusi, manajerial hingga SDM nya. Peluang terjadinya *survival of the fittes*, dimana kekuatan umat yang masih relatif lemah dan tertinggal akibat diskriminasi kebijakan puluhan tahun untuk bertarung secara pasar bebas dengan institusi milik kelompok nasionalis, liberal ataupun kawan-kawan etnis keturunan, sangat besar terjadi.

Kita tahu penguasaan ekonomi, lembaga pendidikan, media dan LSM yang non keummatan jauh lebih established dibanding milik umat.

Tanpa menutup peluang bahwa capres-capres dari parpol atau komunitas nasionalis diatas yang bisa saja diajak untuk juga memihak agenda keummatan, peluang besarnya jika gerakan Islam mau mewujudkan capres yang dari awal memang lahir dari gerakan dakwah dan gerakan keummatan. Baik dari parpol Islam ataupun ormas Islam yang sejak awal akrab dan memperjuangkan agenda umat.

Sekali lagi, ini tidak melulu mengharuskan kita melupakan upaya mendekati dan menawarkan agenda keummatan pada siapapun capres yang kemungkinan besar akan membawa Indonesia maju pada pilpres 2014 ini. Karena bisa jadi capres dari basis keummatan memiliki peluang juga untuk terjerembab pada kubangan korupsi dan tidak mewujudkan *good coorporate government* ataupun *good governance*. Karena syarat dan komitmen untuk memberantas korupsi, berperilaku sederhana, menjadi contoh teladan dan memiliki integritas untuk memperjuangkan transparansi serta akuntabiltas publik adalah suatu syarat dasar dari semua capres.

Artinya jika semua syarat dasar sudah terpenuhi maka pilihan berukutnya adalah capres yang dekat dan memiliki agenda keummatan. Jika diminta memilih antara capres yang dekat dengan umat tapi memiliki masalah dengan syarat dasar, dan capres dari kalangan non umat tapi memiliki syarat dasar saya memilih capres yang memenuhi syarat dasar lebih utama.

Lalu siapakah capres yang lahir dari rahim gerakan keummatan dan yang memiliki komitmen memajukan ummat?

Ada dua lapis menurut saya; ada pak Hidayat Nur Wahid, Yusril Ihza Mahendra, Pak Suryadarma Ali ataupun yang terbaru Habieb Riziq. Lapis kedua adalah mereka yang memiliki kedekatan dengan ummat, ada Pak Mahfud MD, Pak Hatta Rajasa, Pak Muhaimin Iskandar dan bisa juga dimasukkan Pak Dahlan Iskan.

Pasti banyak kontroversi dengan dimasukkannya nama dan kategorisasinya. Tapi secara umum memang fokusnya adalah agenda keummatan. Makin cepat umat memiliki kesamaan pandangan dan paradigma, makin baik hasil bagi tersosilisasikannya agenda keummatan pada para capres.

Karena, salah satu problem terbesarnya adalah memasifikasi pesan. Antara pesan keummatan yang benar dan strategis, dengan proses masifikasinya adalah dua hal berbeda. Dengan media mainstream baik TV, cetak, online dan radio yang mayoritas bukan milik umat kita punya tingkat kesulitan untuk menyatukan dan memasifikasi sikap dan suara umat agar optimal dalam Pilpres 2014.

Lalu apa langkah yang harus kita lakukan?

Bagaimana pun adanya kesatuan langkah umat baik di tingkat elit maupun di tingkat *grassroot* sangat perlu segera dilakukan. Ditingkat elit, alangkah baiknya jika semua calon pimpinan dari kalangan umat dapat duduk bersama, berdiskusi dalam kerangka kepentingan umat serta menyatukan pendapat untuk menyatukan sikap dan suara umat menuju satu gerak. Karena itu, dalam beberapa kesempatan saya mengangkat isu koalisi keummatan dalam Pilpres 2014.

Poros umat perlu segera menyatukan shaf, khusunya

dikalangan pimpinan umat. Sesudah itu tugas kita bersama menyosialisasikannya pada seluruh shaf dan barisan umat melalui saluran-saluran yang kita miliki. Sehinga menjelang 2014 akan tercapai sikap yang satu, solid dan kokoh dari suara dan sikap umat sehingga daya tawar dan daya jual kita meningkat.

Siapa yang akan memulai?

Saya berpikir semua harus memiliki inisiatif untuk segera menggulirkan ide koalisi keum-matan menghadapi Pilpres 2014. Parpol Islam dan Parpol berbasis umat Islam bisa saling berkompetisi dalam pileg tetapi harus bekerjasama dalam pilpres 2014, karena nilai strategis Pilpres sangat menentukan masa depan umat.

Kita merindukan sosok Presiden yang akrab dengan terminologi ummat, yang tidak nyaman dengan konser-konser musik asing apalagi cadas beserta budaya barat yang merusak lainnya. Presiden yang mencintai rakyatnya karena takut pada Allah SWT.

Dalam sistem Presidensil kita, posisi Presiden sangat kuat. Bahkan dengan tidak adanya MPR yang memiliki hak membuat GBHN, maka kemana dan seperti apa Indonesia ke depan sangat bergantung pada sosok Presidennya. Dengan kepemimpinan yang kuat, presiden dapat menggalang kekuatan publik bahkan juga DPR, untuk mendukung ide dan gagasan masa depan Indonesia yang ramah dan mendukung kekuatan umat.

Kita merindukan sosok Presiden yang akrab dengan terminologi ummat, yang tidak nyaman dengan konser-konser musik asing apalagi cadas beserta budaya barat yang merusak lainnya. Presiden yang mencintai rakyatnya karena takut pada Allah

SWT. Presiden yang mau memajukan masjid, pesantren, UKM dan ekonomi syariah serta budaya Islami.

Kita masih punya waktu.

Ayo kita desak para pimpinan umat untuk bersatu demi agenda besar keummatan dalam kerangka keindonesiaan yang kuat. *Wallhu a'lam bishawab.*

Membangun Sistem Keuangan Partai

Dua pekan lalu, saya banyak dikejar wartawan untuk menjawab pertanyaan, *"Apakah benar PKS menerima dana dari Cagub Sulsel Ilham Arif Sirajudin dalam Pilgub yang baru lalu?"* Saya jawab, silahkan dibuka dan diusut sampau tuntas. Kalau perlu bongkar praktek ini. Karena perilaku partai yang hanya menjual perahu/kendaraan bagi calon kepala daerah yang ingin maju Pilkada sebenarnya bertentangan dengan niat awal mendirikan partai untuk berjuang. Perilaku ini juga membuat partai masuk ke dalam lubang jebakan yang mengingkari fungsi dari partai itu sendiri sebagai wasilah bagi ajang kaderisasi. Alih-alih mendukung kader internal yang berkapasitas,yang bisa jadi tidak memiliki kekuatan finansial, menjadi dukungan bagi siapa yang membayar. Pertanyaan lanjutannya mungkin adalah, *"Lalu dari mana partai dapat dana untuk menggerakkan mesin politiknya?"*

Pertanyaan ini penting dan wajib dijawab. Karena dari sinilah seringkali perilaku koruptif seolah mendapat pembenaran. Bahwa untuk menjalankan mesin potik itu mahal. Memobilisasi kader

dan simpatisan itu perlu dana. *Ngumpulin* orang perlu disiapkan makan dan transport-nya. Belum lagi segala atribut dan embel-embelnya. Ujung akhirnya adalah pernyataan bahwa demokrasi itu mahal. Demokrasi itu ada harganya. Tapi betulkah teori ini?

Dalam pandangan saya, yang mengeluti dunia politik sebagai lanjutan dari pergerakan, menghidupkan kekuatan umat, pandangan bahwa politik dan demokrasi itu mahal adalah SALAH. Nilai-nilai dakwah dan pergerakan erat kaitannya dengan sentuhan hati, membangun kekuatan umat dan beramal berbasis keikhlasan.

Dalam pandangan saya, yang mengeluti dunia politik sebagai lanjutan dari pergerakan, menghidupkan kekuatan umat, pandangan bahwa politik dan demokrasi itu mahal adalah SALAH.

Sesuatu menjadi mahal karena kita tidak memproduksinya, tapi kita membelinya. Pilkada, pemilu dan demokrasi menjadi MAHAL jika kita fokus pada membeli suara, membeli dukungan dan membeli pengaruh. Tapi semua menjadi MURAH jika kita meproduksi amal yang mempesona, jika kita tulus membangun kekuatan partai berlandaskan amal *khidami* (pelayanan) dan kerja-kerja pemberdayaan. Politik jadi murah jika kita dapat bersinergi dengan *wajihah* (lembaga-lembaga) sosial, lembaga pelayanan, lembaga pember-dayaan, lembaga pendidikan dan lembaga ekonomi umat yang selama ini telah tekun membangun umat melalui kerja-kerja berprestasi tanpa berita, tanpa tokoh dan tanpa pamrih.

Bahkan kita bisa menjalankan partai berbasis pada prinsip-prinsip dakwah yang membela kepentingan publik, kepentingan dhuafa,

Pilkada, pemilu dan demokrasi menjadi MAHAL jika kita fokus pada membeli suara, membeli dukungan dan membeli pengaruh. Tapi semua menjadi MURAH jika kita meproduksi amal yang mempesona, jika kita tulus membangun kekuatan partai berlandaskan amal khidami (pelayanan) dan kerja-kerja pemberdayaan.

kepentingan bangsa diiringi dengan perilaku seorang mujahid yang sedang berjuang dalam bingkai kesederhanaan, komitmen *akhlaqul karimah* dan menjadi pelayan masyarakat. Saya yakin dukungan masyarakat akan sangat tinggi. Pola hubungan partai dengan masyarakat dan kader yang merasa satu perjuangan, satu hati, satu rasa dan satu tujuan akan membuat partai benar-benar menjadi wadah perjuangan bagi umat, bagi rakyat dan bagi bangsa. Jika ini terjadi maka politik biaya rendah, sumbangan dari publik dan kader yang diikuti dengan keterbukan, kejujuran pengelolaan keuangan serta ketulusan bahwa ini adalah perjuangan bersama, niscaya akan menjadikan politik dan partai politik sebagai taman yang indah bagi rumah perjuangan kita bersama.

Bulan lalu dalam perjalanan pulang dari Yogya saya kebetulan duduk berdampingan dengan Pak Abraham Samad. Kami berdua naik kelas ekonomi. Kita bertukar salam. Ada yang mengganjal di hati saya, kenapa beliau yang ketua KPK itu mau naik kelas ekonomi. Jawaban beliau membuat saya tersentuh, *"Dekat saja, kan?"*

Artinya pilihan kelas ekonomi ketimbang bisnis adalah pilihan kesadaran diri. Sama seperti pilihan beberapa kepala daerah yang lebih memilih menggunakan kendaran Kijang Inova atau hidup dengan perilaku sederhana. Kisah Jokowi yang kian mempesona publik memberi kesan jelas bahwa politik bisa jadi sarana mempesona publik. Bahwa parpol mestinya bisa membuat orang

menjadi bersemangat dalam menata negeri.

Bulan Mei lalu, saya ikut Latihan Gabungan TNI di Jawa Timur. Saat makan malam saya berdampingan dengan Mantan Kasad FX Sudarmin. Tahu saya dari PKS, beliau berkata,"*Saya pendukung PKS sejak dulu. Tapi sejak kasus korupsi sapi saya tidak lagi jadi pendukung.*"

Suara Pak FX Sudarmin yang Katolik, militer dan pendukung PKS di awal menunjukkan bahwa partai Islam yang teguh dengan prinsip dan berperilaku sederhana, tulus dan prestatif tetap bisa dipercaya oleh semua golongan.

Jadi bagaimana cara kita membangun keuangan partai, tidak bisa dilepaskan dari cara kita membangun partai. Jika kita jalankan amanah perjuangan partai ini dengan mengikuti manhaj dakwah yang tulus, bersahaja, tekun dan prestatif, maka sistem keuangan partai akan didukung oleh bukan cuma kader tapi juga publik. Justru publik kini rindu dengan partai yang asketis, partai yang menunjukkan ciri perjuangan dan partai yang dijalankan dengan tujuan jauh dari ambisi dan kepentingan pribadi. Bisakah kita laksanakan? Kata Nabi, *"Ibda binafsika!"* Mari kita mulai dai diri sendiri. *Wallahu a'lam bishawab.*

Jati Diri PKS

Tanyakan pada kader, adakah yang berubah dengan PKS saat ini? Tanyakan pada publik adakah yang berubah dari PKS saat ini? Dan yang paling utama, tanyakan pada diri sendiri, adakah yang berubah pada PKS saat ini?

Pertanyaan introspektif ini, menurut saya penting. Bukan hanya melaksanakan nasehat Umar Bin Khattab ra. tentang *hasibuu anfusakum qobla antuhasabuu*... "Hisablah diri kalian sebelum dihisab!" Tapi lebih dari itu dikaitkan dengan kondisi PKS saat ini. Rentetan hasil survei yang dibuat banyak lembaga menunjukkan perolehan suara yang jauh lebih rendah dibanding prestasi 2009. Sebagian survey bahkan memprediksi PKS tidak lolos *elektoral thershold* 3.5%. Lalu ada hubungankah antara hasil survei yang rendah dengan 'perasaan' ada yang berubah dari PKS sekarang?

Bagi saya pribadi, hasil survei bukanlah bagian dari rukun iman yang mesti diyakini kebenarannya. Tapi ia juga bukan sekumpulan gosip yang dapat kita abaikan begitu saja. Metodologi survei telah berkembang sedemikian rapinya sehingga kian hari akurasi dan *margin error*-nya kian tepat. Jadi untuk saya hasil survei

kita adalah pelayan ummat dan bahwa kita adalah orang yang shiddiq, yang benar, jujur, yang lurus; yang kemudian dalam kampanye 2004 kita formulasikan dengan slogan BERSIH dan PEDULI.

justru bisa digunakan sebagai alat untuk 'meraba' realita. Bahkan saat saya bertemu Prof. Tarmizi, seorang ahli statistik yang tekun, beliau mengatakan pada tingkat tertentu, tanpa surveipun trend dan fenomena umum dapat dibaca dan dirasakan. Termasuk fakta bahwa sebagian kader merasakan ada yang berubah dengan PKS sekarang ini.

Saya pribadi tidak pernah terlalu memusingkan tentang elektabilitas partai. Termasuk jujurnya, tidak memusingkan tentang kasus yang mengemuka terkait suap impor daging sapi. Karena itu semua adalah efek karakter dan kerja kita baik yang dilalukan secara privat ataupun publik. Dalam bahasa sederhana, rendahnya elektabilitas kita serta tuduhan kasus impor sapi—kita tetap berprasangka baik dan biarkan pengadilan yang memutuskan kasusnya—merupakan cermin dari dekat tidaknya kita denga jati diri Partai ini. Dari dulu kita diingatkan bahwa kita adalah prajurit pemikiran (fikrah) dan aqidah. Bahwa kita adalah da'i, bahwa kita adalah pelayan ummat dan bahwa kita adalah orang yang shiddiq, yang benar, jujur, yang lurus; yang kemudian dalam kampanye 2004 kita formulasikan dengan slogan BERSIH dan PEDULI. Bersih aqidahnya, bersih akhlaqnya, bersih hartanya dan bersih pergaulannya. Peduli bukan hanya pada umat Islam, tapi pada semua warga dengan beragam suku, agama dan ras yang ada. Bahkan peduli pada semua makhluk.

Jadi premis saya sederhana, jati diri partai ini adalah partai

berakhlaq, partai beramal, partai bersih, karena memang kita ingin hidup dengan memberi kebaikan, bukan sebaliknya. Kian kuat jati diri partai ini, yang tercermin dari kadernya, dalam kerja strukturnya, dalam interaksi yang dibingkai dengan akhlaq; baik di DPR, di Gubernuran, di Kotamadya dan Kabupaten. Dalam bahasa yang lugas, jati diri partai ini mengajak pribadi kita untuk membenci perilaku korupsi, perilaku zalim, perilaku kemubaziran hingga perilaku munafik yang menjadi landasan kokohnya rezim-rezim tirani, dimanapun.

> Dari dulu kita diingatkan bahwa kita adalah prajurit pemikiran (fikrah) dan aqidah. Bahwa kita adalah da'i, bahwa kita adalah pelayan ummat.

Jadi berubahkah PKS kini? Saya ingin mengajak kita semua bercermin dari Guru Kita, Syekh Kita, Almarhum Ustadz Rahmat Abdullah yang telah dan selalu membimbing kita dengan nasehat dan tadzkirahnya. Ini sebagiannya:

"Ketika orang tertidur kau terbangun, itulah susahnya. Ketika orang merampas kau membagi, itulah peliknya. Ketika orang menikmati kau menciptakan, itulah rumitnya. Ketika orang mengadu kau bertanggung jawab, itulah repotnya. Oleh karena itu, tidak banyak orang bersamamu disini, mendirikan imperium kebenaran"

***

"Apa kabar hatimu? Masihkah ia seperti embun? Merunduk tawadhu dipucuk- pucuk daun? Masihkah ia seperti karang? Berdiri tegar menghadapi gelombang ujian. Apa kabar imanmu? Masihkah ia seperti bintang? Terang benderang menerangi kehidupan. Semoga Allah senantiasa melindungi dan menjagamu, saudaraku".

***

"Seonggok kemanusiaan terkapar, siapa yang mengaku bertanggung jawab? Bila semua menghindar. Biarlah saya yang menanggungnya. Semua atau sebagiannya."

***

"Suatu hari nanti saat semua telah menjadi masa lalu, aku ingin berada di antara mereka, yang bercerita tentang perjuangan yang indah, dimana kita, sang pejuang itu sendiri. Tak pernah kehabisan energi tuk terus bergerak, meski terkadang godaan tuk berhenti atau bahkan berpaling arah begitu menggiurkan. Keep istiqomah!"

***

"Jika ku dapat menarik 'Pelangi, Mentari dan Bintang'. Maka ku akan membentuk 'Namamu' disitu, lalu akan ku kembalikan lagi ia ke 'Langit' agar semua orang tahu, betapa bahagianya aku mempunyai 'saudara' seperti dirimu. Selamat beraktivitas".

***

"Jangan takut untuk mengambil langkah besar hari ini, Jika memang dibutuhkan!! Jurang tak bisa disebrangi hanya dengan 2, 3 lompatan kecil!! Nahnu Duat Fii Kulli Zaman".

***

"Politik telah membuahkan konsekuensi yang maha dahsyat dalam peradaban manusia. Dalam abad ke-20 saja politik telah membunuh 200 juta jiwa di seluruh dunia. Keep ur soul pure."

... pelajari dan hargai semua yang kita miliki dan pelajari dengan rendah hati kebaikan dan keunggulan orang lain. Kemudian ibda binafsika.

***

"Beban Dakwah hanya dapat diberikan oleh mereka yang memahami dan memberikan apa saja yang kelak di tuntutnya ; Waktu, Kesehatan, Harta, Bahkan Darah. Mereka Bergadang saat semua tertidur lelap. Mereka gelisah saat yang lain lengah. Seakan-akan lisannya yang suci Berkata , 'Tidak ada yang kuharap dari kalian. Aku hanya mengharap pahala Allah'."

***

"Ana harap, seperti tulisan antum, militansi dakwah tetap dipegang erat, bagaimana kita sabar, tsabat dengan keadaan yang ada, karena ini ujian, kondisi seperti apapun, saat ikhlas dalam dakwah senantiasa kita pegang, tak akan pernah melemahkan dan menggoyahkan diri kita untuk terus bersamanya, afwan atas segala kata yang kurang berkenan".

***

"Insya Allah, masa depan yang gemilang itu, kejayaan yang pernah hilang ditangan kita, akan dapat kita kembalikan lagi. Dan saya berharap Indonesia akan menjadi pemimpin kebangkitan ini". (Ucapan Ustadz Rahmat Abdullah mengutip harapan DR. Yusuf Al Qaradhawi).

***

Seni dan juga budaya, terbukti merupakan kekuatan yang mampu melembutkan, memanusiakan serta meninggikan akal budi manusia.

"Bukannya seorang dai mereka yang mengeluh tentang sulitnya merubah kondisi masyarakat. Ia bukannya dokter, ia hanya orang yang berpakaian dokter tapi jijik melihat luka besar yang harus diobatinya".

***

Jadi, saudaraku, berubahkah PKS kini? Nasehat Ustadz Rahmat diatas dapat kita jadikan timbangan. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Tidak perlu kagum dengan orang lain. Cukup pelajari dan hargai semua yang kita miliki dan pelajari dengan rendah hati kebaikan dan keunggulan orang lain. Kemudian *ibda binafsika*. Mulai dengan diri kita sendiri. Kita yang bertanggung jawab adakah PKS berubah, membaik atau memburuk. Kita yang akan dimintai pertangungjawaban. Publik seringnya merupakan juri/ hakim yang jujur. Cukuplah peringatan Allah *Ta'ala* dalam surat At-Taubah ayat 105, *"Bekerjalah kalian, sesungguhnya Allah, Rasul dan orang beriman melihat amal kalian."*

Antara Mamma Mia dan Palestina

Akhir November 2013 lalu saya mendapat tugas mewakili Komisi 1 menghadiri Sidang Umum PBB bersama Kemenlu di New York. Tema yang dibahas adalah *Articles 36* dan *37* tentang *Question on Palestine and The Middle East*. Alhamdulillah dari 6 resolusi yang dihasilkan—lima tentang Palestina dan satu tentang Syuria—secara umum mayoritas negara Anggota PBB menerima resolusi tersebut.

Secara umum, negara yang menolak selalu hampir sama: Israel, Amerika, Kanada, Australia, Federal State of Micronesia, Marshal Island dan Palau. Angka abstain antara 20 sampai 50-an negara anggota. Mayoritas anggota, diatas 120-an menyetujui resolusi yang dihasilkan. Bahkan negara-negara seperti Kuba, Venezuela, Jepang, Cina bahkan Laos pun bergabung bersama dengan Maldives, negara-negara Arab, Malaysia, Indonesia untuk mendukung resolusi.

Ada catatan menarik saat Wakil Tetap Israel untuk PBB

menyampaikan pendapatnya terhadap resolusi. Dengan bahasa Inggris yang fasih, intonasi yang jelas, gaya bicara yang menarik dan perlahan, menyampaikan pesan bahwa yang dilakukan Israel pada Palestina tidak lain adalah kebaikan. Ada 100.000 lebih penduduk Palestina bekerja di Israel menyumbang tidak kurang 10% GDP Palestina. Israel menyediakan fasilitas kesehatan dan air bersih bagi penduduk Palestina. Kenapa kami selalu disalahkan dalam banyak resolusi?

... diplomasi seni dan budaya bisa sama efektif atau bahkan menghasilkan dampak yang jauh lebih dahsyat ketimbang diplomasi senjata ataupun diplomasi perundingan.

Alhamdulillah, dengan diplomasi yang cantik dan konsisten, mayoritas negara anggota tetap dapat melihat dengan jernih betapa keras kepala dan arogannya Israel yang terus membangun pemukiman ilegal dengan menggusur dan menghancurkan tanah serta rumah-rumah warga Palestina. Karena itu, hampir semua resolusi tentang Palestina selalu sukses. Persepsi bahwa Palestina bukan cuma masalah Timur Tengah atau negeri-negeri Muslim tapi masalah kemanusiaan, telah dipahami dengan jelas. Karena itu, apresiasi bagi Kemenlu dan para pejuang diplomasi yang tekun bekerja mewujudkan jalan panjang negara Palestina yang berdaulat, mandiri dan sejahtera.

Hal menarik lain yang didapat adalah bagaimana kekuatan diplomasi harus didukung dan diperkuat dengan kekuatan seni dan sastra. Bersamaan dengan pembahasan diplomasi Palestina di Sidang umum PBB, dibuat pula Konser Rakyat Palestina di Gedung Ecosoc yang tidak jauh dari Markas Besar PBB juga di New York. Menampilkan pemenang Arab Idol yang

kebetulan dari Palestina, Muhammad Assaf, konser tersebut juga merupakan bagian dari diplomasi budaya dan seni bagi pengukuhan eksekusi Palestina.

Konser yang berlangsung semarak di tengah dingin dan beranginnya New York di akhir November cukup mampu menghibur penonton untuk menikmati sajian campuran budaya Arab dan budaya pop dalam suasana Palestina yang nyaman dan menghibur. Seni dan juga budaya, terbukti merupakan kekuatan yang mampu melembutkan, memanusiakan serta meninggikan akal budi manusia.

Esoknya, saya diajak kawan yang tinggal di New York untuk melihat drama teater yang sudah 12 tahun berlangsung di Broadway. Didasari keingintahuan seperti apakah teater Broadway yang terkenal itu, saya menerima tawaran itu.

Apa yang membuat banyak orang rela mengantri, kadang lebih dari dua jam di malam yang dingin sebelum masuk ke dalam gedung Broadway? Begitu pertanyaan saya melihat antrian yang cukup panjang jauh sebelum pukul 20 saat pertunjukan dimulai.

Kebetulan drama berjudul *Mamma Mia* ini sudah bertahun-tahun bertahan menarik penikmat yang rela membayar US$ 140 untuk pertunjukan selama 2,5 jam itu. Duduk disamping ibu-ibu asal Yunani, saya coba menyelami apa yang membuat *Mamma Mia* mampu membius banyak penonton bukan hanya di New York tapi juga di banyak kota besar di dunia.

Dan takjubnya, mengikuti jalan cerita yang sederhana dan khas barat tentang seorang anak gadis yang berusaha mencari tahu siapa ayahnya karena dia dibesarkan *single mother*, drama *Mamma Mia* memang menarik. Bukan hanya kemampuan

olah vokal dan gerak tari yang menarik, tapi kesederhanaan jalan cerita diiringi dengan gubahan lagu grup ABBA mampu membuat 2,5 jam bukan merupakan waktu yang lama. Penonton yang memenuhi ruang teater tidak kurang dari 600-an penonton serentak berdiri dalam keriangan saat konser berakhir mengiringi *standing applaus* panjang bagi para aktor dan aktris yang mementaskan drama itu.

Penulis, script writer, sutradara, dramawan, aktor dan aktris hingga penata suara ataupun penata cahaya dan semua insan seni dan budaya memiliki ruang jihad yang juga sama mulianya dengan mereka yang berjihad di lapangan diplomasi, perekonomian, pertahanan hingga jihad memerangi korupsi.

Teater Broadway bersama dengan produktivitas Hollywood memproduksi film terbukti sangat efektif untuk menjadi jalan bagi hegemoni Barat pada dunia. Pesona film, drama, novel, buku, karya sastra dan lainnya merupakan 'senjata' efektif dan 'menyenangkan' dalam menaklukkan alam pikiran dan kehendak hati masyarakat dunia. Tidak heran, pelajaran sastra dan budaya menjadi mata pelajaran wajib yang diajarkan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi di banyak negara. Dengan pendidikan berkualitas.

Pelajaran yang bisa diambil, bahwa diplomasi seni dan budaya bisa sama efektif atau bahkan menghasilkan dampak yang jauh lebih dahsyat ketimbang diplomasi senjata ataupun diplomasi perundingan. Karena itu, keberadaan sejumlah kader yang memiliki kemampuan seni dan budaya mumpuni mesti menjadi agenda utama gerakan Islam. Penulis, *script writer*, sutradara,

dramawan, aktor dan aktris hingga penata suara ataupun penata cahaya dan semua insan seni dan budaya memiliki ruang jihad yang juga sama mulianya dengan mereka yang berjihad di lapangan diplomasi, perekonomian, pertahanan hingga jihad memerangi korupsi. Moga Allah *Ta'ala* memudahkan lahirnya penulis, sutradara hingga aktor dan aktris yang mengembang misi *rahmatan lil 'alamin*...

Nikmatnya Mengenal Dapil

Sejak awal Januari, jadual masa sidang pertama periode 2013-2014 sudah selesai. Waktunya reses. Bersama tim dibuatlah jadual kunjungan untuk tiga kabupaten: Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Ada banyak kisah indah terasakan. Bahkan jika boleh jujur dapat dikatakan, waktu reses adalah pengalaman belajar terbaik. Lebih nikmat dibanding saat membahas RUU dan tugas pengawasan lainnya di gedung DPR.

Jum'at lalu, 3/1/2014, petualangan di mulai dengan mengisi khutbah Jum'at di Al-Muhajirin. Disana saya membahas tentang perkembangan isu-isu legislasi mulai upaya penghapusan kolom agama di KTP hingga upaya revisi UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang salah satu targetnya adalah mempermudah 'kawin campur'. Dilanjutkan dengan perjalanan memutari dapil mulai dari perumahan PMI di Tambun Utara, Desa Sri Mekar dan Sriamur di Kec. Sukawangi hingga beberapa titik di Desa Kedung Jaya Kec. Babelan.

Di Perumahan PMI saya bertemu dengan para kader dan relawan PKS, Ustadz Wiwin dan kawan-kawan. Ada cerita

menarik tentang bagaimana cerdiknya tim Ustadz Wiwin dalam menguasai titik strategis pemasangan bendera partai. Mulai dari lokasi hingga ukuran bendera yang saling berkompetisi. Subhanallah, saya sangat terkesan menyaksikan semangat kader dan relawan dalam memperjuangkan hal-hal yang kelihatan kecil tapi sebetulnya sangat membanggakan. Mulai mencari titik strategis, memasang atribut yang sesuai dan berdaya ungkit tinggi hingga menjaganya dari gangguan dan ancaman pihak lain.

Maafkan kami wahai para kader dan relawan, tidak akan terbayar jasamu. Biar Allah *Ta'ala* saja yang membalasnya. Tugas kami: mendatangi, mengapresiasi, membantu semampunya dan selalu tersenyum dan menyema-ngati kalian. Sekali lagi maafkan kami, dari saya khususnya.

Titik kedua lebih spesial. Mendatangi rumah keluarga besar Marsin yang baru saja merayakan khitan dan gunting rambut anaknya Putri yang berusia dua bulan. Selain mendoakan, saya juga berdialog dengan kakeknya yang berusia 67 tahun. Agak special, karena sang kakek langsung mengajak saya ke 'kamar khusus'nya yang dipenuhi keris dan asap kemenyan. Astagfirullah. Terpaksalah saya sampaikan kepadanya bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah *Ta'ala*. Besar kecil dukungan manusia dan makhluq hanyalah wasilah dari turunnya kasih sayang Allah *Ta'ala*.

... saya sangat terkesan menyaksikan semangat kader dan relawan dalam memperjuangkan hal-hal yang kelihatan kecil tapi sebetulnya sangat membanggakan.

Di titik ketiga saya mengunjungi kepala dusun, masih di Desa Suka Mekar Kec. Sukawangi. Halaman yang luas dan teras yang nyaman

walau duduk lesehan membuat kami nyaman berdiskusi ringan. Ada kejadian kecil, seorang tetangga yang berprofesi sebagai petani bertanya, "Bapak yang suka ada di TV khan?'. Saya jawab dengan senyum dan anggukan. Subhanallah, petani-petani kita ternyata banyak yang melek politik. Dalam pertemuan ini dibahas tentang RUU Komando Cadangan, yang akan mewajibkan warga negara berusia 25-55 tahun ikut program bela negara/wajib militer selama enam bulan dibiayai negara. Agar SDM kita memiliki disiplin, tangguh dan punya kemampuan bela negara. Plus juga membahas RUU Bank Petani. Saya sampaikan kepada mereka bahwa sangatlah ironis, negeri dimana mayoritas penduduknya petani, tapi membiarkan petani terjerat rentenir dan ijon. Dengan UU Petani, diharapkan perlindungan dan pemodalan bagi petani dapat diurus secara serius oleh negara melalui Bank Petani. Sayangnya, diskusi tidak bisa mendalam, karena tim yang mengatur jadwal sudah mengingatkan titik keempat sudah menunggu sejak ba'da magrib. Padahal ketika itu sudah jam delapan malam.

... waktu reses adalah pengalaman belajar terbaik. Lebih nikmat dibanding saat membahas RUU dan tugas pengawasan lainnya di gedung DPR.

Di titik keempat, kami bertemu dengan perwakilan para pemuda di rumah Bang Odoy di Sriamur Kec. Sukawangi. Dengan perwakilan para pemuda ini kami berbicara tentang tujuan PKS yang hadir bukan sekedar untuk mendudukkan caleg-calegnya di kursi dewan. Bukan!! Yang utama adalah bagaimana kehadiran PKS dapat dirasakan manfaatnya oleh publik. Khususnya dalam penguatan kualitas iman, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan baik di kalangan pemuda, orang tua dan seluruh masyarakat termasuk di desa-desa. Kalau

ada pengurus atau caleg PKS malah sibuk dengan agenda pribadi, saya tegaskan hal itu tidak sesuai dengan misi didirikannya PKS. Saya undang mereka, para tokoh pemuda untuk datang ke rumah atau ke kantor di DPR Senayan. Kebetulan karena masih banyak pembahasan RUU, kami punya strategi setiap Senin-Kamis mengundang para tokoh dari tiga kabupaten dapil untuk datang ke ruangan saya di Gedung Nusantarta 1 Lantai 3 Ruangan 335. Alhamdulillah, sudah puluhan tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah majelis taklim, mahasiswa, guru, tukang ojek, petani, hingga tukang bakso yang datang dan dilayani. Pertemuan di titik keempat ini lagi-lagi tidak dapat berlangsung lama karena titik berikutnya sudah menunggu.

Titik kelima, di rumah ketua RT Pak Helmi, di Kelurahan Kebalen Kec. Babelan. Tidak kurang dari empat ketua RT lainnya juga hadir. Indahnya, sebagian besar adalah ketua RT yang sudah berinteraksi sejak 2009. Jadilah pertemuan ini reuni yang membuat saya bertambah semangat dengan meminta kepada mereka agar segera menjadwalkan pertemuan/kunjungan ke rumah-rumah yang dulu di 2009 pernah didatangi. Rupanya para RT ini rata-rata sudah lebih dulu bertemu dengan istri saya. Kebetulan pada beberapa kesempatan, karena saya kadang mendapat tugas ke luar kota, istri saya bersama Ibu Kiki, seorang relawan yang sangat tangguh, berdua jalan *muter-muter* ditemani Bang Otib dan para mandor menyapa para konstituen. Ada beberapa isu dibincangkan. Mulai dari pembahasan tentang kondisi para caleg yang sudah bergerilya hingga janji-janji yang tidak mereka penuhi. Saya tegas mengatakan, kita di PKS menawarkan persaudaraan, keterbukaan dan kerjasama untuk *wata'awanu 'alal birri wat taqwa*. Alhamdulillah karena kita memang tidak datang 5 tahun sekali, melainkan sudah

menjaganya selama ini. Lagi-lagi *the bell is ringing*... tim penjaga waktu mengingatkan masih ada dua titik lagi yang menunggu. Waktu menunjukkan pukul 22.00 WIB.

Titik berikutnya di Desa Kedung Jaya Kab. Babelan bertemu dengan para ketua DKM dan guru-guru madrasah. Subhanallah, mendengar cerita *jiddiyah* bagaimana mereka swadaya membangun masjid dan mendengar perjuangan Pak Pungut sebagai guru madrasah membuat saya sadar betapa usaha yang telah dilakukan masih sangat kurang dibanding apa yang telah dilakukan oleh para pejuang keikhlasan yang ada di masyarakat. Saya menyatakan siap menjadi jembatan dan pelayan bagi para hadirin untuk sama-sama membangun peradaban kecil yang membawa manfaat bagi warga kampung dan desa sekitar. Saya serahkan kepada mereka dua buah buku yang menceritakan tanggung jawab seorang anggota DPR termasuk daftar dana reses yang diberikan negara Rp 150 juta per sekali reses. Walau belum banyak membantu, alhamdulillah, silaturahim sudah disambung dan semoga Allah jaga dan kuatkan sebagai wasilah untuk amal shaleh.

Titik terakhir di RT Tumi, masih di Desa Kedung Jaya. Di titik ini, tim relawan sudah membangun Jalig (jalan lingkungan) yang merupakan bagian dari dana aspirasi *ikhwah* aleg kabupaten. Alhamdulillah, lagi-lagi RT Tumi dan kawan-kawan ternyata sudah dikunjungi istri saya bersama Ibu Kiki. Kedatangan saya, menjelang pergantian hari, hanyalah menyempurnakan proses yang sudah dimulai oleh tim relawan, istri dan timnya. Bersamaan dengan pergantian hari, kami akhiri petualangan indah silaturahim hari ini untuk tiga kecamatan di Kabupaten Bekasi.

Sebelum berpisah dengan tim relawan, kami berkumpul menikmati nasi uduk Mpo Tuti di dekat Pasar Babelan. Letih pasti, baju dan mobil yang berdebu adalah konsekuensi, tapi yang membahagiakan adalah mata-mata berbinar dari tim relawan membuat perjalanan sepanjang hari ini menyisakan kenikmatan yang tak terperi. *Alhamdulillah wa jazakumullahu khairan katsiro* untuk semua yang sudah berusaha mewujudkan karaker PKS sebagai partai Islam yang selalu berusaha untuk dekat dan melayani masyarakat.

Membangun Pasar Umat

Namanya Haji Jaya, tinggal di Kec. Pedes Karawang Desa Kertajati. Sudah sejak 2009 saya mengenal dan *kukurusukan* (blusukan bahasa Jawa-nya) *muterin* dapil 4 Karawang untuk meyakinkan publik simpati dengan PKS. Ada yang berubah setelah empat tahun tak bertemu; Haji Jaya sekarang punya Pasar.

Pasar? Ya benar, sejak dua bulan lalu bertempat di jalan raya Pedes, diatas lahan 1.5 ha yang tadinya sawah, berdiri pasar swasta pertama di Karawang. Ada 60 kios dan 90 los/lapak. Ada yang berdagang pakaian, toko emas, jual beli hp, bahkan dealer motor dan BPR. 60 kios telah terisi penuh dengan sistem sewa. Bahkan sebagian masuk *waiting list*. Begitu juga dengan lapaknya: ada 40 lapak sayuran, 40 lapak daging dan ayam serta warung nasi, musholah, kamar mandi dll.

Haji Jaya, bagi saya fenomenal. Dulu saat, saya dapat amanah menjaga PKB (Purwakarta, Karawang dan Bekasi) di tahun 2009, beliau banyak membantu untuk kawasan Rengas Dengklok, Pedes, Batu Jaya dan Pakis Jaya. Semua kecamatan di Kabupaten Karawang. Dulu, beliau jawara yang punya banyak sawah dan

mulai sadar bahwa hidup itu mesti ada perjuangan. Dengan izin Allah dan atas kerja keras para kader dakwah di Karawang yang dengan tekun beramal hingga akhirnya dapat 'menjaring' Haji Jaya jadi simpatisan dan kader PKS.

Saat bertemu, beliau bercerita kepada saya bagaimana dia bisa mempunyai pasar. Awalnya adalah adanya niat memberi manfaat bagi masyarakat. Untuk mencapai pasar, rata-rata warga Pedes, Batu Jaya dan Pakis Jaya mesti ke Pasar Rengas Dengklok, dengan menempuh jarak 3-4 km. Pikirannya sederhana, andai ada pasar yang lebih dekat, alangkah baiknya. Karena itu, semangat membangun pasar kian membara.

... pilar kekuatan ekonomi umat didasari pada kemandirian kita memenuhi kebutuhan sendiri. Membiasakan jual beli diantara sesama umat.
... jangan takut merealisasikan mimpi dan cita-cita. Jangan pernah mundur karena hambatan atau beratnya proses. Fokus dan terus maju dalam mewujudkan cita.
... buatlah usaha/proyek yang diperlukan masyarakat. Product Oriented mesti diubah ke market oriented.

Dengan kemampuan seadanya, dimulailah proses panjang membangun pasar. Bukan cuma perkara kebutuhan dana yang cukup besar, tapi perizinan yang *njlimet* dan panjang pun sangat menguji kesabaran. Gangguan dari para preman dapat ditundukkan dengan mudah, bukan karena Haji Jaya seorang jawara, tapi karena niatnya yang tulus mengajak para preman sadar seperti dirinya. Alhamdulillah satu bulan setelah *soft launching* aktivitas pasar sudah cukup ramai. Hasil kunjungan dan bincang-bincang saya dengan para pedagang menunjukkan optimisme yang cerah.

Langkah Haji Jaya sebenarnya sudah banyak dicontohkan para ulama kita sejak dulu. Bahkan sejak zaman Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam melalui sosok Abdurrahman bin Auf. Para Imam Mazhab juga mencontohkan betapa kebebasan finansial membuat mereka sangat independen dalam membuat fatwa. Bahkan para Wali Songo juga mencontohkan betapa kekuatan ekonomi dan budaya merupakan dua fondasi dalam proses islamisasi super cepat di nusantara. Bahkan Imam Syahid Hasan Al Banna mengingatkan kita, "Berdaganglah kalian, karena nabimupun seorang pedagang."

Jika setiap kita mencoba menghadirkan kontribusi untuk kekuatan ekonomi umat Insya Allah kita dapat mewujudkan sabda Nabi saw, "Tangan diatas lebih baik daripada tangan yang dibawah"

Setidaknya ada tiga pelajaran besar yang bisa diambil dari kisah Haji Jaya ini. *Pertama,* pilar kekuatan ekonomi umat didasari pada kemandirian kita memenuhi kebutuhan sendiri. Membiasakan jual beli diantara sesama umat. Tidak mengeluarkan uang untuk bukan umat mesti dijadikan slogan. Pembawaan Haji Jaya sangat sederhana. Memakai sandal dan motor kemana-mana. Jumlah pekerja 4 orang. Dua keamanan, satu mandor dan satu administrasi. Prinsip menghindari 'besar pasak daripada tiang' sangat dijaga. Prinsip bahwa setiap pribadi muslim menjaga pengeluaran dengan fokus pada *need* (kebutuhan) bukan pada *want* (keinginan). Setiap ingin membeli atau mengeluarkan uang, selalulah bertanya adakah perlu?

Kedua, pelajaran lain dari Haji Jaya adalah jangan takut merealisasikan mimpi dan cita-cita. Jangan pernah mundur karena hambatan atau beratnya proses. Fokus dan terus maju dalam mewujudkan cita. Yakinlah, waktu yang diberikan

Allah kepada kita adalah untuk melakukan amal terbaik. Untuk menghadirkan umat terbaik. Jika setiap kita mencoba menghadirkan kontribusi untuk kekuatan ekonomi umat Insya Allah kita dapat mewujudkan sabda Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam, *"Tangan diatas lebih baik daripada tangan yang dibawah"*.

Ketiga, buatlah usaha/proyek yang diperlukan masyarakat. *Product Oriented* mesti diubah ke *market oriented.* Dengan kejelian, jika perlu lakukan analisa pasar, kita dapat menetapkan jenis usaha/jasa yang diperlukan masyarakat. Selanjutnya adalah menetapkan standar kualitas. Pasar Haji Jaya bukan cuma sekedar tempat transaksi tapi ada taman kecil, mushola, BPR, warung nasi, pengelolaan sampah hingga harga sewa harian yang terjangkau. Tak heran, hingga saat ini *waiting list* dari masyarakat yang ingin menjadi penyewa toko/kios atau lapak mencapai 60-an orang.

Haji Jaya sudah memberi contoh bagi kita—para kader dakwah—bahwa wejangan KH Ahmad Dahlan , *"Hidup-hidupkanlah Muhammadiyah. Jangan Hidup dari Muhammadiyah."* Dapat diwujudkan. Sebagai kader partai dakwah, kita mesti memiliki semangat untuk dapat menghidupkan partai dakwah ini jangan malah hidup dari partai dakwah. Pribadi kita mestilah menjadi cermin dari kerja keras, hemat, bersahaja, gemar berinfaq. Yang utamanya didasari pada kemampuan *kasbul ma'isyah* (produktivitas dalam mendapatkan penghasilan yang halal dan cukup bahkan mampu berinfaq.

Jika dulu sahabat Abdurahman bin Auf dapat menjadi *ahlul jannah* melalui 'kekayaan dan kedermawanannya' kita yang hidup di zaman modern pun dapat mengikuti jalur yang ia lalui

menuju syurga, melalui pembangunan ekonomi umat. Haji Jaya dengan segala keterbatasan dan kekurangannya sudah mampu menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar. Pertanyaannya, apa yang sudah kita berikan pada umat ini? Semoga Allah *Ta'ala* memberi kita kemudahan dalam mencari dan mewujudkan kontribusi bagi umat. *Wallahu a'lam.*

Tiga Pelajaran dari Pemilu 2014

Alhamdulillah, setelah melalui hari-hari yang intens dengan pertemuan, sosialisasi, interaksi dengan masyarakat dan juga adu strategi dengan partai lain, Pemilu 9 April 2014 usai sudah. Perolehan suara partai-partai Islam, mengikut quick count (QC) secara umum naik mendekati 32%. PKB, PAN, PPP secara umum naik. Sedang PBB, yang bersama PKPI terlambat ditetapkan sebagai peserta pemilih, dari hasil QC nampaknya berada di bawah electoral thershold (ET). PKS sendiri, yang di hampir semua survey dan banyak pengamat meramalkan akan tamat (tidak lolos ET), dengan izin Allah dan melalui wasilah kerja keras para kader, struktur dan caleg—di bawah gempuran negatif media—masih mampu di angka, berdasar QC, 7 %-an.

Angka kurang lebih 7% ini dibawah target 12%. Posisi 3 besar belum tercapai. Tentu ini menjadi bahan evaluasi. Namun dengan serangan massif pemberitaan negatif dan minimnya iklan di TV, perolehan suara 7% ini, mencengangkan banyak pengamat. Sekali lagi—buah tarbiyah ini menunjukkan bahwa ketangguhan dan kekuatannya bersumber bukan pada kekuatan

Rumusnya jelas: kian kuat tarbiyah kita, kian kokoh kepribadian kita, kian produktif kita, kian kuat citra kita di masyarakat dan kian mudah kita memesona publik dan kian dekat kemenangan politik kita.

materi dunia yang fana, tapi berasal dari kekuatan iman, kekuatan langit dan kekuatan keyakinan. Karena itu, marilah kita coba ambil pelajaran berharga dari event 5 tahunan yang juga menjadi indikator kekuatan dan pengaruh tarbiyah kita.

Pelajaran pertama, kita adalah jamaah manusia. 'Manusia adalah tempat salah dan lupa.' Terlepas dari kontroversi dan pro kontra persidangan kasus Impor Daging Sapi, pelajaran terpenting adalah bahwa Partai Dakwah ini diminta masyarakat memiliki standar tinggi yang berbeda dengan parpol lainnya. Kesalahan kecil, perkenalan dengan Ahmad Fatonah dkk, dapat menyeret kita pada rusaknya citra bersih yang sudah kita bangun sejak *mihwar tanzhimi*.

Kebersihan aqidah, kebersihan akhlaq, kebersihan sikap, kebersihan dalam berteman adalah buah dari tarbiyah. Tarbiyah mengajarkan kita bahwa pilihan teman, pilihan cita rasa hingga pilihan beramal sangat ditentukan dengan jawaban dari pertanyaan: Adakah ini diridhoi atau diizinkan Allah Ta'ala? Adakah pilihan ini membuat kita kian dekat dengan ridhoNya atau mendekat pada murka Nya?

Kekuatan 'bersih' kita sangat erat kaitannya dengan *quwwatut tarbiyah* kita. Karena itu, usaha memilihara kekuatan tarbiyah kita melalui halaqah, *wajibatul yaumiyah* (kewajiban harian), hingga keseriusan kita dalam mentaati perintah dakwah dan jama'ah adalah bagian dari komitmen tarbawi kita. Rumusnya

jelas: kian kuat tarbiyah kita, kian kokoh kepribadian kita, kian produktif kita, kian kuat citra kita di masyarakat dan kian mudah kita mempesona publik dan kian dekat kemenangan politik kita.

... kita rindu situasi jaman Masyumi dulu. Dimana party ID, ikatan kepartaian seperti ikatan ideologi. Anggota tiap partai malah berlomba-lomba untuk menginfaqkan harta dan tenaganya bagi kebesaran partainya.

Pelajaran kedua: kekuatan efek TOKOH. Benar Jokowi Effect tidak besar pengaruhnya pada PDIP. Tetapi Rhoma Effect dan Prabowo Effect tetap berpengaruh pada PKB dan Gerindra. Dengan tingkat rata-rata pendidikan kita baru 7.5 tahun memang mengajak masyarakat untuk ikut memilih berdasar visi, misi dan platform partai, hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Justru, logika masyarakat sederhana: seperti apa perilaku dan sikap TOKOH, seperti itu pulalah gambaran partainya. Dan membangun TOKOH jika kita lihat, paling efektif melalui lembaga eksekutif. Pilihan menjadi Bupati, Walikota atau Gubernur adalah *the right track*. Sebaliknya langkah menjadi anggota legislatif sulit mendapat apresiasi publik yang besar. Kisah Jokowi, Trismaharini, Ridwan Kamil, Aher, Gatot atau Irwan Prayitno adalah contoh sederhananya. Karena itu, partai memang mesti menjadi kawah candradimuka untuk melatih dan menempa kader partai menjadi pribadi yang siap memberikan kontribusi kepemimpinannya bagi masyarakat.

Ketiga, pelajaran mahalnya adalah negeri ini adalah negeri religius. Negeri Islam. Walaupun kampanye 'menghapus' partai Islam dengan segala surveynya, kecuali Polcomm-nya Heri Budianto yang jernih melihat bahwa peluang parpol Islam

PKS harus menjadi contoh perwujudan partai ideologis. Bahwa mulai pimpinan hingga kadernya menjadikan medan politik sebagai wahana perjuangan.

tetap terbuka di 2014, semua lembaga survey seolah menggiring masyarakat untuk tidak memberi peluang kepada parpol Islam. Alhamdulillah umat tetap yakin bahwa parpol Islam tetap dipercaya. Angka 32% bukanlah angka yang buruk. Sedikit lebih baik dari 2009 malah. Tapi kita rindu situasi jaman Masyumi dulu. Dimana party ID, ikatan kepartaian seperti ikatan ideologi. Anggota tiap partai malah berlomba-lomba untuk menginfaqkan harta dan tenaganya bagi kebesaran partainya. Berpartai adalah wujud perjuangan ideologinya. Dan karena itu, mereka yang menjadi anggota parlemen atau anggota kabinet bukan menjadikannya lahan untuk memperkaya pribadi, memperbanyak harta; tapi menjadikannya medan suci memperjuangkan ideologi, sistem ekonomi, sistem akhlaq hingga sistem pendidikan yang mengajak manusia untuk lebih taat kepada Al Khaliq. Dulu, masyarakat adalah organik yang hidup dalam semangat ideologi yang membara, hidup adalah perjuangan. Hidup adalah perwujudan keyakinan dan misi.

Kini, bangsa ini mengidap penyakit baik di level pimpinan partai ataupun di level masyarakat yang sangat doyan dengan money politic. Uang haram menjadi penentu pilihan. Bagaimana mungkin mengharap hasil yang baik jika proses awalnya dipenuhi dengan kecurangan dan kebusukan. Tapi cara mengubah yang terbaik, seperti kata Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam, adalah *Ibda Binafsika*. PKS harus menjadi contoh perwujudan partai ideologis. Bahwa mulai pimpinan hingga kadernya menjadikan medan politik sebagai wahana perjuangan.

Sejak 1999, sebenarnya kita sudah melakukannya. Tapi memang, *fadzakkir fa inna dzikro tanfaul mu'minin*. Berilah peringatan karena peringatan itu membawa manfaat bagi orang beriman. Hasil pemilu 2014, mesti dijadikan pelajaran bahwa boleh jadi kita mulai menjauh dari cita-cita menjadikan partai ini sebagai wahana perjuangan. *Wallahu a'lam bishawab.*

Menuju Capres Umat

Pemilu legislatif (Pileg) usai, kita akan masuk ke kompetisi berikutnya: Pemilu Presiden (Pilpres). Alhamdulillah Pileg 2014 memberi kabar gembira dengan perolehan Parpol Islam atau berbasis massa Islam (PPP, PBB, PKS, PKB dan PAN) mencapai 32%. Kita bersedih karena PBB nampaknya tidak lolos electoral thershold (ET) yang 3.5%.

Syaratnya:
semua berpikir besar untuk kepentingan umat.

Walau —saat tulisan ini dibuat— pleno KPU sedang berlangsung, nampaknya perolehan partai-partai tidak akan jauh dari hasil quick count yang dilakukan beberapa lembaga survei. Dimana tidak ada partai dominan dengan perolehan di atas 20%. Plus dengan 10 parpol yang masuk Senayan, hampir tidak terjadi keuntungan *electoral vote* dibanding *popular vote*. Di 2009, perolehan 21% *popular vote* suara demokrat ketika dikonversi menjadi kursi mendapat 26.4% *electoral vote*, setara dengan 148 kursi. Di 2009, partai menengah ke atas mendapat keuntungan *electoral vote*. PKS di 2009 dengan 7.8% *popular vote* mendapat 10,2% *electoral vote* setara dengan 57 kursi.

Sekarang dengan 10 parpol perbedaan *popular vote* dan *electoral vote* di kisaran kurang lebih 1%.

Jadi, dengan perolehan pileg seperti itu, bagaimana dengan kans Capres Ummat? Sangat mungkin. Gabungan PKB, PAN, PKS, PPP dan PBB sudah lebih dari 30%. Jika Demokrat atau Golkar bisa diajak, angkanya bisa di atas 40%. Insya Allah cukup untuk pemerintahan efektif.

Dengan komposisi ini, tiket maju Capres dan Cawapres sudah di tangan. Syaratnya: semua berpikir besar untuk kepentingan umat. Apa sih kepentingan umat itu? Wujudnya adalah negeri yang *baldatun thoyibatun warobbun ghafur*. Negeri sejahtera yang diridhoi Allah *Ta'ala*. Ini terjabarkan baik dalam sistem pendidikan, pesantren yang mendapat tempat terhormat, para ulama dan ustadz yang diberi fasilitas, serta akhlaqul karimah yang jadi pedoman. Termasuk tentu sistem politik, ekonomi dan sosial budaya yang mengajak masyarakat untuk kian religius, jauh dari korupsi, tidak hedonis dan tidak konsumtif tapi justru produktif dan kontributif.

Lalu siapa capres dan cawapresnya? Yang pasti, ada indikasi daya tarik tokoh lebih tinggi dari daya tarik partai. Karena itu, penetapan figur harus hati-hati dengan pertimbangan favorabilitas (kesukaan) calon.

Kita punya banyak calon. Jika media mem-*framing* kita dengan 4L: Lu Lagi Lu Lagi. Seolah-olah cuma ada tiga: Jokowi, Prabowo dan Aburizal Bakri. Kita punya yang jauh lebih baik ditimbang dari manapun.

Untuk capres syaratnya *leader is doing the right things*. Pemimpin itu melakukan sesuatu yang benar. Yang diperlukan mereka yang

punya karakter, punya sikap dan track record. Menurut saya, tokoh seperti Mahfud MD, Dahlan Iskan, Hidayat Nurwahid, Jusuf Kalla, Gita Wiryawan, hingga Anis Matta bisa jadi bahan untuk dipertimbangkan.

Jangan mulai dengan nama. Siapa Capres, siapa Cawapres. Tapi mulailah dengan meletakkan kepentingan bagaimana menjaga umat.

Untuk cawapres adalah mereka yang *do the thing right*. Mereka yang mampu melakukan sesuatu dengan benar. Mereka yang punya kemampuan teknokratis dan berpengalaman di birokrasi. Lagi-lagi menurut saya kita punya banyak stok, mulai dari Dahlan Iskan, Jusuf Kalla, Hatta Rajasa hingga Aher.

Gabungan dua figur ini, yang manapun, insya Allah bisa mengefektifkan pemerintahan.

Bagaimana dengan Bang Rhoma, Muhaimin Iskandar, Surya Dharma Ali, Yusril Ihza Mahendra, atau tokoh-tokoh lain? Semua hendaknya dengan besar hati menjadi pendukung utama koalisi ini.

Lapis kedua, para generasi muda pimpinan parpol Islam bisa dijadikan tulang punggung bagi perwujudan tim kampanye ataupun kabinet yang efektif nantinya. Ada Romi di PPP; ada Sohibul Iman, Muzammil Yusuf, dan Fahri Hamzah di PKS; ada Mas Tjatur di PAN; ada Abdul Malik Haramain di PKB; ada Mas Khattat di PBB semua jadi tim lapis dua yang bergerak di lapangan mencari simpati dan dukungan.

Kita tambah juga dengan kawan-kawan NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, FPI, HTI, Salafi, Tablighi termasuk Majelis Rasulullah,

MTA hingga tokoh-tokoh muslim baik lokal dan regional menjadi tiang-tiang utamanya.

Mungkinkah kita menang? Kita tidak punya media dan tidak punya modal. Saya yakin bisa! Kita satukan kekuatan umat. Kita punya ulama, punya asatidz, punya masjid, punya semangat infaq dan jihad.

Bagaimana denga capres lainnya? Adakah Jokowi, Prabowo dan Aburizal Bakri tidak bisa diajak? Sangat bisa. Tapi, fatsun paling baik kita bincang dengan kawan terdekat dahulu. Ini ke depan bisa jadi awal rekonsialisasi umat yang mahal harganya.

Plus dalam demokrasi adalah hal yang sah untuk berkompetisi. Kita apresiasi semua capres dan cawapres yang ada. Kita berkompetisi dengan niat semua sama: memberi kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

Beauty kontes ini membuat bangsa ini besar. Mari kita saling menghargai atas semua inisiatif dan kontribusi yang akan diberikan oleh siapa pun di antara kita.

Satu lagi yang utama, agar mimpi besar ini dapat terwujud, semua pemimpin umat harus berpikir dan berjiwa besar. Jangan mulai dengan nama. Siapa Capres, siapa Cawapres. Tapi mulailah dengan meletakkan kepentingan bagaimana menjaga umat mulai dari pendidikan berkarakter-nya, ekonomi kecil dan prinsip bebas riba-nya, budaya Islami yang membangkitkan ghirah-nya hingga kebesaran olahraga hasil dari kerja keras para atletnya. *Man jadda wajada*. Siapa *ngotot*, pasti dapat. Ayo semua *ngotot*. *Ngotot* dalam usaha, *ngotot* dalam hujjah dan *ngotot* dalam doa. Tentu *ngotot* disini dalam konotasi *jiddiyah* (sungguh-sungguh).

Wallahu a'lam bishawab.

Kekuatan Jangka Panjang

Pada bulan Mei yang lalu, Ustadz Anis Matta dalam pengantar *Election Update* kelima melontarkan gagasan tentang *long term power* (kekuatan jangka panjang). Jika merujuk pengalaman 15 tahun interaksi dakwah di nusantara, upaya untuk menjadikan nilai-nilai Islam sebagai arus besar legislasi nasional atau sistem nasional selalu terkendala dengan perolehan suara partai yang masih masuk kategori kelas menengah. Jika melihat pemenangan pemilu pun, empat kali pemilu sejak 1999, selalu dimenangkan oleh partai yang berbeda. Belum ada satu partai pun yang dapat mempertahankan kemenangannya pada pemilu berikutnya.

Potret ini bukan hanya terjadi di Nusantara. Gerakan Islam di Kuwait, Aljazair hingga Tunis dan Mesir selalu saja menghadapi tantangan tingkat *volatilitas* (ketidakstabilan perolehan suara) pada setiap pemilu. Ini mengakibatkan agenda yang bisa dijalankan selalu

> Perlu ***long term power*** untuk menghadirkan sumber daya yang stabil, kokoh, dan berkelanjutan bagi proyek peradaban Islam di Nusantara atau dunia.

agenda temporer. Sulit membuat perencanaan proses *tadayyun sya'bi* (upaya menjadikan masyarakat lebih religius) termasuk usaha penguatan aqidah dan militansi umat, pengokohan ekonomi umat hingga kerja-kerja mengangkat kualitas lembaga pendidikan umat dapat berjalan dengan sistematis. Dalam konteks inilah, Ustadz Anis Matta mengusulkan adanya terobosan melalui *long term power*. Sebuah usaha menghadirkan sumber daya yang stabil, kokoh dan berkelanjutan bagi proyek peradaban Islam di Nusantara atau dunia. Bagaimana detailnya?

Selalu ada *mutaghoyyirot* (hal-hal yang dapat berubah) dan *tsabat* (hal-hal yang pasti) dalam semua sektor kehidupan. Jika kita dapat mengurai kepada elemen kekuatan umat, termasuk ke dalamnya medan politik, maka didapat parameter *ats-tsabat* (pasti dan kokoh) adalah korelasi antara tarbiyah, kader militan dan perolehan dukungan (baik politik, ekonomi, sosial dan budaya) masyarakat. Artinya tanpa harus terpengaruh pada parameter pemilu, hadirnya kader yang militan, yang memiliki *muwashofat* (karakteristik) unggulan dan terus berproses dalam lingkungan tarbiyah yang sehat menjadi determinan faktor (faktor penentu) yang tidak akan berubah walau lingkungan politik dan sosial berubah. Sederhananya, jika kita ingin memastikan adanya kelanggengan dukungan sosial dan politik bagi proses membumikan peradaban Islam di nusantara maka syarat utamanya kita memiliki kekuatan jangka panjang —*long term power* dalam istilah Ustadz Anis— yang kokoh. Dan itu adalah kader militan yang memiliki jumlah yang cukup untuk membuat pengaruh nilai-nilai Islam baik di medan social, apatah lagi politik. Jika kita dapat menemukan kadar pengaruh untuk setiap kader, katakan dengan kualitas tarbiyah yang *ihsan* dan *itqon*, satu kader mampu menjaga, mempengaruhi

dan menumbuh kembangkan masyarakat sebanyak 5 orang (Qur'an surat Al anfal ayat 65 menyebut angka batas atas 10 dan batas bawah 2), maka untuk menjamin perolehan suara 20% dalam pemilu setidaknya kita mesti memiliki kader terbina militan sebanyak 5 juta. Dengan angka stabil di 25 juta suara maka menjadi lebih mudah bagi kita untuk dapat secara berkesinambungan menjalankan program *tadayyun sya'bi*.

Angka kader terbina 5 juta tentu bukan perkara yang mudah. Walau juga bukan sesuatu yang mustahil. Banyak di antara kader dakwah sudah mampu mengelola amanah di level Kota Kabupaten, Provinsi hingga kementerian. Kemampuan menjalankan program masif dan dalam rentang lima tahun masa kerja dapat dijadikan modal. Karena setidaknya ada tiga syarat utama agar usaha mewujudkan *long term power* ini dapat sukses dijalankan. *Pertama,* tersedianya sumber energi iman yang melimpah dari barisan *qiyadah* (pimpinan) baik pimpinan *tarbawi* atau *siyasi*. Sulit menghimpun sedemikian banyak hati manusia untuk tunduk dan bersimpuh dalam *shaf* kebaikan ini jika tidak ditemukan pesona imani, pesona ukhrawi dari para *qiyadah, murabbi* atau *naqib,* yang tercermin dalam komitmen ibadah, akhlaq hingga keteladanan. *Qiyadah mukhlishoh* (qiyadah yang ikhlas) akan melahirkan *jundi muthi'ah* (prajurit yang taat). Termasuk yang utama adalah pesona akhlaq: mulai dari ketawadhu'an, keteguhan berprinsip (tidak silau dengan dunia dan menghalalkan segala cara), bersahaja, hingga ikatan ukhuwah dan *qudwah*. Dalam dunia yang sudah terkoneksi dengan jejaring sosial dan media, berita satu orang *qiyadah* mencederai prinsip dan nilai-nilai berharakah boleh jadi membuat para *muhibbin* (orang-orang mencintai kita) menjadi menjauh dan keluar dari barisan.

Syarat *kedua*, sistem kontrol yang ketat dan ihsan. Target 5 juta kader terbina dengan kualifikasi yang standar memerlukan proses tarbiyah yang berkualitas, sehat dan hidup. Karena itu, penerapan *quality control management*, rantai komando yang kokoh hingga ketersediaan kurikulum dan kegiatan yang berkualitas menjadi keharusan. Karena itu, keberadaan institusi yang berdaya eksekusi menjadi syarat mutlak. Termasuk penempatan personel pada insititusi yang bertanggung jawab pada pelaksanaan sistem tarbiyah yang berkualitas dan berskala massif ini. Rekrut orang-orang dengan standar terbaik sesuai bidang keahliannya. Termasuk men-*tafarrugh*-kan ikhwan dan akhwat utamanya untuk fokus menjadi *murobbi* atau pengelola aktivitas tarbiyah di daerah masing-masing. Bisa dengan dukungan pendanaan yang memadai tapi lebih baik lagi jika kader yang diamanahi tugas tersebut sudah memiliki kebebasan finansial karena mereka memang sudah 'tangan diatas'.

Dan syarat *ketiga*—yang terakhir, *learning by doing*. Langsung integrasikan kegiatan tarbiyah dengan realita di lapangan. Ketika kemiskinan yang ada di hadapan, maka tugas satuan khusus tarbiyah ini mencoba mulai dari yang kecil menyelesaikan problem kemiskinan ini. Jika yang dihadapi adalah kerusakan moral, maka satuan khusus tarbiyah ini melalui lembaga sosialnya dapat memberi kontribusi misalnya dalam *parenting training*, *training* motivasi bagi pemuda, dst. Intinya regu-regu tarbiyah ini menjadi satuan unit *amal khairiyah* yang melayani dan memberi solusi di masyarakat termasuk berintegrasi dengan struktur di masyarakat seperti menjadi pengurus RT, RW, DKM hingga urusan melayani orang mati.

Jika ketiga syarat ini bisa dilakukan dengan kontinyu selama

waktu tertentu, katakan lima tahun, dan bersifat massal, insya Allah pada pemilu 2019 nanti kita akan sedikit memetik hasilnya. Saya katakan sedikit karena memang pohon yang ditanam bukan tanaman jangka pendek tapi tanaman yang menjadi cikal bakal *long term power*. Wallahu a'lam bishawab....

Pilpres 2014

Ada yang istimewa di Ramadhan 1435 H ini, umat Islam dapat kado Presiden baru. Setelah 10 tahun di bawah kepemimpinan Pak SBY, Indonesia akan mendapat pemimpin baru. Kredo, *"Everything rise and fall on leadership."* (Segalanya jatuh dan bangkit karena kepemimpinan) akan membawa Indonesia menuju era baru yang insya Allah lebih maju dan sejahtera, dan pastinya harus kita kawal agar lebih religius.

Tulisan ini dibuat sepekan sebelum 9 Juli 2014, jadi belum diketahui siapa pemenang Pilpres kali ini. Pertarungan dua kandidat diprediksi ketat, harapannya siapapun pemenangnya marginnya diatas 5% untuk menghindari proses berkepanjangan yang bisa jadi memakan energi lebih, khususnya bagi masyakat awam. Plus yang juga harus dipastikan adalah tidak adanya intervensi dari pihak asing.

Seperti di beberapa tulisan sebelum ini saya berpandangan, pasangan presiden dan wakil presiden ke depan punya tugas yang luar biasa berat. Mulai dari tingkat religiusitas umat yang masih rendah—ditandai dengan belum meratanya program

memakmurkan masjid, indeks bank syariah yang masih rendah ketimbang bank umum, kondisi pendidikan umat yang masih terpuruk hingga kondisi perekonomian nasional yang menghadapi *middle income trap* (jebakan kelas menengah), infrastruktur yang rendah hingga kualitas SDM yang membuat produktivitas bangsa yang rendah. Semua ditambah, kondisi pilpres yang hanya diikuti dua pasangan ini membuat murah secara ekonomis tapi mahal secara politis dan sosial. Keterbelahan bangsa sangat terasa. Ditambah pemihakan media pada masing-masing pasangan membuat suhu politik pada pekan-pekan terakhir menjelang pilpres amat *overheated*. Semua menjadi tanggung jawab bagi siapapun pasangan yang terpilih. Kita doakan, Allah SWT memberi kekuatan pada siapapun pasangan yang terpilih.

Pada tulisan kali ini, saya tidak akan mengarahkan pembaca untuk memilih salah satunya. Insya Allah semua sudah memiliki pilihan sesuai dengan keyakinan dan harapannya. Tapi saya akan fokus pada pelajaran apa yang harus diambil umat terkait dengan perjalanan panjang mewujudkan *'khairu ummah'*. Karena memang tidak ada yang instan. Kekuatan tidak dibangun dalam sehari. Siapa menyiapkan payung saat hujan tidak akan mendapat hasil optimal. Dalam perspektif keummatan, menurut saya ada beberapa pelajaran yang bisa ditarik:

> Presiden baru harus membawa Indonesia agar lebih maju, sejahtera, dan lebih religius

Pertama, ide koalisi keummatan gagal terwujud sebab utamanya adalah 'musim kemarau tokoh Islam'. Baik Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo, sejatinya tidak lahir dari rahim umat. Mereka insya

Allah bisa dikondisikan untuk memperjuangkan kepentingan umat, tapi mereka —sekali lagi— tidak lahir dari rahim umat. Apa maksud tidak lahir dari rahim umat? Mereka berdua tidak berasal dari partai Islam, dari organisasi Islam, dari pergerakan Islam ataupun dari pihak yang selama ini akrab memperjuangkan kepentingan umat. Apa artinya? Kita perlu benar-benar mengambil pelajaran bahwa menyiapkan tokoh menjadi salah satu agenda kerja pergerakan Islam. Dan ini adalah proses yang rumit dan perlu ketekunan. Kisah Pak Jokowi sudah sering saya kutip betapa beliau mulai dari kota kecil di Solo dengan segala rekam jejaknya —terlepas dari faktor pencitraan— hingga pak Prabowo yang berkali-kali gagal dalam jalan menuju panggung pilpres sebelumnya tapi tidak pernah menyerah dan terus maju.

Pergerakan Islam mesti benar-benar serius mengedepankan *merit system* yang sesuai dengan hadits baginda Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam bahwa memberikan amanah pada orang yang memiliki kapasitas dibawah orang yang seharusnya adalah tindakan khianat dan jauh dari ciri iman. Prinsip *qiyadah mukhlishoh* (pemimpin yang ikhlas) yang tidak memiliki *vested interest* baik keluarga, suku, kedekatan dan faktor lain semata bahwa carilah yang terbaik. Karena mencari yang terbaik memang bukan pekerjaan mudah. Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam pun mengingatkan bahwa hampir-hampir dari 100 ekor unta aku tidak mendapatkan satu pun unta *rahilah* (pekerja yang tangguh). Bukan cuma itu, keberanian mengedepankan kader terbaik dengan dukungan sumber daya yang ada harus dimulai tanpa ditunda. John Maxwell mengatakan, *"Investasi terbaik sebuah organisasi adalah staf development"*. Sesuai dengan bahasan dahulu *pathway* (jalur) terbaiknya adalah posisi eksekutif di level terendah mulai dari kepala desa, bupati,

walikota, gubernur hingga presiden.

Setelah selesai urusan memberesi program penokohan melalui pembenahan *institutional development* termasuk *merit system*, program *kedua* adalah mendorong semua kader, simpatisan hingga pengurus untuk mengembangkan kapasitasnya. Khususnya yang berkaitan dengan kemampuan memberi kontribusi pada publik melalui semua jalur profesi, hobi atau filantropi. Mesti dipastikan tiap kita memiliki jalur pengembangan kontribusi publik yang tinggi. Contoh, kemampuan tim socmed dari kedua pasangan capres dan cawapres sangat menentukan tone/impresi dukungan dari masyarakat kelas menengah khususnya. Pun kepiawan membuat jingle baik rekap ulang lagu 'We Will Rock You' hingga 'Salam Dua Jari Jangan lupa pilih Jokowi' adalah hasil ketekunan pada bidang masing-masing. Prinsip yang jelas *'Faqidus syai laa yu' thi'* Siapa yang tidak memiliki sesuatu tidak akan dapat memberi sesuatu. Umat harus berdaya: harus tahu, mau dan mampu —kata Stephen Covey dalam 7 Kebiasaan Manusia Efektif— untuk dapat jadi andalan. Allah Ta' ala sudah mengingatkan kita bahwa *"Allah tidak akan mengubah kondisi satu kaum sebelum kaum tersebut mengubah diri mereka sendiri. (QS 13:11)"* Atau peringatan Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam bahwa *"Mu'min itu yang hari ini lebih baik dari hari kemarin."*

Ketiga, lagi-lagi kepentingan memiliki media. Media sesuai dengan fungsinya adalah pemberi kabar, pembentuk opini hingga *trend setter* gaya hidup. Jika diqiyaskan media memiliki fungsi yang mirip dengan salah satu fungsi kenabian sebagai pembawa kabar (An-Naba). Pekerjaan kecil tapi diolah dan diekspose media dengan masif akan membawa dampak yang

lebih dahsyat dari ketekunan di alam sunyi. Perkara pahala adalah sebuah hal yang sudah dijanjikan. Yang jadi *wilayatul insan* (wilayah kemanusian) kita adalah mengemas amal sholeh menjadi sesuatu yang diperlukan, dinanti-nanti hingga membawa kebaikan berlipat dan dirasakan sangat oleh publik. Dan lagi-lagi jika melihat di balik media besar pasti ada satu dua orang yang menentukan nasib dan masa depan media ini. Ada Dahlan Iskan dibalik Jawa Pos. Ada Jacob Utama dibalik Kompas group dll. Agenda menghasilkan SDM media yang mencukupi baik cetak, online, radio dan TV menjadi mutlak.

Terakhir, terus menguatkan modal sosial umat melalui kontribusi yang terbaik pada semua momen utama pembangunan bangsa. Institusi zakat, sosial, pendidikan, kesehatan hingga ekonomi umat mesti terus mengokohkan diri. Untung tapi juga penuh dengan ruh dakwah. Berkembang sekaligus menyejahterakan dan mencerdaskan umat. Dalam kajian di *What Would Google Do* penulis Jeff Jarvis menceritakan bahwa Google dapat melewati pencapaian GE (Gerenal Electric) yang dibangun dalam 150 tahun hanya dalam enam tahun. Rahasianya DERMAWAN. Kian dermawan sebuah perusahaan kepada publik, kian cepat pertumbuhan perusahaan itu, baik dalam kapitalisasi modal ataupun keuntungan. Lihat google, betapa bermanfaatnya bagi publik di dunia. Mulai dari gmailnya, G-map dan google Earth-nya hingga translater-nya.

Pilpres 2014 menunjukkan masih banyak PR yang harus dikerjakan. Siapapun pasangan Capres dan Cawapres yang terpilih, umat tetap harus memperhatikan agendanya sendiri. Kita yang lebih faham kondisi rumah sendiri. Ayo berbenah! *Wallahu a'lam bishawab.*

Skenario Pasca Pilpres 2014

Alhamdulillah, *bi idznillah*—atas izin Allah dan hasil kerja keras para kader dakwah serta struktur dari level terendah, sumbangsih PKS bagi pencapaian suara pasangan Capres Prabowo Hatta dapat dikatakan optimal. Hasil exit poll Kompas, pemilih PKS yang mendukung Prabowo Hatta mencapaj angka 75% diatas Partai Gerindra yang 74.5 %. Ditambah dengan kemenangan mendekati 60% di Jawa Barat plus lebih dari 78% di Sumatera Barat.

Nampak jelas betapa PKS merupakan anggota Koalisi Merah Putih yang dapat diandalkan. Belum lagi kontribusi para saksi dan kerja cekatan para ikhwan dan akhwat dalam menjaga C1 dan dokumen lainnya yang akan digunakan dalam sidang MK. Apapun keputusan MK, yang bersifat final dan mengikat, dalam perspektif hukum, pertarungan Pilpres akan berakhir pada 22 Agustus 2014. Dalam konteks itu kita perlu segera menyusun skenario pasca pilpres 2014. Khususnya bagaimana agar bangunan dakwah dapat bertambah kokoh pasca Pilpres 2014 tak kira siapa jua pemenangnya.

Sebelum masuk ke Skenario Pasca Pilpres 2014, saya ingin sedikit mengulas beberapa pelajaran dari Pilpres ini. *Pertama,* pilpres dengan dua kandidat ini menampilkan fenomena murah secara ekonomi tapi mahal dari segi ongkos sosial. Keterbelahan di masyarakat sangat kentara. Serangan kedua belah pihak sampai taraf yang cukup membahayakan bagi iklim demokrasi itu sendiri. Jika kita bisa melewati fase ini dengan lapang dada dan sikap kenegarawanan, dapat diharapkan demokrasi kita kian teruji dan dewasa. 'Pertempuran yang tajam' adalah bagian dari kompetisi, namun ketika selesai permainan yang harus kembali hadir adalah sikap saling menghargai dan dewasa menyikapi perbedaan. Siapapun yang akan jadi Presiden, akan menjadi pemimpin kita semua.

Kedua, khusus untuk PKS, dalam amatan saya yang mungkin salah dan tidak utuh, tampilan komunikasi publik kita baik *online* maupun *offline* memiliki catatan yang harus kita perhatikan dengan seksama. Sesuai dengan semangat tempur yang kita miliki, dalam beberapa kasus ternyata kita belum menerapkan prinsip *i'diluu* (adil) dan *fatabayyanuu* (verifikasi) dengan *prudent* (konservatif). Akibatnya banyak info yang langsung kita kirim dan sebar tanpa memvalidasi atau memikirkan apakah ini terkategori fitnah atau fakta. Saya pribadi, sampai harus meminta maaf melalui akun twitter saya @MardaniPKS karena diberi masukkan oleh beberapa *follower* yang menyampaikan fakta sebaliknya. Sebenarnya hal yang wajar dalam sebuah kompetisi kita bersemangat, adrenalin meningkat, apatah lagi pihak sana pun 'menyerang' dengan tajam. Tapi kita ingat pesan Imam Hasan Al Banna bahwa,"*Jadilah engkau seperti pohon mangga yang disambit oleh batu malah memberikan buahnya pada si penyambit.*" Seorang filusuf mengatakan bahwa politik itu

80% kemenangannya ditentukan oleh komunikasi. Dan Alqur' an banyak mengingatkan kita dengan term *qaulan sadida, qaulan tsaqila, qaulan layyina,* dan seterusnya.

Dalam Pilpres 2014 ini, partai dakwah kita perlu mengevaluasi tampilan, sikap dan karakternya

Ketiga, salah satu prinsip dakwah adalah mempersempit ruang permusuhan. Dakwah dikatakan berhasil salah satunya ketika pintu-pintu kebaikan dibuka oleh semua elemen masyarakat. Karena itu tampilan, sikap dan karakter dakwah kita mestilah mampu menimbulkan pesona dan rasa tertarik. Jika kita pelajari kisah para nabi, mereka selalu mendatangkan ketaatan dari para pengikutnya dan kekaguman dari para musuhnya. Dalam banyak kisah bahkan dikatakan lebih banyak orang berislam karena *karimah* ketimbang karena *mu'jizat.* Itulah sebabnya Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam mengingatkan bahwa *'Aku diutus untuk memyempurnakan akhlaq yang mulia'.*

Dalam Pilpres 2014 ini, partai dakwah kita perlu mengevaluasi tampilan, sikap dan karakternya. Percakapan di media sosial menunjukkam bahwa brand PKS sudah jauh menurun nilainya dibanding tahun 2004 yang sangat dikenal dengan slogan 'Bersih dan Peduli'-nya. Tentu ini bukan tanggung jawab orang per orang, walaupun jika bisa ditunjuk, salah satunya adalah saya sendiri yang diberi amanah sebagai Ketua DPP PKS Bidang Koordinasi Kehumasan. Walau pernah dalam suatu kesempatan ditegaskan bukan sebagai Juru Bicara PKS oleh pimpinan partai yang lain.

Lalu bagaimana skenario kita pasca Pilpres? Dalam perspektif saya setidaknya ada empat hal yang perlu kita seriusi dan fokus di dalamnya. *Pertama, quwwatut tarbiyah.* Kekuatan tarbiyah selalu menjadi asas/dasar bagi kita untuk merancang masa depan. Karena

tarbiyahlah yang mampu membangun *quwwatus sholbah* (kekuatan basis) yang tidak lekang oleh panas, tidak luntur oleh dunia dan tidak larut oleh gaya hidup manapun. Tarbiyahlah yang membuat amal kita di sektor manapun memiliki nilai *ruhi* dan *ukhrowi*. Tarbiyah, seperti diingatkan Syaikhut Tarbiyah Alm. Ust. Rahmat Abdullah memang bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya tidak akan 'menjadi' tanpa tarbiyah. Karena itu, fokus merapihkan tarbiyah kita mulai dari *upgrade* kualitas dan kuantitas *murobbi* dan *murabbiyah*, hingga *naqib* dan *naqibah*, termasuk revitalisasi kurikulum yang mampu menghidupkan dan merangkumi fenomena banyaknya kader yang masuk ke ruang publik dan amanah publik, harus jadi prioritas utama. Biasanya *structure and budget follow function*, artinya harus diletakkan orang terbaik dengan bujet terbaik untuk memperkuat bidang tarbiyah ini.

Kedua, memperkokoh *robtul aam*, ikatan umum kita. Ikhwan dan akhwat harus segera keluar kandang dan mendatangi masyarakat. Pepatah ikhwan dan akhwat itu seperti singa, namun aumannya belum menggetarkan karena sang singa masih terkunci di dalam kandang. Berinteraksi lah. Jika perlu maju ke depan dengan memikul amanah sebagai ketua RT, RW, DKM, Dewan Kelurahan dan ruang-ruang kontributif yang bersifat sosial kemasyarakatan. Rumusnya sederhana, "*Sayyidu qaum khadimuhum...*", pemimpin satu kaum adalah pelayan kaum tersebut. Barisan kader yang tertarbiyah, terdidik, cerdas dan muda niscaya akan menjadi *ruhul jadid*, ruh baru dalam jasad bangsa ini. Sebagian ikhwah di Jawa Tengah bahkan sudah banyak yang menjadi Kepala Desa. Apalagi dengan UU Desa yang baru, dimana desa ditempatkan di garda depan pembangunan nasional termasuk bujetnya. Insya Allah penguatan *robtul aam* kita akan melahirkan iklim dakwah yang kondusif dan aksesibilitas yang luas bagi dakwah untuk berkembang.

Ketiga, mengembangkan kekuatan sosial dakwah. Jika *robtul aam* adalah proyek individu seperti menguatkan ruhi, fikri dan tarbawi kader, maka pengembangan kekuatan sosial adalah upaya institusionalisasi lembaga-lembaga sosial kita. Semua lembaga sosial kita baik di tingkat lokal maupun nasional —sebagian malah sudah berkiprah secara internasional— perlu ,mendapat dukungan untuk menjadi lembaga yang kredibel, profesional, transparan, akuntabel dan menjadi *trade mark* pelayanan optimal. Dalam negara yang *rasio gini*-nya[1] terus meningkat mendekati 0.42, Indonesia sangat memerlukan gerakan sosial yang membantu negara dalam mengangkat harkat dan martabat para *fuqara wal masakin* termasuk *mustadh'afin.* Kader dan lembaga sosial kita memiliki semua pra syarat untuk menjadi pionir dalam pelayanan yang amanah dan berkualitas. Karena itu kerja-kerja untuk mengokohkan, meningkatkan dan 'meledakkan potensi' lembaga sosial kita menjadi prioritas utama yang ketiga.

Terakhir, yang keempat, mengokohkan kekuatan ekonomi kader. Data lima tahun lalu, menurut saya masih valid hingga saat ini, 67% persen kader kita masih hidup sebagai mustahik zakat. Upaya mengangkat perekonomian kader melalui pembentukan Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan Kader perlu dilanjutkan. Berbagai stimulus permodalan hingga jaringan pemasaran perlu difasilitasi oleh struktur. Peran negara dalam skala kecil dapat diambil alih oleh struktur tingkat DPD, DPW dan DPP yang memiliki akses dan pengetahuan yang luas. Jika diperlukan bisa dibuat sentra-sentra ekonomi atau pertumbuhan ekonomi baru. Seiring dengan kian sadarnya publik dan pemerintah akan pentingnya wirausaha, ke depan

---

1 *Rasio Gini:* angka yang menghitung kesenjangan kaya dan miskin, dimana angka mendekati 1 berarti tingkat kesenjangannya tinggi.

akan banyak stimulus, dukungan dan dorongan dari negara untuk para pelaku usaha kecil. Dengan *blue print* yang tajam dan kongkrit kita bisa membuat perencanaan 10 hingga 20 tahun ke depan bagi terwujudnya prinsip *"sunduquna juyubuna"*, kantong kami adalah sumber dana kami.

Semoga Allah SWT memberi kekuatan, mata hati dan ketajaman pikiran bagi qiyadah kita untuk mampu membawa lokomotif dan gerbong kebaikan ini menuju terwujudnya kontribusi terbaik dakwah bagi hadirnya negeri sejahtera yang diridhoi Allah SWT.

Menyikapi Kemenangan Jokowi

Setelah Mahkamah Konstitusi mengetok palu yang menolak permohonan pasangan Prabowo - Hatta pada 22 Agustus lalu, pasangan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla secara *de yure* akan menjadi Presiden selama lima tahun ke depan. Ada banyak pertanyaan dari kader dan publik, bagaimana sikap kita selanjutnya. Apakah terus tempur atau ada kebijakan lain? Tulisan ini pandangan pribadi penulis dalam rangka urun rembuk tentang apa sikap dan langkah ke depan setelah kemenangan Pak Jokowi JK di pilpres 2014.

Pertama, dalam kondisi apapun *akhlaqul karimah* mesti menjadi landasan. "*Wa innaka la'ala khuluqin adzhim,* dan engkau (Muhammad) benar-benar memiliki akhlaq yang agung." (QS 68:4).

Salah satu turunan *akhlaqul karimah* adalah bersikap *gentleman.* Atau tepatnya dalam bahasa kita, 'bersikap adil'. Qur'an memerintahkan *i'diluu huwa aqroba littaqwa*, 'berlaku adillah karena itu lebih dekat kepada taqwa' (QS 4:8). Mengakui bahwa kita kalah strategi dalam merangkul sebanyak mungkin pemilih

akan membuat kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan strategi kita. Sikap *gentleman*/adil akan membuat kita tidak segan memuji lawan dan tidak malu mengakui kekurangan diri. Tentu tanpa sikap merendahkan apalagi menjilat. Tradisi memberikan pidato kemenangan dan pidato mengucapkan selamat dari pihak yang kalah dapat dicontoh untuk menunjukkan bahwa dalam kompetisi selalu ada saatnya bertarung dan berkompetisi tapi ada saatnya mengucapkan selamat kepada pemenang. Dan ucapan selamat ini tidak ada kaitannya dengan sikap PKS yang akan tetap berjuang dalam Koalisi Merah Putih ke depannya.

Kedua, segera memfokuskan diri merapihkan pekerjaan rumah yang cukup lama belum tersentuh karena kesibukan Pileg dan Pilpres. Dalam beberapa kesempatan saya sering menyampaikan, *"Jangan pikirkan Jokowi, biarkan urusan pak Jokowi serahkan ke DPP."* Atau dengan guyon saya katakan, *"Serahkan urusan pak Jokowi ke akh Fahri Hamzah saja."* Ini untuk menunjukkan bahwa pekerjaan ke dalam jauh lebih urgen dan jauh lebih banyak. Selalu terbukti, rapihnya kerja ke dalam menjadi prasyarat menangnya pertarungan di luar.

Pengalaman selama ini, kita belum membagi peran dengan efisien. Saya selalu berpendapat urusan politik bisa ditangani oleh sejumlah kecil ikhwah yang memang punya kemampuan untuk mengendalikannya. Selebihnya seluruh bangunan dakwah ini fokus untuk memperkuat tarbiyah, mengembangkan institusi sosial dan pendidikan kita hingga membangun kekuatan ekonomi kader. Dengan tarbiyah yang kokoh dan berkembang, dengan institusi yang kian mampu melayani publik dengan kekuatan

Nggak usah pikirin Jokowi. Pikirin aja kerja besar kita ke depan

ekonomi kader maka kemenangan politik hanyalah menunggu waktu. Dalam bahasa matematika, politik adalah fungsi tarbiyah, sosial dan ekonomi kader. Kita bisa mulai dengan DPRa fokus ke pembinaan tarbiyah. Perbincangan di DPRa diutamakan bagaimana ruh tarbiyah, ruh pengkaderan dan ruh rekrutmen menjadi pembicaraan utama. DPC bisa difokuskan mengembangkan urusan sosial. Membangun institusi yang akuntabel, professional, dan produktif. Hal itu menjadi indikator keberhasilannya. Sedangkan DPD bisa mengurus upaya membangun jejaring ekonomi kader plus urusan politik lokal. DPW bertugas memastikan para kader di eksekutif dan legislatif mampu menjadi aktor yang ditugaskan untuk mengembangkan kapasitas dakwah. Mereka duduk di lembaga publik dengan indikator terwujudnya *tadayyun sya'bi* (iklim masyarakat yang religius). Termasuk melakukan penilaian indikator ketercapaian target di level DPRa, DPC atau DPD. Organisasi yang matang mengalokasikan hampir 30% sumber dayanya untuk melakukan kontrol dan *feed back system*.

Ketiga, fokus membangun jaringan keummatan. Ada banyak orang dan institusi yang baik diluar kita. Bahasa Imam Syahid, *"Kam minna wa laisa fiina."*, berapa banyak yang merupakan golongan kita tapi tidak berada dalam barisan kita. Saatnya kader dan struktur berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat. Baik hubungan *fardi* ataupun *jama'i*. Kader bisa bergabung dengan komunitas atau bekerjasama dengan komunitas. Struktur baik partai ataupun kelembagaan kader, bisa bersilaturahim dan bekerjasama dalam proyek-proyek keumatan atau kemanusiaan dengan institusi lain. Tidak hanya dengan NU, Muhammadiyah atau Al Irsyad tapi juga dengan KPK, ICW, kalau perlu KWI atau organisasi agama lain. 'Proyek Palestina' kini sudah jadi proyek

kemanusiaan. Dengan membangun relasi ini, diharapkan PKS dan bangunan dakwah ini akan menjadi ikan dalam lautan luas yang nyaman bergerak kemana pun mengarah. Dalam jangka panjang, boleh jadi investasi networking ini akan efektif untuk menangkal musuh-musuh dakwah yang ingin memojokkan dakwah.

Keempat, proyek pemikiran. Dalam beberapa taujihnya Ustadz Anis Matta selalu menekankan pentingnya kita selalu menumbuhkan pengetahuan kita. Dalam qur'an kita diingat,"*Wala takfu ma laisa laka bihi ilm..*, janganlah kalian melakukan sesuatu yang tidak ada pengetahauan padanya." Bahkan dalam taujihnya yang terakhir kita dikehendaki memiliki *aqliyah handasah* akal rekayasa (engineer) dan *aqliyah takhshir* (akal penaklukan). Kader diminta terus memperluas dan memperdalam baik kemampuan berpikir kritis dan akademisnya ataupun penguasaan kepada *ulumus syar'i* minimal *ushul fiqh.* Semua menjadi pra syarat bagi kita untuk mampu menaklukan masa depan.

Stephen Covey mengingatkan, "Persepsi mendahului Aksi." Bahwa pengetahuan kita harus mendahului masalah dan target kita. Proyek pemikiran ini sebaiknya dilakukan dengan serius. Mengadakan diskusi antar kader atau mengundang pihak luar bisa dilakukan dengan biaya murah meriah. Bahkan dengan menggunakan jejaring media sosial kita bisa membuat komunitas yang sama-sama membangun proyek pemikiran ini. Menjamurnya *ikhwah* dan *akhwat* dengan pemikiran yang matang, niscaya akan menjadi bahan bakar yang kian mem-*booster* kerja-kerja dakwah ke depan.

Jadi, usul saya, *nggak usah pikirin* Jokowi. *Pikirin aja* kerja besar kita ke depan. *Wallhu a'lam bishawab.*

KMP: Membangun Koalisi Keumatan

Kiriman 'WhatsApp' itu begitu jelas. "Rentetan kemenangan yang kita dapat itu berkat doa ikhwan dan akhwat di seluruh pelosok negeri. Alhamdulillah" Demikian postingan Bendahara Umum Ust. Mahfuz Abdurrahman menanggapi kemenangan paket Koalisi Merah Putih (KMP) dalam voting pemilihan pimpinan MPR Rabu (8/10) lalu. Keberhasilan menempatkan dua kader kita: Ust. Hidayat Nurwahid dan *akhuna al kariim* Fahri Hamzah insya Allah dapat mempercepat terwujudnya *tadayyun sya'bi* (religiusitas masyarakat) di Nusantara.

KMP, *blessing in disguise*, dapat menjadi kekuatan yang real untuk bersama-sama menghadirkan Indonesia yang adil dan sejahtera. Gabungan Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS dan PPP (walau sempat hengkang saat pemilihan MPR) memang bukan koalisi ideal yang ideologis dan permanen. Tapi KMP bagaimanapun adalah wadah eksperimen baru dalam dakwah parlemen. Sesuai dengan prinsip dakwah yang harus selalu memperluas medan kerjasama dan meminimalkan medan

permusuhan, KMP menjadi model yang perlu dijaga dengan baik. Apatah lagi, *bi barakatillah*, suasana yang terbangun sangat kental dengan suasana keumatan. Saya pernah hadir dalam rapat KMP; baik Sekjen Golkar Idrus Marham hingga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, juga perwakilan Demokrat Ibu Nurhayati, dan perwakilan PAN, termasuk Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon hampir semua akrab dengan terminologi keumatan. Beberapa kutipan ayat dan hadits selain tentu pasal dan ayat dari konstitusi dan undang-undang sering dikutip dalam pertemuan itu. Apatah lagi hadir pula Ust. Hidayat Nurwahid, Ust. Muzammil, Akh Fahri Hamzah, dll yang selalu dijuluki sebagai 'Ustadz-Ustadz PKS'. Suasana yang terbangun pun kondusif. Bukan hanya 'bagi-bagi kursi' tapi yang utama adalah bagaimana desain Indonesia ke depan.

KMP, blessing in disguise, dapat menjadi kekuatan yang real untuk bersama-sama menghadirkan Indonesia yang adil dan sejahtera.

Kini dengan peluang mengambil pimpinan di Alat Keleng-kapan Dewan (AKD) baik di Badan Legislatif, Badan Kerja-sama Antar Parlemen (BKSAP) hingga pimpinan komisi, keberadaan KMP dapat menjadi wadah optimal untuk mengefektifkan agenda menghadirkan perundang-undangan yang mewujudkan Indonesia yang religius, adil dan sejehtara. Dalam beberapa pertemuan ke depan agenda menyiapkan Program Prolegnas (Prioritas Legislasi Nasional) sudah mulai diungkap. Mulai dari pembicaraan mengenai paket RUU Perbankan yang sekarang sangat liberal —ditandai dengan dimilikinya bank umum hingga mendekati 100% kepemilikan— sampai pembicaraan mengenai reformasi UU Minerba dan penuntasan UU penguatan Desa yang sudah dimulai di UU Desa.

Lalu apa saja peluang yang bisa kita usung untuk mempercepat perwujudan *tadayyun sya'bi* melalui kebijakan DPR periode 2014-2019 ini?

Setidaknya ada empat bidang garapan utama yang bisa kita perjuangkan untuk memberikan kontribusi bagi terwujudnya percepatan Indonesia kita. Pertama paket Undang-undang distribusi kekayaan nasional. Rasio gini kita yang mendekati 0.43 sangat mengkhawatirkan. Pengalaman Malaysia dengan *New Economic Policy*- (NEC)-nya menggambarkan betapa keberadaan *political will* saja, belumlah cukup. Tetap diperlukan disiplin bagi terjadinya *transfer of wealth* (penyebaran kekayaan) kepada masyarakat miskin. Setelah lebih dari 30 tahun, penguasaan kekayaan bumi putra tidak lebih dari angka 19%, naik dari sebelum NEC yang awalnya 8-9%. Indonesia dengan penduduk beretnis Cina yang tidak sampai 5% dan menguasai lebih dari 70% kekayaan nasional tentu perlu segera menyelesaikan paket UU ini. Pembukaan UUD 1945 jelas memgamanatkan agar mensejahterakan kehidupan bangsa merupakan tugas negara.

Di antara paket UU ini adalah reformasi agraria termasuk pelaksanaan *land reform*. Jumlah wilayah hutan indonesia yang lebih dari 76 juta hektar perlu dikelola dengan baik. Tidak ada lagi kondisi dimana satu orang mendapat konsensi pengolahan hingga 2 juta hektar sementara mayoritas petani hidup dengan lahan dibawah 0.2 hektar. Termasuk juga paket kebijakan sertifikasi tanah-tanah rakyat. Hernando de Soto salah seorang peraih Nobel Ekonomi dari Amerika Latin menyarankan, salah satu cara pemerintah menyayangi rakyat adalah sertifikasi tanah rakyat oleh negara. Yang tadinya aset mati berubah menjadi aset produktif dan pada saat yang sama meningkatkan rasio bankability masyarakat.

Paket kedua adalah UU peningkatan infrastruktur ekonomi kita. Alokasi anggaran besar-besaran untuk mewujudkan jalur logistik darat, laut dan udara disertai dengan kesiapan perbankan nasional yang lebih pro kepada rakyat miskin. Termasuk penyiapan transportasi umum dan sistem energi nasional dengan *backbone* gas alam yang melimpah yang kita miliki. Termasuk perbaikan sistem kepemilikan perbankan kita yang sangt liberal. Pekat UU ini diikuti penyelesaian paket UU reformasi birokrasi yang sudah bergulir mulai dari UU Aparatur Sipil Negara dan UU Administrasi Pemerintahan yang akan diikui dengan pembahasan dan pengesahan RUU Etika Aparatur dan pejabat Negara. Harapannya negara siap melayani masyarakat secara fisik dan pelayanan.

Paket UU ketiga adalah penyempurnaan pelaksanaan UUD 1945 Bab XA. Salah satu ciri UUD hasil amandemen dari 1999-2002 sebelum dan sesudah reformasi adalah penembahan BAB yang khusus memuat Hak Warga Negera di Bab XA ini. Ada 10 Pasal baru yang melulu isinya menegaskan Hak Warga Negara —mulai dari hak berusaha dan berpenghasilan, hak berkeluarga, hak kesehatan, hak pendidikan hingga hak memperoleh informasi, yang setiap pasalnya itu berimplikasi pada lahirnya UU turunannya. Mulai dari UU BPJS I dan II yang terkait kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk UU Keterbukaan Informasi Publik agar masyarakat dapat mengetahui seberapa besar institusi publik besikap transparan dan mematuhi asas akuntabilitas. Masih banyak hak warga negara yang harus diperjuangkan, diantaranya adalah hak berkeluarga. Karena itu sejak periode lalu FPKS gigih memperjuangkan RUU Ketahanan Keluarga . Dengan paket UU ketiga ini diharapkan negara dapat menyediakan alokasi anggaran yang besar bagi publik, khususnya masyarakat tidak mampu.

Sehingga negara benar-benar berfungsi layaknya ayah yang melindungi keluarga dan anak-anaknya.

Paket UU berikutnya adalah UU yangg menjaga kesatuan dan kekuatan umat. Sesudah memiliki UU Zakat, kita sedang berpacu memiliki UU Haji dan Umroh. Kita juga bersegara mewujudkan UU Wakaf dan UU yang menjamin kokohnya budaya Islam dalam kerangka NKRI. Pada periode akhir DPR lalu telah disahkan UU keuangan Haji yang memungkinkan kita membentuk lembaga seperti Tabung haji Malaysia dan juga UU jaminan Produk halal, dimana posedur dan sistem sertifikasi halal menjadi keharusan bagi produsen demi menjaga kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi umat. Semua undang-undang yang ada masih harus dioperasionalkan melalui Peraturan Pemerintah, Kepres dan Peraturan menterinya. Pengawasan masih harus dilakukan. Pada saat yang sama pembangunan institusi memerlukan waktu dan dukungan SDM serta anggaran, agar mampu *perform* dan berprestasi.

Insya Allah dengan sejumlah agenda ini, keberadaan KMP dapat membuat percepatan bagi terwujudnya negeri yang *baldatun thoyyibatun warabbun ghafuur*....Tentu dengan tetap 'mengingat' karena ini koalisi pragmatis, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk tetap harus dilakukan. Prinsip kita jelas, *faidza azamta fatawakkal 'allallah*...Jika kita sudah berazam (mengambil keputusan) maka bertawakkalah kerja kita selanjutnya. Semoga Allah *Ta'ala* selalu memberkahi ikhwan dan Akhwat yang berjuang mewujudkan kejayaan Islam dan umatnya di manapun mereka berada.

Kabinet Kerja dan Kerja Dakwah

هَلْ جَزَآءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾

"Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)." (Q.S. Ar-Rahman: 60)

Maraknya pemberitaan seputar pembentukan *line up* kementerian di Kabinet Kerja memang meneguhkan bahwa sistem pemerintahan kita bersifat presidensial dan para menteri—yang menjadi pembantu presiden—sebenarnya pelaksana utama dari presiden sebagai kepala pemerintahan. Terlepas dari banyak cerita yang melatar belakanginya, pidato Presiden Jokowi pada saat pelantikan hingga saat syukuran bersama relawan di Monas selaras dengan penamaan Kabinet Kerja. Jika dicermati selama dua minggu sejak pelantikan, seolah ada perintah tidak kasat mata pada seluruh menteri agar benar-benar BEKERJA. Mulai dari *blusukan*, panjat pagar hingga mendatangi pasar, bertemu nelayan, sampai kunjungan kerja presiden ke Sinabung dan tiga provinsi di Sulawesi pada pekan pertama dan kedua masa kerja kabinet ini—semua seolah ingin menegaskan bahwa kaninet ini ingin bekerja.

Walau kritik tak kalah kuat muncul ke permukaan mulai dari tuduhan kerja yang sporadis, kerja tidak sistematis hingga kerja yang tidak berkelan-jutan dari apa yang sudah dibangun pemerintahan SBY, namun diatas itu semua, walau pasar tidak menyambut antusias *line up* para menteri di bidang ekonomi, tapi tabungan kepercayaan (plus harapan) untuk Indonesia yang lebih baik membuat media, pengamat hingga investor tidak ‹menghukum› susunan menteri di kabinet Jokowi - JK ini. Premisnya jelas: siapa mengambil aksi maka yang lain harus bereaksi. Tentu, ada saja opsi bahwa respon pasar, media dan pengamat yang ‹memanjakan Jokowi› merupakan hasil dari kerja rekayasa dari *invisible hand*. Tapi jika kita mau mengambil sisi positifnya, ‹menaklukan publik› salah satunya dapat dilakukan melalui aksi heroik yang mendapat peliputan media dengan *tone* positif. Ada dua medan yang harus ditaklukkan: bukan hanya mampu melakukan sesuatu yang *extra ordinary good*, tetapi juga mampu menarik perhatian media agar apa yang dilakukan menjadi berita yang dapat dikonsumsi masyarakat.

Agar proyeksi kerja-kerja dakwah dapat berjalan beriringan dengan pemerintahan yang baru, hendaknya kita menjadi generasi pro aktif.

Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hiruk pikuknya pemberitaan kabinet yang PKS tidak berada didalamnya itu? Plus bagaimana proyeksi kerja-kerja dakwah seiring dengan berjalannya pemerintahan yang baru ini?

Pertama, hendaknya kita menjadi generasi pro aktif. Rumusnya jelas, «*Beramallah kalian maka Allah, rasul dan orang-orang beriman akan melihat kalian.*» (QS. 9:105). Pertahanan terbaik

adalah menyerang, demikian *adagium* yang sering kita dengar. Artinya, sebagai Partai Dakwah, PKS perlu terus memberi kontribusi bagi bangsa dan negara, baik melalui sumbangan narasi besar, maupun aksi-aksi membumi yang dapat dirasakan masyarakat.

Seringkali ada bisikan syaitan, "Berbuat baik *kayak* apapun tetap saja saat pemilu nanti uang yang berkuasa!". Pernyataan ini pada prakteknya memang ada benarnya saat Pemilu 2014. Tapi kita bukan partai politik yang cuma berpikir bagaimana dapat suara dan dapat kursi! Justru ke depan, masyarakat akan muak sendiri terhadap sikap oportunis dan pragmatis, baik yang dilakukan elit maupun *grass root*. Akan ada titik *equilibrium* dimana kesadaran masyarakat akan mengapresiasi Partai yang punya jati diri. Partai yang komitmen dan istiqomah serta bersih dan berkarakter. Ini sebenarnya adalah karakter partai yang lahir dari rahim tarbiyah, lahir dari pengkaderan dan lahir dari keyakinan pada aqidah bahwa yang utama dalam amal kita adalah penilaian dari Allah *Taala*.

Kejelasan *tawajjuh* (orientasi) ini membuat kita selalu nyaman beramal, tidak diombang ambingkan oleh hasil yang merupakan hak prerogatif Allah *Ta›ala*. Sikap *tawajjuh* yang benar ini pun membawa kita fokus pada pekerjaan membangun basis jangka panjang, seperti menanam pohon jati. Jika basis itu sudah terwujud, maka kita tinggal memetik dan memelihara hasil yang terus berbuah.

Kedua, pro aktif tersebut harus dikaitkan dengan kemampuan membangun persepsi yang tepat sesuai dengan yang kita inginkan. Usaha membangun bangsa dengan dasar keikhlasan harus dibarengi dengan ‹mendidik› masyarakat untuk mengenal manhaj dakwah dan hasil-hasil kerja dakwah.

Tidak ada pertentangan antara kerja ikhlas dengan mengenalkan kerja dakwah ini pada masyarakat. Karena di era sekarang, prinsip *stand out among the crowd* menjadi keharusan, ketika banyak pihak bekerja juga mengkampanyekan prinsip kebatilan dalam bentuk liberalisme, hedonisme hingga humanismenya. Karena itu, penyiapan para amilin yang bekerja keras membumikan manhaj dakwah, dengan dibarengi strategi marketing yang tepat menjadi keharusan. Akan lebih utuh lagi jika kita memiliki *icon* yang akan memudahkan masyarakat mengenal manhaj ini, melalui perilaku santun, sederhana, prestatif dan kontributif dari *icon* kita itu. Walau perlu diingat *icon* ini sangat perlu menjaga kebersihan hati. Karena siapapun ia, pada saat itu ia sedang meniti jembatan tipis yang dapat membawanya pada rasa ujub, merasa lebih besar dari organisasi.

Ketiga, perlu strategi tepat dengan tetap bekerja dalam lingkup Koalisi Merah Putih (KMP). KMP adalah *wasilah* (sarana) untuk mewujudkan agar agenda *tadayyun sya›bi* (mewujudkan negeri yang religius) bukan hanya menjadi agenda PKS. Tapi juga menjadi agenda KMP dan bangsa ini secara keseluruhan. Tapi pada saat yang sama PKS juga mesti membangun citra dan persepsi tunggal yang membuat masyarakat tahu bahwa PKS sebagai entitas publik punya kekhasan dan keistimewaan dibanding yang lain.

Pandangan PKS tentang jalan menuju kesejahteraan rakyat, pengelolaan menerba hingga pengelolaan pertanian, perikanan termasuk konsep pendidikan usia dini hingga riset dan teknologi harus lantang dan jelas disampaikan. Karena itu, konsep kabinet bayangan dalam arti *pseudo* (karena Indonesia tidak menganut sistem parlementer) sangat diperlukan. Apatah lagi, realita

menunjukkan belum banyak kader PKS dipersepsi masyarakat sebagai *icon* dari masing-masing bidang kehidupan. Langkah ini, jika dilakukan dengan sistematis dan dalam rentang waktu yang cukup akan menjadi fondasi kokoh bagi penerimaan publik jika kelak PKS mendapat kesempatan memimpin negeri.

Keempat, lima tahun ke depan tidak akan mudah. Panggung yang tersedia bagi PKS tidak banyak. Eksekutif, bagaimanapun memiliki power, termasuk anggaran dan panggung, yang jauh lebih besar. Apatah lagi, terencana atau tidak, jajaran Menteri di Kabinet Kerja memiliki usia yang rata-rata muda. Kawan-kawan dari PKB, Hanura dan Nasdem yang duduk di kementerian termasuk beberapa Dirut BUMN dan pengusaha yang direkrut masuk relatif muda, segar dan penuh vitalitas. Jika Presiden dan Wapres dapat membuat alur komunikasi yang sinergis, bukan tidak mungkin kabinet ini punya peluang untuk sukses.

Banyak terlontar pendapat, pemaksaan program KIP dan KIS berpeluang membuka pertarungan keras dengan parlemen sejak awal. Hal ini diprediksi akan membuat Kabinet ini berusia pendek. Tapi, menyiapkan yang terburuk lebih baik ketimbang beranggapan bahwa jalan yang akan kita lewati landai dan nyaman. Kekalahan di Pilkada DKI, Pilpres atau suara Pileg yang turun mestinya membuat kita bijak untuk tidak menuding orang lain sebagai biang kekalahan atau penurunan. Sebaliknya kita mesti menyiapkan mental dan kekuatan lebih ihsan lagi agar kitapun mendapat balasan ihsan seperti penggalan ayat diawal.

Semoga Allah *Ta›ala* memudahkan seluruh langkah kita untuk memperbaiki diri agar selalu siap menjadi 'prajurit *fikrah* dan *aqidah*' seperti ungkapan Imam Hasan Al Banna.

Faktor Moral

Ustadz Sayyid Quthb dalam mukadimah tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* mengkritisi peradaban kapitalis dengan pandangan bahwa peradaban materialis tersebut tegak berdiri seperti burung yang mengepakkan satu sayapnya yang perkasa, sedangkan sayapnya yang lainnya lemah lunglai. Peradaban ini sukses mencapai kemajuan dalam bidang penemuan materi tetapi gagal di bidang nilai-nilai kemanusian. Peradaban berbasis ideologi kapitalis telah melahirkan kecemasan, kebingungan, serta berbagai penyakit jiwa dan saraf.

Kehampaan jiwa pada masyarakat peradaban kapitalis telah menghasilkan dekadensi moral yang luar biasa dan kejahatan kemanusiaan yang tak pernah terbayangkan. Seorang anak tega membunuh orang tuanya sendiri hanya karena persoalan video game. Seseorang mengamuk di kampus dengan memberondongkan peluru dari senjatanya tanpa sebuah alasan yang jelas. Hubungan badan antara anggota keluarga sedarah mulai sering kita dengar. Pada gilirannya kehampaan jiwa pada masyarakat kapitalis tersebut akan meruntuhkan sendi-sendi

peradaban materialis itu sendiri.

Demikianlah biasanya para pemikir Islam melakukan kritik terhadap ide-ide kapitalis. Mereka menganggap kapitalisme telah berhasil mencapai kemajuan di bidang materi tetapi gagal di persoalan ruhiyah atau kejiwaan. Allah telah membukakan jalan bagi para pemikir Islam untuk menunjukkan borok-borok ideologi kapitalisme di bidang materi yang menjadi kebanggaan para pendukungnya. Sampai hari ini kapitalisme masih gagal mendistribusikan kesejahteraan materi kepada seluruh warga dunia. Peradaban kapitalis gagal memberikan pemerataan kesejahteraan dan gagal melakukan pengentasan kemiskinan. Terjadi kesenjangan kehidupan antar negara, antar daerah dalam sebuah negara dan antar anggota masyarakat. Kegagalan kapitalisme sebenarnya sudah terlihat dari beberapa data statistik.

Seabrook (2003) pada bukunya *The No-Nonsense Guide to World Proverty*, sebagaimana dikutip oleh Dr. Dradjad H. Wibowo, mengungkapkan bahwa diperkirakan lebih dari 840 juta penduduk dunia mengalami malnutrisi dan 6 juta balita meninggal setiap tahun sebagai akibatnya. Sekitar 1,2 miliar penduduk dunia hidup dengan penghasilan kurang dari US$ 1 sehari. Sekitar separuh penduduk dunia hidup dengan US$ 2 sehari. Sementara di lain pihak, penghasilan dari kelompok 1% terkaya di dunia setara dengan kekayaan 57% penduduk dunia.

Rapuhnya sistem ekonomi kapitalis sesungguhnya telah ditunjukkan melalui krisis dalam skala global

Faktor utama yang menyebabkan pembusukan terhadap keberhasilan ide kapitalisme adalah tidak berperannya faktor moral.

yang telah terjadi berkali-kali. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1930 pernah terjadi krisis ekonomi dunia. Pada tahun 1996-1997 terjadi kembali krisis keuangan yang melanda negara-negara Asia dengan di tandai rontoknya nilai mata uang beberapa negara Asia, termasuk Indonesia.

Peradaban dunia tidak lagi bisa dipercayakan kepada ide kapitalisme. Kegagalan ide kapitalisme seharusnya sudah bisa diterka dengan mudah, karena ide tersebut lari dari fitrah manusia. Ide kapitalisme gagal menghargai manusia secara utuh. Kehidupan manusia tidak hanya di topang oleh aspek jasad dan akal. Perlu hadir sebuah peradaban manusia yang memberikan perhatian secara integral terhadap seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari akal, jasad hingga persoalan ruh atau moral.

Faktor utama yang menyebabkan pembusukan terhadap keberhasilan ide kapitalisme adalah tidak berperannya faktor moral. Kerusakan sistem kapitalis sebenarnya bersumber dari persoalan moral. Keserakahan yang berujung pada tindakan mementingkan diri sendiri dan kecurangan telah mendorong sistem kapitalis sedikit demi sedikit ke arah jurang kehancuran. Keserakahan telah mengakibatkan ide kapitalisme gagal mendistribusikan kesejahteraan. Korupsi yang telah mengakibatkan pengentasan kemiskinan di Indonesia berjalan di tempat juga dipicu oleh nafsu serakah.

Kinilah saatnya memulai sebuah gerakan yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai moral agama ke dalam sistem perekonomian. Moral keagamaan akan berfungsi sebagai kendali terhadap nafsu serakahnya manusia. Mungkin ini rahasia besar mengapa bapaknya kapitalisme, Adam Smith, lebih dulu menulis buku tentang *The Theory of Moral Sentiments* sebelum

The Wealth of Nations, rujukan para penganjur kapitalisme.

Para pedagang hendaknya tidak lagi bertindak curang dengan mengurangi timbangan. Para pejabat dan birokrat harus menghindarkan diri dari kejahatan korupsi. Para pegawai swasta hendaknya selalu mengedapankan kejujuran dalam melaksanakan perkerjaannya. Para pengusaha tidak lagi serakah dalam mengambil profit atau keuntungan dan mulai memberikan perhatian besar pada kesejahteraan karyawannya. Alangkah indahnya dunia tanpa keserakahan.

Pemimpin: Membangun Masa Depan

Setiap pemimpin pasti akan dinilai, dikritik dan dianalisa semua kebijakan dan eksekusinya. Dan seringnya, penilaian objektif terjadi justru puluhan tahun setelahnya. Sukarno, Suharto, Habibie dan juga Gus Dur mulai terlihat jelas posisi dan kontribusinya lama sesudah mereka tidak lagi menjabat.

Karena itu setiap pemimpin yang sukses biasanya tidak sibuk bermanuver sesuai arah angin. Tapi selalu fokus pada visi dan misi yang jelas. Pada satu sisi, menjadi pemimpin memang sepenuhnya tunduk pada hukum dasar mencari dan menemukan apa yang terbaik bagi orang yang dipimpinnya. Tapi di sisi lain; strategi, gaya dan cara yang ditempuh melulu merupakan pilihan pribadi atau preferensi sang pemimpin.

Begitulah. Seorang penanggung jawab di Setneg mengatakan, pertama kali dalam sejarah wartawan bisa menyorongkan mike hingga mulut Presiden Jokowi. Seperti juga pertama kali Presiden menerima tamu negara dengan baju putih lengan panjang yang

digulung. Tanpa jas dan tanpa dasi. Begitulah, pada akhirnya sistem harus melayani sang pemimpin. Bukan sebaliknya.

Karena itulah Islam sejak awal menegaskan betapa kualitas kepemimpinan sangat menentukan. Karena itu pula, *tarbiyah qiyadiyah* (pendidikan kepemimpinan) menjadi salah satu tema dasar dalam sistem *tarbiyah Islamiyah* bersama dengan *tarbiyah jihadiyah*.

Baginda Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam mencontohkan betapa fokus pada kaderisasi kepemimpinan membuat stok pemimpin di zaman Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam amat berlimpah. Hingga seorang Usamah bin Zaid, saat berusia 17 tahun telah mampu menunaikan amanah kepemimpinan pasukan besar beberapa saat sebelum Rasul mangkat. Pun seorang Umar bin Khattab yang sangat kuat karakter kepemimpinannya, disiapkan menjadi pemimpin tanpa pernah sekalipun ditugaskan menjadi ketua tim, pemimpin saraya ataupun ghazwah selama Rasul Shalallahu Alaihi Wasalam hidup. Tak lain karena Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam ingin mengajarkan bahwa tidaklah seseorang dapat menjadi pemimpin yang baik sebelum menjadi prajurit yang baik. Sisi *jundiyah* yang kuat menjadi landasan sisi *qiyadiyah* yang kuat dan melayani.

Karena itu selama 13 tahun kepemimpinannya, Umar *radhiyallahu 'anhu* amat sangat menonjol sisi kekuatan dan pelayanannya. Begitupun dengan Khalifah Abu Bakar *radhiyallahu 'anhu* tegas menjalankan prinsip, *"Orang yang kuat di sisi kalian akan menjadi orang yang lemah. Dan orang yang lemah diantara kalian akan menjadi orang yang kuat."*

Dengan kejernihan dan sikap adil—terlepas kita tidak mendukung Presiden—menilai dan juga belajar kepemimpinan

bisa dilakukan dari siapapun. Mereka yang dapat belajar akan mampu menjawab tantangan zaman saat kesempatan itu datang.

Harakah Islam harus belajar bagaimana mampu memanfaatkan amanah kekuasaan untuk mewujudkan *rahmatan lil alamin.*

Masa depan, selalunya merupakan resultan dari keputusan dan eksekusi yang dilakukan hari ini. Kualitas kepemimpinan yang solid, fokus dan berprinsip 'berawal dan akhir dalam pikiran' membuat kita mampu mendesain masa depan sesuai dengan visi dan cita-cita yang kita inginkan.

Harakah Islam harus belajar bagaimana mampu memanfaatkan amanah kekuasaan untuk mewujudkan *rahmatan lil alamin.* Dalam terminologi sederhana, *rahmatan lil alamin* dalam konteks negara, disebut oleh Alqur'an dengan *baldatun thayyibatun warabbun ghafur.* Terdiri dari dua term: *baldah thayyibah* (negeri yang baik/sejahtera) dan *wa rabbun ghofur* (diridhoi/diberkahi).

Malaysia di zaman Mahathir mampu membawa masyarakatnya berpacu dengan cepat menuju taraf kesejahteraan melampaui kita. Deng Xiao Ping di era 80-an mampu membuat Cina meraih pertumbuhan dua digit selama dua dekade. Lee Kuan Yew membawa mampu membawa Singapura keluar dari negeri dunia ketiga menuju *first class country.*

Akan ada cerita tentang Presiden kita. Dan akan selalu ada kesempatan Presiden itu lahir dari rahim harakah Islam. Ketika masanya tiba, mestinya kita sudah belajar bagaimana menbangun masa depan sesuai *blue print* yang Allah Ta'ala gariskan. Yang dalam banyak *term,* juga belajar membangun beberapa parameter yang sudah menjadi *best practices* di dunia internasional. Mulai dari indeks korupsi yang rendah, indeks

infrastruktur yang baik, hingga indeks daya saing dan indeks inovasi, serta *doing bussiness* yang tinggi.

Ketika masa itu tiba, kita berharap, kita dapat mewujudkan masa depan seperti yang dikatakan Imam Ibnu Taymiyah, bahwa tidak merasakan syurga di akhirat mereka yang belum merasakan syurga di dunia. Termasuk didalamnya: lingkungan hidup dan bekerja *first class* yang dinaungi dengan *tadayyun sya'bi* (iklim religi) yang menguatkan ruhani dan pikiran. *Wallahu a'lam bishawab.*

Pro Active Political Party

Partai yang pro aktif tidak akan sibuk mengelilingi kekuasaan dan membagi-bagikannya diantara mereka, walau mereka sudah menang pemilu. Tapi mereka akan membuka pintu selebar-lebarnya pada orang-orang terbaik untuk bergabung mengelola dan memajukan negeri ini.

Selama dua pekan, sejak akhir Januari hingga awal Februari, saya mendapat undangan kunjungan ke Malaysia—Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Selangor, Johor—dan terakhir mampir di Singapura. Disana, saya banyak melakukan pertemuan dengan para aktivis gerakan Islam, termasuk mereka yang aktif di Partai Politik. Di Malaysia, selain bertemu dengan para aktivis PAS (Partai Islam Se Malaysia), saya juga bertemu dengan para aktivis PKR (Partai Keadilan Rakyat) dan DAP (Democratic Action Party), plus bertemu dengan beberapa NGO. Fokus perhatian dan perbincangan seringkali menyinggung tentang bagaimana Partai Politik mampu menjawab tantangan zaman agar menjadi tumpuan dan harapan publik dalam membangun bangsa.

Walaupun Malaysia dan Singapura telah maju—bahkan relatif lebih maju dari Indonesia, namun kami sepakat, dalam kondisi zaman yang terus dinamis dan berkembang, tetap diperlukan partai politik berkualitas yang mampu memberikan jawaban atas persoalan rakyat, serta memberi bukti bahwa bangsa ini menjadi lebih maju dan sejahtera. Hadirnya partai politik yang mampu memberi solusi, plus mempesona publik—karena integritas dan kualitasnya— niscaya akan meningkatkan party ID dalam masyarakat. Party ID ini, dalam bentuk hubungan yang kokoh dan positif antara publik dan partai, akan membawa dampak terwujudnya *low cost democracy* yang baik bagi kemajuan bangsa.

Tantangannya jelas: tingkat kepuasan publik terhadap partai dan politisi serta parlemen termasuk yang memiliki nilai terendah. Karena itu PKS berkewajiban memberi contoh bagaimana mampu menghadirkan tingkat Party ID yang tinggi. Setidaknya ada empat faktor utama yang dapat meningkatkan rasa kepuasan publik kepada partai.

Pertama, mewujudkan *island of integrity Party*. Partai dengan 'Pulau Integritas' adalah partai yang dapat menunjukkan betapa kader, para pengemban amanah di legislatif dan eksekutif adalah mereka yang memiki integritas: bersatunya kata dengan perbuatan. Korupsi adalah kejahatan dan kita wajib memerangi semua jenisnya. Termasuk mengambil sikap *bara* (berlepas diri dan tidak berhubungan) dengan para pelaku korupsi. Kebijakan partai pun harus sangat tegas memerangi korupsi. Tidak meng*endorse* siapapun calon pejabat negara yang terindikasi korupsi, apatah lagi tersangka korupsi.

Integritas adalah ciri seorang mu'min, karena kata Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam, *"Iman itu Amanah."* Oleh karena itu, sikap dan

kebijakan partai secara tegas harus menunjukkan betapa partai dakwah ini mampu menyuarakan hadits, *"Barangsiapa diantara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisan, dan jika tidak mampu ubahlah dengan hati. Itulah selemah-lemah iman."*

Kedua, mewujudkan *merit system* dalam partai. *Merit system* adalah perekrutan kader dan proses pelahiran pemimpin bangsa berbasis kapasitas dan kemampuan. Kader dengan kualitas terbaik mendapat kesempatan mendapatkan proyeksi, promosi dan nominasi. *"You cannot train a duck to fly,"* Kita tidak dapat mendidik bebek untuk terbang, karena memang cuma elang atau burung saja yang dapat terbang. Maka mesti ada sistem, prosedur dan proses yang memberi kesempatan bagi kader berkualitas untuk didorong dan dibantu menjadi wakil partai dalam mengelola negara. Kalimat, *"How can you govern your country if you cannot govern your party,"*, layak kita kenang selalu. Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam mengatakan, *"Tidak beriman seorang yang memilih seseorang, sementara ada orang lain yang lebih baik darinya untuk satu jabatan."*

Ketiga, mewujudkan Pro Aktif Political Party. Salah satu alasan mengapa begitu cepatnya pembangunan Singapura adalah kemampuan Lee Kuan Yew mewujudkan People Action Party (PAP) bersikap pro aktif, yakni dengan merekrut *the best people on their field* (orang-orang terbaik pada bidangnya) untuk ditempatkan pada pos-pos yang akan mengurus urusan publik. Berkaitan hal ini, kita mengenal kaidah *faqidusy sya'i la yu'thi...* siapa yang tidak memiliki sesuatu tidak akan dapat memberi sesuatu.

Mengendalikan urusan publik (baik kepala daerah, kementerian

atau wakil legislatif) bukanlah urusan yang dapat dijadikan bancakan tanpa pengetahuan. Stephen Covey menyebutkan ada tiga unsur keunggulan: tahu (*knowledge*), mau (*desire*) dan mampu (*able*). Iman Hasan Al Banna pun mengingatkan kita, *"kam minna walaisa fiina"*, berapa banyak mereka yang bagian dari kita tapi tidak bersama kita.

Partai yang pro aktif tidak akan sibuk mengelilingi kekuasaan dan membagi-bagikannya diantara mereka, walau mereka sudah menang pemilu. Tapi mereka akan membuka pintu selebar-lebarnya pada orang-orang terbaik untuk bergabung mengelola dan memajukan negeri ini. Tujuan dakwah bukanlah untuk berkuasa. Itu sebatas *wasilah* (sarana). Tujuan dakwah yang hakiki adalah *iqomatuddin*, tegaknya nilai ilahiyah menjadi pedoman dan praktek keseharian di seluruh level kehidupan.

Tiga pekerjaan ini menjadi tugas kita bersama. semoga Allah SWT memudahkan para *qiyadah* untuk memutuskan yang terbaik bagi partai dakwah ini.

KPK-Polri: Ujian Kepemimpinan Nasional

Kisruh Polri dengan KPK dan turunannya memberi kita landscape jelas tentang kualitas kepemimpinan seorang Jokowi. Jamak difahami *when you are on the top you will be alone*, saat kita memimpin, keputusan sepenuhnya ada ditangan kita, sendirian. Karena di semua institusi, selalu ada *ultimate decision*, sang pengambil keputusan akhir. Biasanya pada keadaan biasa keputusan dapat dibuat bersama. Tapi dalam keadaan genting dan ber-*magnitute* besar sang pembuat keputusan utamalah yang harus mengambil ketegasan. Disitulah sebenarnya kualitas kepemimpinan seseorang akan diuji.

Dalam kepemimpinan tingkat nasional, dengan segala hierarkinya, ada jenis keputusan teknis dan keputusan strategis. Keduanya dapat didelegasikan. Karena fokus dan dampak keputusan itu hanya menentukan kecepatan dan ketepatan pembangunan. Tapi ada jenis keputusan lain yang lebih fundamental: keputusan prinsip. Ini berkaitan dengan arah dan etika. *Manager do the things right* (melakukan sesuatu dengan

benar). Sementara *Leader do the right things* (melakukan sesuatu yang benar). Tugas pemimpin jauh lebih sederhana dari tugas manajer tapi memerlukan jauh lebih besar kapasitas dan mentalitas. Karena ia berkaitan dengan prinsip yang sering kali bertabrakan dengan kepentingan jangka pendek dari para pendukungnya. Ia berkaitan dengan etika yang seringkali jauh lebih mendasar dari sekadar penegakkan hukum dan undang undang yang seringkali disiasati oleh para pemburu jalan singkat. Ia berkaitan dengan urusan publik yang seringkali tidak memiliki penjaga dibanding urusan privat yang dijaga oleh banyak *body guard*-nya dengan segala macam bajunya.

Karena itulah kasus KPK-Polri amat berkaitan dengan masalah kepemimpinan nasional. Karena ia berkaitan dengan prinsip; masalah korupsi yang sudah merasuk ke semua sendi kehidupan yang dalam beberapa hal berhasil diperangi oleh KPK. Ia berkaitan dengan etika: saat Presiden mencalonkan Kapolri yang berstatus tersangka kasus korupsi. Tambahan lagi dengan kasus turunannya, upaya kriminalisasi komisioner KPK dan penggiat pemberantasan korupsi dengan kasus lama dan tidak terkait langsung dengan korupsi. Ini laksana berdalih menegakkan hukum tanpa landasan etika. Ia berkaitan dengan urusan publik karena korupsi sudah disepakati merupakan masalah dan musuh publik nomor satu. Karena itu, keputusan Jokowi dalam masalah ini dapat kita jadikan tolak ukur untuk menilai kualitas kepemipinan nasionalnya.

Luluskah Jokowi? Saya ingin tegas mengatakan tidak lulus. Walau banyak pihak mengapresiasi keputusannya untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dengan menunjuk Wakapolri sebagai Plt Kapolri dan diajukan sebagai

Calon Kapolri baru tetap saja keputusan itu lebih banyak nuansa politis dan berupaya menjaga keseimbangan jangka pendek. Apalagi keputusan itu diikuti dengan pemberhentian sementara dua komisioner KPK yang didakwa oleh kasus bersyubhat dalam persaksian palsu masalah pilkada dan pembuatan surat identitas palsu. Sesuatu yang publik anggap sebagai bentuk kriminalisasi dan serangan balik pada KPK sesudah penetapan tersangka calon Kapolri. Plus Presiden dengan dalih tidak jngin intervensi pada penegakkan hukum membiarkan pelimpahan berkas tersangka calon Kapolri kepada Kejaksaan yang pada akhirnya menyerahkan kepada Kepolisian untuk menuntaskan kasus ini.

Dari sudut pandang masalah prinsip, keputusan ini jelas tidak berpihak pada upaya pemberantasan korupsi. Membiarkan KPK dilemahkan dan menyetujui kriminalisasi pada komisioner atas kasus saksi palsu dan pembuatan identitas palsu yang sudah lama berlangsung tidak bisa diartikan lain kecuali mengabaikan fakta bahwa KPK diantara institusi yang mampu menegakkan hukum tajam ke atas. Sesuatu yang selama ini sulit terwujud. Tentu kita harus membedakan KPK sebagai institusi dengan komisioner atau oknum KPK yang bisa jadi salah dan tidak kebal sogokan. Publik tegas memberi apresiasi pada KPK yang mampu menghidupkan harapan publik pada pemberantasan korupsi. Keputusan ini juga tidak mencerminkan keberpihakan pada harapan publik yang menginginkan agar orang-orang bersihlah yang dinominasi untuk membersihkan negeri ini dari karat korupsi. Keputusan ini juga tidak mencerminkan kenegarawan Presiden dengan banyak memberi pertimbangan didasari pertimbangan politis dan jangka pendek. Laksana barter yang ingin menyenangkan banyak pihak tapi justru mengorbankan etika dan harapan publik.

Prinsip hanya mungkin ditegakkan oleh mereka yang dekat pada Sang Pemilik Prinsip, yaitu Allah SWT. ...dan kepentingan publik harus menjadi domain utama.

Lalu apa pelajarannya bagi harokah Islam dan kita? *Pertama,* prinsip hanya mungkin ditegakkan oleh mereka yang dekat pada Sang Pemilik Prinsip, yaitu Allah SWT. Pasti mereka yang banyak berhutang budi pada manusia akan sulit tegas. Karena itu, pastikan perjuangan dan harakah kita hanya bersandar dan berharap pertolongan Allah Ta'ala. *Kedua,* kepentingan publik harus menjadi domain utama. Pernah Umar bin Khattab di siang yang sangat terik, saat sebagian besar manusia menghindari terik men-tari, justru berlari di padang tandus nan gersang semata mencari satu onta baitul maal yang terlepas. Menjaga harta umat serta kepentingan publik adalah ciri pemimpin mulia. *Ketiga,* Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam mengingatkan kita untuk 'istafti qolbaka', tanyalah pada hatimu. Rakyat kian cerdas dan dapat melihat apa yang terjadi. Partai politik mestinya mampu mengambil pelajaran bahwa prinsip BERSIH masih sangat dibutuhkan masyarakat. Dan dengan sistem tarbiyah kita mestinya kebijakan partai untuk berlaku BERSIH dalam segala aspek adalah sebuah keniscayaan. Tugas kita semua mewujudkan partai ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Diantaranya menjadi elemen yang mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi.

Pemerintah: Antara Kapasitas vs Publisitas

Dalam sistem presidential, kedudukan seorang Presiden sangat sentral. Konstitusi memberinya banyak hak dan *previlige* (kekhususan), yang tentunya diikuti dengan kewajiban besarnya mewujudkan empat amanah mukadimah konstitusi kita: *'melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial'.*

Dalam lima bulan terakhir kepemimpinan Jokowi, kita melihat ada beberapa langkah yang dapat ditafsirkan sebagai kegamangan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Di antara hal yang paling menonjol adalah tentang kemampuan teknokratis yang belum mumpuni. Hingga saat ini, adanya problem penetapan dan pendefinisian *nomenklatur* anggaran yang tidak selesai berakibat tidak teralokasikannya beberapa pos anggaran. Pemisahan Kementrian Pendidikan dengan Kementrian Pendidikan Tinggi dan Riset contohnya. Secara ide, kebijakan ini niatnya baik bagi

pengembangan yang lebih optimal dan terkoneksinya aktivitas riset dan perguruan tinggi. Tapi dengan dilepaskannya dari Kemendikbud, sementara pembahasan nomenklatur belum tuntas, membuat anggaran untuk tenaga pengajar di Perguruan Tinggi terkendala hingga pertengahan tahun. Ini contoh di satu satuan kerja. Masih banyak kasus sejenis.

Termasuk hal yang menunjukkan keterbatasan kapasitas adalah ketika pemerintah memberi tunjangan khusus untuk aparatur pajak. Dengan dalih target pemasukan pajak yang tinggi, pemerintah memberi renumerasi yang luar biasa *jomplang*-nya dengan satuan kerja lainnya. Apakah kawan-kawan TNI yang berjuang bertaruh nyawa; petugas kepolisian; atau para penyuluh pertanian tidak dihargai sama jerih payah dan pengorbanannya? Apakah mungkin aktivitas ekonomi meningkat ketika infrastruktur, pelayanan aparatur dan juga produktivitas bangsa ada di level yang rendah? Logika ini sama seperti Pemkot Jakarta yang menggaji aparat Pemda dengan standar gaji yang jauh lebih tinggi dibanding rekan sejenisnya di daerah lain ataupun di Pusat sekalipun.

Negeri ini akan menjadi sangat menyeramkan ketika ketidakadilan dijustifikasi karena kapasitas penyelenggara negara yang tidak mampu menemukan solusi yang berkeadilan.

Jika kasus-kasus seperti ini terus bergulir —sesuai dengan fitrah manusia yang menginginkan keadilan— suatu saat akan ada dampak yang bisa jadi tidak *manageable* —tidak dapat dikendalikan. Negeri ini akan menjadi sangat menyeramkan ketika ketidak-adilan dijustifikasi karena kapasitas penyelenggara negara yang tidak mampu menemukan solusi yang berkeadilan.

Pembicaraan warga Kalimantan, Papua, hingga masyarakat Riau tentang ketidak-adilan menjadi kian memiliki dasar.

Kisah perbedaan komentar dan pandangan tentang kepres yang memperkuat institusi Kepala Staf Kepresidenan yangg diperbesar juga menjadi catatan. Dengan lima deputi, selain struktur baru ini berpeluang memiliki staf yang besar, juga menjadi peluang terjadinya tumpang tindih dengan tupoksi dari lembaga yang selama ini ada. Contoh: Deputi II Kepala Staf Kepresidenan tentang Pengelolaan Program Prioritas, berpeluang memiliki tupoksi serupa dengan Bappenas atau pos di menteri koordinator yang bersangkutan. Pada saat yang sama, ada lima deputi dari Kepala Staf Kepresidenan. Dalam penjelasannya Pak Luhut menjelaskan latar belakang para deputi yang menurutnya luar biasa. Saya khawatir, masalahnya bukan orangnya, tapi strukturnya yang tidak tepat. Karena mengelola negara bukan seperti mengelola arisan RW yang dapat diubah setiap saat tanpa membawa konsekuensi dari kompleksnya struktur institusi negara.

Belum lagi rasa ketidak-adilan dengan adanya kepres penetapan subsidi uang muka mobil bagi pejabat negara yang mencapai Rp 210 juta disaat rakyat tengah gonjang ganjing akibat dampak kenaikan BBM, harga beras hingga publik transport yang membengkak. Jika ditambah kemampuan Presiden saat menangani konflik KPK-Polri yang hingga sekarang masih menyisakan persoalan, kita patut bertanya sejauh mana kapasitas pemerintahan sekarang dalam menyelesaikan problem bangsa.

Pada saat yang sama, kita juga melihat penunjukkan beberapa tim relawan dan anggota parpol pendukung sebagai komisaris di beberapa BUMN bukanlah merupakan kebijakan yang menunjukan sakralnya ruang publik yang mestinya dijaga

dengan penuh etika. Pada akhirnya kapasitas akan jauh lebih bergema ketimbang publisitas. Apalagi jika publisitasnya hanya didasari pencitraan semata. Dalam bahasa anak gaul, *"How low can you go?"* Berapa lama dapat bertahan sampai masyarakat sadar bahwa *'faqidus sya'i la yu'thi'* Siapa yang tidak memiliki sesuatu tidak akan mampu memberi.

Apa pelajarannya bagi gerakan Islam? Ada banyak lapisan pekerjaan yang harus dikuasai. Bukan cuma memenangkan hati publik untuk kemudian meraih kemenangan politik. Tapi lebih dari itu, kita perlu menyiapkan orang terbaik, berbasis *merit system* (kapasitas bukan koneksitas) dengan *tour of duty* yang memadai. Hari-hari ke depan jika Allah *Ta'ala* izinkan, kita dapat menekuni jalan *tarbiyah kamilah* ini, termasuk *tarbiyah siyasi* yang hakiki, insya Allah kita akan menyaksikan hadirnya pemimpin umat yang mampu mewujudkan *baldayun thoyyibatun wa rabbun ghafur...*

Menembus Batas Pertumbuhan

Bulan lalu ada dua postingan di medsos yang menarik perhatian. Pertama adalah ilustrasi Peter Goldwin dari Wetpaint bahwa *something interesting is hapening* tatkala menjelaskan fenomena Facebook sebagai *the world's most popular media owner creates no content* dan Airbnb sebagai *world largest provider accomodation, own no real estate.* Ditambah dengan fenomena toko Alibaba dan perusahaan taksi global Uber. Goldwin menjelaskan bahwa pola berpikir masa lalu banyak yang usang. Tiap hari jutaan orang mengakses facebook padahal tidak ada content yang dibuat Facebook kecuali interaksi antar anggota. Belum lagi ditambah fenomena pertumbuhan google yang dalam tujuh tahun mampu menyaingi pertumbuhan General Motor selama 150 tahun, "Sesuatu yang menarik sedang terjadi.", kata Goldwin.

Postingan kedua, masih perlu diklarifikasi karena beberapa waktu kemudian ada berita yang menegasikannya, adalah saat Republika Online menurunkan tulisan pasca Munas Partai Bulan Bintang yang menyebutkan bahwa IBF (Islamic Bussiness Forum) yang diklaim sebagai forum pengusaha muda muslim yang memiliki

500 ribu anggota, membuat aliansi strategis bersama membangun umat. Setiap anggota IBF juga anggota PBB. Bahkan berita tersebut menulis dengan angle jangan meremehkan PBB yang mendapat tambahan darah segar pengusaha di seluruh Indonesia. Jika aliansi itu benar terbentuk, boleh jadi kejadiannya hampir mirip Axis yang diakuisisi XL, sehingga menjadikan kedua-nya mendapat keuntungan bersama. Akhirnya, Axis menjadi perusahaan telekomunikasi kedua terbesar melewati Indosat.

...you cannot find a new land with an old map,
"Anda tidak dapat menemukan pulau baru dengan peta yang lama." Perluas dulu peta Anda, maka pulau (peluang, kesempatan dan kebaikan) baru akan kita dapatkan.

Apa yang ingin digaris bawahi dari dua fenomena diatas adalah *you cannot find a new land with an old map*, "Anda tidak dapat menemukan pulau baru dengan peta yang lama." Perluas dulu peta Anda, maka pulau (peluang, kesempatan dan kebaikan) baru akan kita dapatkan.

Dahulu kita meyakini bahwa merubah Indonesia harus dengan mentarbiyah rakyat kita. Tapi beberapa kelompok kreatif sudah nenunjukkan bahwa dengan pola yang tepat kita dapat menggiring, mengarahkan, bahkan memerintah tanpa disadari alam pikiran, termasuk alam bawah sadar masyarakat termasuk jiwanya, untuk bergerak dan berperilaku sesuai kehendak kita. Kisah sinerginya *message* (pesan) dan *messanger* (pembawa pesan) dalam kisah kemenangan Jokowi menjadi satu bukti kecil kreativitas dan inovasi sangat menentukan dalam pertarungan ke depan.

Dalam konteks inilah, PKS sebagai partai dakwah sebenarnya

memiliki peluang besar untuk *beyond political party*. Komunitas yang dibangun PKS jauh lebih kuat dan solid dibanding partai politik semata. Ada ikatan ideologis, ada interaksi dinamis dan ada sinergi yang luar biasa diantara kader. Namun sepeti yang Goldwin katakan, ada fenomena yang berubah. Maka, kemampuan kita mengendalikan dan mengarahkan masyarakat menuju *tadayyun sya'bi* (masyarakat yang religius), misalnya, harus sebanding dengan kemampuan kader dan institusi PKS mempesona publik.

Karena itu ada dua jenis pekerjaan kita: melahirkan kader dengan kualitas dan integritas unggulan yang mampu mengeksekusi strategi dan program, serta mengeluarkan kader unggulan ini ditengah masyarakat. Kalau mengambil perumpamaan batu akik yang sedang ngetrend, sebagus apapun bacan, sungai darah, pancawarna atau solar aceh—ketika tidak digosok dan dibentuk dia belum mampu mempesona publik. Karena itu pula karakteristik tarbiyah yang melahirkan kader militan sekaligus berwawasan luas dan berlapang dada menjadi program utama. Kaderisasi, Bidang Perempuan, Bidang GMPro hingga Kepanduan ditambah Bidang Kepemimpinan mesti mampu bersinergi. Yang berikutnya progran *rabtul aam,* yaitu dengan menjadi pelayanan masyarakat dari tingkat RT, RW atau DKM, jika mampu menjadi Kepala Desa, mesti ditargetkan. Tentu ada *feedback control* termasuk dalam berta'awuun dengan harokah Islam yang lainnya.

Satu proposal lain mungkin memberi ruang yang lebih longgar bagi kegiatan membuka aliansi strategis di medan siyasi dengan pada saat yang sama tidak menjadikan medan siyasi menjadi *the one and only* bidang garap kader. Memberi kesempatan kepada

kader terbaik bangsa dan kader terbaik umat untuk bersinergi membangun bangsa melalui PKS bisa jadi sebuah keniscayaan. Pepatah, "Berapa banyak mereka yang bersama kita tapi berada di luar kita," dapat kita terapkan. Apatah lagi memang memimpin itu sebuah seni yang,*"you cannot train a duck to fly."* Sementara itu, kader yang bergerak dibidang kemanusiaan, menghasilkan sekolah unggulan, membangun desa teladan, hingga Pos Wanita Keadilan yang produktif menjadi medan yang sama harum dan pentingnya dengan mereka yang terlibat di medan politik.

Untuk menemukan pulau baru, kita harus memperluas peta kita. Kian lambat kita memperluas horizon kita, kian kecil peluang kita membesar karena boleh jadi kelompok lain sudah menemukan pulau terlebih dahulu. *Wallahu a'lam bishawab*.

Be The Elephant

Buku dengan judul kecilnya; *Membangun Bisnis yang Lebih Besar dan Lebih Baik* dikarang Steve Kaplan. Intinya Kaplan menunjukkan bahwa untuk sukses besar, Anda harus bertindak besar. Dan untuk bertindak besar Anda harus berpikir besar. Untuk berpikir besar Anda harus melampaui hal yang biasa. Pepatah, *"You cannot find a new land with an old map"* dapat menjadi titik awal. Bahwa musuh kita seringkali ada di dalam. Berupa ketakutan dan keberanian untuk membuat rencana besar dan kemudian tekun menyusun puzzle rencana kecil yang detail menjadi sebuah karya besar.

Dari awal Muhammad Al Fatih punya tujuan besar yang jelas: menjadi pemimpin terbaik dari pasukan terbaik—sesuai Sabda Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam—tentang pasukan yang akan menaklukkan Konstantinopel. Dibalik keberhasilan Al Fatih ada detail pekerjaan yang sering kita lupa: Semua dibangun tidak dalam sehari, namun terus diasah bertahun-tahun hingga dapat memindahkan 72 kapal dengan ukuran besar melintasi Bukit Galala setinggi 60 meter. Itu bukan sebuah ide yang

biasa. Termasuk pihak Konstantinopel pun tidak berpikir ada yang dapat melewati rantai dan bentengnya. Tujuan besar—menaklukkan Konstantinopel—diikuti dengan perbuatan besar—memindahkan 72 kapal besar melewati Bukit Galala setinggi 60 m—dimulai dengan pikiran besar—selalu ada jalan pada setiap masalah yang diberikan Allah Ta'ala.

Pelajaran Al Fatih yang nyata maupun buku *Elephant*-nya Kaplan, semua menjelaskan bahwa sukses itu bisa, sukses itu mungkin, dan sukses itu justru hak orang beriman tatkala Allah SWT mengingatkan kita bahwa *wal 'aqibatu lil muttatqin*—dan kesudahan (sukses) itu milik orang bertakwa (QS. 28:83). Termasuk sukses jihad siyasi kita yang dalam waktu dekat akan ikut hajatan pilkada serentak di 271 daerah pada 15 Desember 2015.

Sukses itu **bisa**, sukses itu **mungkin**, dan sukses itu justru **hak orang beriman** (QS. 28:83), termasuk sukses jihad siyasi kita

Perubahan *landacape* politik kita dengan pilkada serentak di 2015 dan 2017, serta pemilu serentak di 2019 bukanlah sebuah tujuan yang mustahil untuk dicapai. Keberhasilan menghantarkan *ikhwan* dan *akhwat* untuk menjadi pejuang-pejuang pewujud Islam sebagai *rahmatan lil alamin* dalam ruang publik adalah salah satu keberhasilan dakwah.

Lalu apa yang harus kita lakukan agar organisasi kita menjadi *elephant* dan sukses mencapai target? Setidaknya ada empat milestone utama: *Pertama,* perjelas tujuan dengan kuantifikasi dan *supporting system* yang jelas. Jika ingin menang pilkada harus jelas berapa target suara dan dari mana itu berasal. Jelas targetnya adalah menang. Kisah kemenangan David Cameroon

saat membawa Partai Konservatif (Torry) memenangkan Pemilu awal Mei lalu dapat dijadikan pelajaran. Hasil survey hingga H-1 menunjukkan Partai Buruh akan memberi perlawanan sengit. Tapi hasil pemilu menunjukkan margin100 kursi Torry diatas Buruh. Bukan sebab kursi Torry bertambah 100 tapi: hampir 50 kursi Buruh di Skotlandia diambil SNP dan 40-an kursi buruh di daerah pinggiran diambil Torry. Dengan sistem distrik *the winner takes all.* Beberapa kursi dimenangi Torry dari Buruh hanya beda beberapa puluh suara.

Pelajaran *kedua,* gunakan orang terbaik, walau ada harganya. Untuk itulah Cameron merekrut Lynton Cosby, ahli strategi konservatif Australia untuk masuk dalam tim kampanyenya yang sukses memainkan *micro campaign* dan *micro targetting.* Suara ada di mana dan bagaimana mengambil dan memenangkannya jelas caranya. Al Fatih melatih pasukan dan para komandannya untuk menjadi yang terbaik. *Only the best can produce the best.*

Pelajaran *ketiga,* jangan berpikir tidak mungkin. Semua mungkin. Apalagi jika niat kita adalah *li i'la kalimatillah.* Saat Al Fatih dengan 250 ribu pasukannya *mentok* setelah 10 hari mengepung Konstantinopel, jalan laut terhalang rantai maha besar dan sebelahnya tertutup Bukit Galala setinggi 60 m, maka ide menyeberangkan perahu adalah hal mustahil. Tapi Al Fatih menegaskan jika kita berpikir tidak mungkin maka kita sama dengan mereka yang berada dalam benteng, padahal kita lebih baik dari mereka. Maka tertembuslah benteng super kokoh itu.

Pelajaran terakhir, jangan lupa semua perjuangan ini Allah *Ta'ala* adalah tujuannya. Karena itu jangan menjauh dari-Nya. Jangan menjauh dari Sunnah Rabbaniyah dan Sunah Nabi Shalallahu Alaihi Wasalam. Jaga amanah dan tetap junjung tinggi syariah.

Karena itulah, kuatkan tekad untuk memastikan kita layak mendapat pertolongannya karena kita memang memenuhi syarat menjadi *jundullah*. Wallahu a'lam...

Pilkada Serentak dan Peluang Dakwah

...dalam demokrasi modern saat ini, jabatan eksekutif memberi peluang kontribusi yang langsung dirasakan masyarakat. Wajib Belajar 12 tahun di Jawa Barat atau KJP (Kartu Jakarta Pintar) di DKI hanya dapat diusulkan oleh eksekutif.

Ba'da ramadhan, bukan hanya Syawal yang datang, tapi juga hajatan Pilkada serentak yang akan berlangsung pertama kali di Indonesia. Setidaknya ada 269 daerah yang akan berkompetisi. Karena menggunakan format satu putaran, berapapun suara terbesar yang didapat, dia akan jadi pemenang. Satu putaran tanpa batasan minimal syarat menang dan berlangsung serentak, maka penerapan strategi yang tepat dan akurat menjadi keharusan. Tidak ada ruang untuk koreksi strategi pada putaran kedua.

Karena itu, Pilkada serentak —yang pendaftaran pasangannya berakhir pada 28 Juli 2015 dan akan berlangsung pada 9

Desember 2015— dapat merubah *landscape* politik Indonensia. Jika sebelum ini mayoritas kepala daerah dikuasai Golkar dan PDIP, disusul Demokrat; pasca Pilkada Serentak bagian pertama ini, partai dengan strategi yang tepatlah yang akan dapat mengambil kesempatan untuk merubah kenyataan ini. Dan siapapun yang dapat menguasai mayoritas kepala daerah hasil Pilkada 2015 ini, punya peluang besar memenangkan Pemilu 2019 sekaligus memgantarkan kader terbaiknya sebagai Presiden Indonesia yang ke-8. Karena pada 2019, Pemilu Legislatif (Pileg) dilaksanakan serentak dengan Pemilu Presiden (Pilpres).

Dan Alhamdulillah—hitungan sementara—PKS berpartisipasi pada 210-an Pilkada dengan 129 diantaranya sebagai pengusung, dan ada 52 kadernya akan ikut bertarung pada 9 Desember 2015 nanti. Jumlah kader peserta Pilkada yang baru 19% dari total 269 Pilkada memang belum mencapai angka ideal; tapi dengan proses yang berjenjang, prioritas kader dan realitas politik yang ada, 129 pasangan yang diusung menjadi target kerja dakwah berikutnya. Ini kerja strategis dan bernilai dakwah fundamental. Karena dari pengalaman selama ini: sarana amanah jabatan eksekutif dan legislatif memberi peluang besar dari kader, partai dan dakwah untuk merasionalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara.

Bahkan dalam beberapa kajian, Pilkada Serentak ini memiliki nilai yang lebih strategis dibanding Pileg lalu. Salah satunya karena yang dipertandingkan adalah jabatan/amanah di eksekutif, dimana 80% urusan negara domainnya ada di wilayah eksekutif: angaran, SDM, hingga otoritas. Tak heran jika beberapa aleg rela melepaskan amanah legislatifnya untuk bertanding di jabatan eksekutif walau untuk level kota atau kabupaten sekalipun. Karena memang alurnya, setelah

kontribusi di legislatif yang paling mungkin untuk melanjutkannya adalah dengan kontribusi di eksekutif. Apatah lagi disain *poltical path* (jalur politik) di Indonesia lebih mirip seperti Amerika; dimana pimpinan eksekutif atau senator di daerah atau wilayah naik vertikal. George Bush dan Clinton dari Gubernur ke Presiden. Sama seperti Jokowi dari Walikota ke Gubernur kemudian ke Presiden. Dari sudut penokohan, yang sangat penting dalam demokrasi modern saat ini, jabatan eksekutif memberi peluang kontribusi yang langsung dirasakan masyarakat. Wajib Belajar 12 tahun di Jawa Barat atau KJP (Kartu Jakarta Pintar) di DKI hanya dapat diusulkan oleh eksekutif. Pak Karwo, Gubernur Jawa Timur dalam sebuah perbincangan dengan Penulis, menceritakan idenya membebaskan nelayan Jawa Timur dari jeratan rentenir dengan menginisiasi BPR Daerah yang di *set up* di setiap kecamatan dengan tugas spesifik membantu dan mendampingi warga miskin Jatim tersebut. Tak kurang 500 Milyar pada tahun 2012 dialokasikan untuk kegiatan itu.

Lalu bagaimana strategi agar pada 9 Desember nanti banyak kader dakwah dapat memenangkan pertarungan di Pilkada Serentak ini?

Setidaknya ada empat langkah yang perlu kita dalami dalam tim kerja di setiap lokasi Pilkada Serentak. *Pertama,* Pilkada *is all about* Tokoh, Tokoh dan Tokoh. Jadi ini memang pertarungan tokoh. Karena itu *branding* dan *image* tentang tokoh harus dikedepankan. Dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi rata-rata masyarakat Indonesia, 'menjual' tokoh jauh lebih mudah. Tentu disematkan dengan visi atau *tagline* yang unik mengokohkan *positif image* dari sang tokoh. Bukan cuma *above the line* (dalam bentuk spanduk, stiker dan *online campaign*), tapi juga *bellow the line* dalam bentuk temu warga, *small project*, pemberdayaan, hingga

menginap dirumah warga, mesti dilakukan.

Tapi Tokoh tanpa strategi yang tepat, hanya akan melelahkan, tidak akan profuktif. Karena itu—yang *Kedua*—survey dan peta awal kondisi pemilih dengan isu spesifik di setiap daerah pemilihan perlu segera dilakukan. Saat memenangkan Pilgub DKI, Jokowi-Ahok hanya turun di 77 kelurahan dari 146 kelurahan yang ada di DKI. Rekomendasi tim strategisnya jelas: 77 kelurahan inilah *battle ground* (medan pertempurannya). Sisa 69 kelurahan lainya sudah jelas petanya; sebagian jadi kubu Jokowi-Ahok, sebagian lagi jadi basis kompetitor mereka. Dari 77 kelurahan pun dipetakan apa problem dan harapan di setiap *slicing* (potongan dapil per RW atau RT). Semua dengan pendekatan yang empiris dan terukur.

Ketiga, strategi *micro campaign*. Kampanye dengan data yang jelas dan valid tentang *problem and solutions* pada setiap satuan dapil—misal: basis RT atau RW atau komunitas atau paguyuban atau satuan lainnya—segera dieksekusi. Paguyuban dengan harapan spesifik bisa diikat komitmennya dengan program yang akan dijalankan kemudian. Walaupun basis paling valid adalah melalui pendekatan daerah karena lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) ada di RT akan memudahkan menghitung dan mengevaluasi hasil dan target kerja. Kisah kemenangan Partai Konservatif pada Pemilu Inggris 4 bulan lalu bisa menjadi inspirasi. Dengan sistem distrik, David Cameron dibantu Cheif Executive Strategis-nya Lynton Crosby, membalikkan semua hasil survey hingga H-1 yang menyatakan bahwa Buruh dan Consevative akan bersaing ketat. Namun kenyataannya Conservative-nya David Cameron itulah yang menang dengan lebih dari 100 kursi di Parlemen kemarin. Salah satu rahasianya adalah pendekatan *micro campaign* yang memetakan setiap dapil dengan

isu spesifik dan *treatment* khusus termasuk mendorong Partai Nasional Skotlandia untuk mengambil 58 dari 63 kursi Parlemen di Skotlandia yang sebelumnya mayoritas dikuasai Partai Buruh.

Langkah terakhir—yang *keempat*—kader, kader dan kader sebagai tulang punggung paling terpercaya dan paling produktif sekaligus penjaga kunci-kunci keberkahan dan kunci-kunci dakwah. Dalam setiap hajatan demokrasi, kader selalu mewakafkan diri dan semua miliknya untuk kemenangan jihad siyasi. Pastikan semua kader terlibat dan mengambil medan amalnya yang optimal. Bisa sekaligus digabungkan dengan ekspansi dakwah, implementasi *rabtul aam* hingga program pemberdayaan masyarakat.

Tapi pastikan juga bahwa siapapun kader yang mendapat amanah nantinya akan mampu membalas wakaf tulus kader tersebut dengan menjadikan amanah atau jabatan publik ini sebagai 'wasilah dakwah', 'wasilah ukhuwah' hingga 'wasilah jihad' demi tegaknya kalimat Allah di muka bumi ini. *Waalahu a'lam bish shawab.*

Suksesi PKS: Jundi, Ibadah, dan Kontribusi

Beberapa media menyebut pergantian pimpinan di PKS sebagai revolusi senyap. Disebut revolusi karena terjadi perubahan pada pucuk pimpinan PKS dari Ustadz Hilmi kepada Ustadz Salim sebagai Ketua Majelis Syuro dan dari Ustadz Anis kepada Ustadz Iman sebagai Presiden Partai.

Disebut senyap karena Musyawarah Majelis Syuro PKS ke-1 untuk masa khidmat 2015-2020 memang jauh dari hingar-bingar pemberitaan media. Di partai lain pergantian pimpinan selalu berlangsung tegang. Kadang membawa perpecahan. Tapi di PKS, Alhamdulillah, semua berlangsung dalam siklus yang tenang dan stabil. Sejak era Ustadz Nur Mahmudi kepada Ustadz Muzammil Yusuf, kemudian kepada Ustadz Hidayat Nurwahid, berpindah kepada Ustadz Tifatul Sembiring, dilanjutkan Ustadz Luthfi Hasan Ishaq, dan terakhir diemban oleh Ustadz Anis Matta; semua berlangsung tenang dan stabil. Satu lagi, jika di partai lain pergantian terjadi di Musyawarah Nasional (Munas), di PKS Munas justru berfungsi mengumumkan hasil

kepengurusan baru, karena penetapan kabinet pengurus yang masuk Dewan Pengurus Pusat (DPP), Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) dan Dewan Syariah Pusat (DSP) dilaksanakan selalunya pada Musyawarah Majelis Syuro.

Saya tidak akan membahas kenapa Ustadz Hilmi diganti Ustadz Salim, dan Ustadz Anis diganti Ustadz Iman, karena bagi kader PKS siapapun yang ditetapkan Majelis Syuro untuk menakhodai kapal ini, isya Allah, merekalah yang dianggap paling sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Bagi kader PKS, dengan sistem pembinaan intensif yang menjadi ciri khasnya, siapapun pimpinan yang ditetapkan, isya Allah, mereka sudah melalui tangga pembinaan yang telah lama berlangsung. Untuk menjadi *Anggota Ahli* urut-urutan normal seorang kader selalunya dimulai dengan menjadi *Anggota Pemula* sekitar satu tahun, kemudian *Anggota Muda* sekitar dua tahun, mengikuti proses pembinaan level *Anggota Madya* antara 2 - 3 tahun kemudian menjadi *Anggota Dewasa* 2 - 3 tahun, dan menjadi *Anggota Ahli* antara 2 - 3 tahun. Jadi total waktu pembinaan seorang kader PKS setidaknya antara 9 - 12 tahun. Jadi, siapapun yang dipilih insya Allah up to standar, memenuhi syarat yang diperlukan untuk membawa PKS menjadi Partai Islam rujukan baik dalam hal nilai ataupun kepercayaan publik.

Yang perlu kita ambil pelajaran, dan ini mahal harganya, adalah bagaimana para *qiyadah* (pimpinan) PKS dapat melakukan sirkulasi kepemimpinan dengan nyaman dan elegan. Mengutip pengantar Ustadz Hilmi saat Konferensi Pers sesudah Majelis Syuro, *"Sudah lama saya menunggu generasi ini, saya sebut generasi up coming, untuk melanjutkan pekerjaan yang selama ini diemban saya."*. Pada saat itu pula Ustadz Anis Matta menegaskan

bahwa organisasi yang besar akan selalu menempatkan organisasi diatas individu. Pada acara Silaturahim Pengurus DPP, MPP dan DSP yang diselenggarakan pada Kamis 20 Agustus 2015, Ustadz Anis Matta menegaskan kembali betapa organisasi harus diatas individu dan pada dasarnya semua kita adalah *jundi* yang siap menerima penugasan dimanapun.

... Yang perlu kita ambil pelajaran, dan ini mahal harganya, adalah bagaimana para qiyadah (pimpinan) PKS dapat melakukan sirkulasi kepemimpinan dengan nyaman dan elegan.

Ustadz Hilmi dan Ustadz Anis Matta memberikan contoh, bahwa kedudukan atau jabatan adalah amanah yang tidak ada kaitannya dengan individu-individu tertentu. Pribadi dalam konteks jamaah adalah variabel tidak bebas, sementara itu kepentingan jamaah adalah variabel bebas yang menentukan jalan serta arah perjuangan. Oleh karena itu sudah selayaknya kita semua mengambil pelajaran yang mendalam terhadap teladan ini. Karena pada kenyataannya, dua ustadz ini sangat dicinta dan telah memberi banyak kontribusi bagi perkembangan jamaah. Khususnya Ustadz Anis Matta yang mampu menakhodai perahu ini melalui badai yang cukup besar sebelum Pemilu 2014. Tapi kebesaran individu, kecintaan kader hingga rekognisi publik tidak menghalangi Partai untuk membuat pergantian yang tentu-nya dengan alasan yang kuat, jelas dan mempertimbangkan banyak hal. Pertanyaannya What Next?

Kang Iman, sebutan akrab Ustadz Mohamad Sohibul Iman, dalam taujih pertamanya menjelaskan tentang 4 visi yang mesti kita pahami bersama. *Pertama*, adalah Visi Pembinaan. Bahwa PKS adalah Partai Kader dan Partai Dakwah. Karena itu,

karakteristik kader PKS mesti membawa dua entitas ini: 'kader' (yang bermakna *jundi*-prajurit yang memiliki karakteristik mengikuti muwashofat yang tegas dan militan serta pruden) serta 'dakwah' bahwa *'nahnu du'at qobla kulli syai'in'*. Karena itu pembinaan menjadi tulang punggung utama. *Kedua,* Visi Kelembagaan. Struktur Partai kita mesti mampu memberikan pesona dalam hal pelayanan, advokasi dan keteladanan. Karena itu Struktur Partai yang Profesional mulai dari atas hingga ke level terbawah mesti mampu diwujudkan. Interaksi publik dan kader pada struktur mesti memberikan kelapangan dan kenyamanan pada kader dan publik. *Ketiga,* Visi Kebangsaan. Dimana PKS dituntut memberi kontribusi bagi mewujudkan Indonesia sebagai negeri sejahtera yang diredhoi Allah, *badatun thoyyibatun wa rabbun ghofuur.* Tentu PKS tidak dapat sendirian, karena itu Kang Iman menyerukan agar setiap kader dan struktur selalu membersamai masyarakat. Dalam bahasa Ketua Majelis Syuro, *"Nahnu minhum, nahnu ma'ahum wa nahnu lahum"* (kita ini ada dari, bersama dan untuk masyarakat). Karena itu sejak awal, Kang Iman membuka komunikasi dengan semua pihak termasuk dengan kelompok bukan Islam karena merekapun merupakan bagian dari Indonesia. Dan Visi *keempat* adalah Visi Peradaban; selesai dengan urusan pribadi, struktur dan bangsa maka kiprah kita selanjutnya menjadi kontributor peradaban dunia. Keempat visi ini tidak akan mudah. Dan karena itu kita dituntut untuk ikhlas, *ihsan* dan *itqon* (profesional) dalam beramal.

Agenda selanjutnya adalah memutar mesin Partai ini untuk menghasilkan energi kebaikan. Target pertumbuhan kualitas dan kuantitas kaderisasi, peningkatan kapasitas struktur, *robtul 'am* yang membebaskan kader keluar dari kungkungannya—

seperti harimau keluar dari kandangnya—hingga mengokohkan ekonomi kader dan peran sosial kader di semua bidang yang pada akhirnya akan memberi kontribusi bagi wujudnya Partai sebagai pengejawantahan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*....

Dalam waktu dekat, keberhasilan konsolidasi kita diukur sebagiannya melalui prestasi pada Pilkada Serentak 9 Desember 2015. Tentu bukan semata kemenangan yang dikejar, tapi yang diharapkan adalah kemenangan yang mengokohkan kader, kemenangan yang berkah, dan kemenangan yang menjadi alat untak memajukan rakyat. Ini jauh lebih berat dari sekedar kemenangan politik. Dan karena itu, modal utama dimulai dari *taqarrub ilallah*, *akhlaqul karimah* hingga *jiddiyah* (kesungguhan) dan *tadhiyyah* (pengorbanan) mesti kita tingkatkan sejak dini. Fokus pada proses dan cermat serta detail dalam pelaksanaan, merupakan teladan yang sudah diberikan oleh para pendahulu kita, mulai zaman baginda Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* di medan Badar hingga Muhammad al-Fatih saat menaklukkan Kosntantinopel.

Kinilah saatnya kita merapihkan dan membersihkan diri dan keluarga untuk berkhidmat pada rakyat.

Membangun Good Party Governance

Selama empat kali pemilu sejak reformasi, Indonesia menyaksikan pemenang baru tiap lima tahun. Tahun 1999, PDIP pemenangnya, disusul Golkar pada 2004 dan Demokrat pada 2009. Tahun 2014 PDIP kembali menjadi pemenang. Selalu ada pemenang baru dalam setiap pemilu menunjukkan salah satu karakter demokrasi kita: belum kokohnya party ID (ikatan *voters* kepada partai). Dalam sebuah penelitian, terungkap data 78% pemilih di Indonesia terkategori *floating mass* (pemilih mengambang). Ini salah satu sebab kenapa sejak reformasi belum ada partai yang mampu mempertahankan kemenangannya. Plus semakin kesini persentase kemenangan partai mentok diangka 20-an persen. Bahkan PDIP menjadi pemenang pada 2014 pada kisaran 16%.

Kondisi ini kian menantang jika kita melihat ada perubahan demografi dan tingkat sosial ekonomi masyarakat. Mengacu pada definisi kelas menengah —mereka yang berpenghasilan US$ 2 - 20/hari— tidak kurang dari 134 juta penduduk Indonesia saat

How can you govern your country if you cannot govern your party.
Bagaimana kita dapat mengelola negara jika kita tidak dapat mengelola partai kita.

ini terkategori kelas menengah. Fakta ini didukung oleh realita kian menguatnya ikatan komunitas dan belanja konsumsi kebutuhan sekunder mulai dari kosmetik, alat olahraga hingga traveling. Salah satu ciri kelas menengah adalah adanya karakter independen dan tidak mengikuti pola tradisional. Dari pola hubungan hierarki (atasan-bawahan hingga sikap feodal) menjadi pola hubungan net-working yang berciri kesederajatan dan egaliter. Dalam konteks inilah tantangan bagi Partai Politik untuk membangun pola hubungan yang stabil dan loyal dengan pemilihnya.

Lalu bagaimanakah kondisi PKS dengan landscape ini? Di tahun 2009, dengan tingkat loyalitas men-dekati 76% (baca: 76% pemilih PKS akan memilih PKS kembali pada pemilu akan datang), PKS memiliki kondisi yang menurun dengan angka mendekati 64% menjelang pemilu 2014. Dan itu terkonfirmasi dengan turunnya perolehan kursi PKS kurang lebih 29% dari 57 ke 40 kursi di 2014. Lalu apa langkah yang dapat dilakukan oleh Partai Dakwah ini?

Pertama, tidak ada ikatan yang kuat antara voter dan Parpol kecuali melalui proses mutualisme simbiosis. Tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Artinya dari sudut Parpol mestilah mampu mempesona publik. Baik dengan pelayanan, pemberdayaan ataupun pembelaannya pada rakyat. Hal itu secara masif dilakukan baik oleh partai dan pimpinan partainya dan juga oleh kader partai yang ada di jabatan publik. Baik legislatif

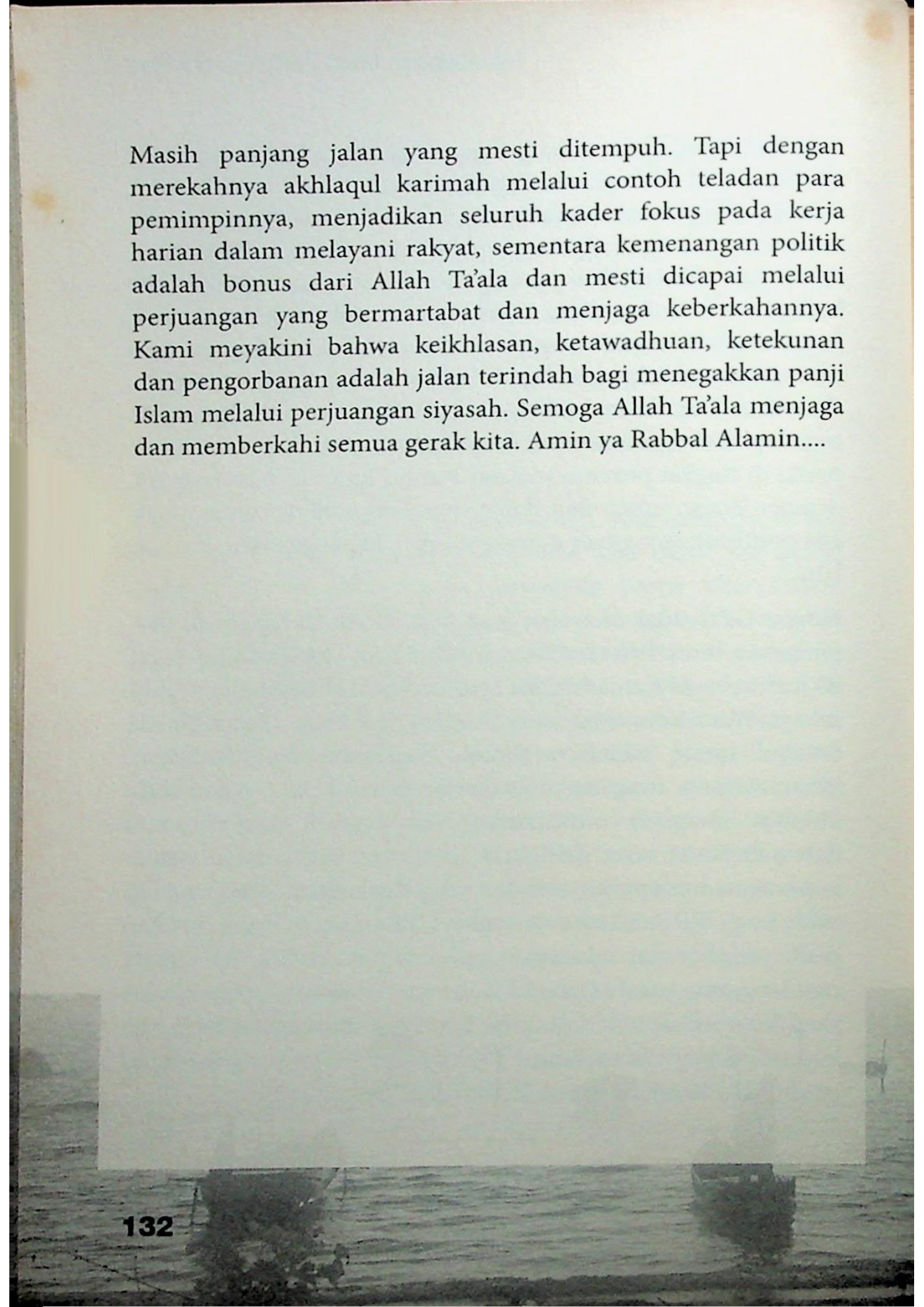
maupun eksekutif. Semua mengikuti garis ideologi dan karakter partai dakwah yang bersih, peduli dan profesional. Tapi pada saat yang bersamaan voters pun mendapatkan pendidikan politik yang memadai sehingga dapat berpartisipasi aktif dengan cara yang dewasa dan menolak tegas money politic. Memang dengan pendapatan perkapita US$ 3000 kita masih jauh dari syarat ideal demokrasi akan hidup dan berkembang dengan normal (tanpa penyimpangan) di masyarakat yang berpenghasilan US$ 6000/ tahun. Namun dengan kian mudahnya akses publik kepada media yang fair dan independen kondisi belum ideal itu dapat ditutup.

Kedua, adagium, "How can you govern your country if you cannot govern your party." Bagaimana kita dapat mengelola negara jika kita tidak dapat mengelola partai kita. Dalam konteks itulah, PKS pada Munas IV nya pertengahan September 2015 mengangkat terminologi Good Party Governance (GPG). Ini adalah resolusi bagi niat PKS untuk membenahi diri menjadi partai yang berorientasi pada *values* (nilai) dan *benefit* (kemanfaatan). GPG adalah niat PKS menjadi partai yang bukan membebani rakyat dan negara tapi menjadi partai yang mampu—diantaranya menerapkan Prinsip 4E: Efisien, Efektif, Ekonomis dan Etis. Bahwa PKS harus menjadi partai yang meminimalkan pengeluaran hingga benar-benar dapat menjaga keberkahan aktivitasnya karena menjaga dana-dana haram dan syubhat masuk dalam membiayai partai. Alih-alih di hotel mewah, jajaran Pimpinan PKS menyelenggarakan Munas nya di Bumi Perkemahan Cibubur dan Hotel Bumi Wiyata di Depok. PKS pun membiayai kegiatan Munasnya dengan Galibu (Gerakan Lima Puluh Ribu) yang alhamdulillah dapat mengumpulkan 2.8 M dana publik dan kader yang berasal.

dari 39.500-an penyumbang dengan rata-rata sumbangan Rp 60.000,-. Dan PKS pun mempublikasikan dalam website pks.or.id rincian pemasukan dan pengeluaran Munas IV itu. Semua dalam rangka agar dipercaya publik kita wajib menerapkan GPG. Ada akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik dan kesiapan untuk berubah, karena partai bukanlah kendaraan bagi pengurus untuk mengejar kemenangan dan kekayaan, tapi merupakan wadah perjuangan, tempat pengorbanan dan kerja diberikan. Dan alhamdulillah, dalam waktu satu bulan setengah terjadi proses regenerasi dan penyegaran barisan kepemimpinan partai di tingkat provinsi melalui Pemilu Internal yang berjalan dengan lancar, aman dan dapat memberi contoh betapa tidak ada politisasi, keinginan melanggengkan kepengurusan dan lain lain.

Ketiga, GPG tidak akan berjalan kecuali ada *political will* dari pimpinan teras Partai. Alhamdulillah baik Ustadz Salim Segaf Al Jufri sebagai Ketua Majelis Syuro, Ustadz Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro ataupun Presiden Partai Ustadz Sohibul Iman, memberi contoh bagaimana kesederhanaan, kebersahajaan, fungsionalitas dan sentuhan kemanusiaan serta ukhuwah menjadi cerita harian. Naik pesawat kelas ekonomi dan mengantri serta menginap di rumah kader dalam setiap kunjungan merupakan standar yang dijalankan. Mengunjungi office boy DPP dan kader di tingkat DPRa yang sakit merupakan cerita yang beredar di kalangan kader tanpa rekayasa, tapi semata rasa tanggung jawab. Dalam kondisi ini, tidak heran para asatidz yang lama tidak turun gunung kini berlomba lomba memberi kontribusi bagi terwujudnya PKS sebagai partai yang memiliki jatidiri dan karakter Bersih Peduli dan Profesional.

Masih panjang jalan yang mesti ditempuh. Tapi dengan merekahnya akhlaqul karimah melalui contoh teladan para pemimpinnya, menjadikan seluruh kader fokus pada kerja harian dalam melayani rakyat, sementara kemenangan politik adalah bonus dari Allah Ta'ala dan mesti dicapai melalui perjuangan yang bermartabat dan menjaga keberkahannya. Kami meyakini bahwa keikhlasan, ketawadhuan, ketekunan dan pengorbanan adalah jalan terindah bagi menegakkan panji Islam melalui perjuangan siyasah. Semoga Allah Ta'ala menjaga dan memberkahi semua gerak kita. Amin ya Rabbal Alamin....



Membangun Dakwah Kutural dan Struktural

Dakwah pada asalnya adalah pekerjaan yang tidak memerlukan sarana. Modalnya satu; hati yang ikhlas dan taat kepada Allah SWT. Karena itulah Imam Syahid Hasan Al Banna menegaskan, "Nahnu du'at qobla kulli syai'i (Kita berprofesi sebagai da'i sebelum profesi lainnya)".

Karena itu juga Baginda Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan kita untuk, "Balligu 'anni walaw aayah (sampaikanlah walau cuma satu ayat). Bahkan Allah SWT menyematkan kriteria umat terbaik dengan sifat, *"Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia; mengajak yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar."* (QS 3:110). Dimana inti dakwah adalah amar ma'ruf dan nahi munkar.

Namun dalam perkembangannya ketika pekerjaan menata umat mulai memasuki wilayah dan tanggung jawab yang lebih luas, membuat dakwah mesti merapatkan shaf untk masuk ke ruang publik. Mulailah era dakwah *jahriyah jamahiriyah* (dakwah yang

terbuka untuk publik) dilanjutkan dengan dakwah di medan *siyasah* (politik). Mulailah era dakwah siyasah yang tidak hanya mengandalkan tabligh, ta'lim dan takwin tapi juga dakwah melalui Perda (Peraturan Daerah) dan Undang-Undang, hingga dakwah melalui eksekutif sebagai *decission maker* baik sebagai Bupati, Walikota hingga Gubernur dan Menteri. Dakwah melalui jalur politik dan kekuasaan ini disebut dengan dakwah struktural. Dimana dakwah berupaya mengisi ruang publik dengan nilai-nilai Islam sebagai solusi bagi kehidupan publik yang adil, sejahtera dan bermartabat. Berupaya mewujudkan negeri yang *baldatun thoyyibatun wa robbun ghafur.*

.... dakwah struktural harus didukung dan dilengkapi dengan dakwah kultural. Secara sederhana dakwah kultural adalah gerakan dakwah yang dilakukan oleh semua prajurit dakwah di semua medan kehidupan di luar medan politik.

Namun dakwah struktural tidak menyediakan medan yang luas. Jumlah prajurit dakwah yang mendapat amanah dalam jabatan publik melalui proses politik tidaklah banyak. Selain juga, dampak dari dakwah struktural ini memiliki keterbatasan. Keputusan politik sering kuat di atas kertas namun tidak berdaya di lapangan. Belum lagi proses politik yang rumit plus karakter medan politik yang *volatile* (tidak stabil dan selalu berubah) membuat dakwah struktural tidak dapat berjalan sendiri.

Pada titik inilah, dakwah struktural harus didukung dan dilengkapi dengan dakwah kultural. Secara sederhana dakwah kultural adalah gerakan dakwah yang dilakukan oleh semua prajurit dakwah di semua medan kehidupan di luar medan

politik. Dakwah melalui media, dakwah melalui seni, dakwah melalui karya profesional, dakwah melalui *enterpreneur* dan *sociopreneur* hingga dakwah melalui kampus, sekolah, pesantren, LSM hingga dakwah yang mengajak seluruh elemen bangsa bersatu memerangi korupsi, kezaliman dan kemaksiatan—semuanya masuk dalam ruang lingkup dakwah kultural. Karena itu dakwah kultural memiliki medan amal yang jauh lebih luas. Lebih banyak prajurit dakwah yang terlibat, sehingga memiliki dampak yang signifikan bagi terwujudnya tujuan dakwah mewujudkan Islam yang kuat, berdaya dan memberi rahmat bagi seluruh alam.

Kedua dakwah ini harus saling melengkapi, saling mendukung dan saling mengokohkan. Dari dakwah struktural bukan hanya dapat dihasilkan perangkat kebijakan yang memberi jalan lebar bagi dakwah menyentuh banyak pihak dalam waktu yang singkat. Pada saat yang sama dakwah struktural yang paling utama mampu menghadirkan partai yang bercirikan dakwah. Partai Islam yang mampu menerapkan *Good Party Governance*, menerapkan prinsip 4E (Efisien, Efektif, Ekonomis dan Etis). Partai yang mampu mempesona publik karena mampu menampilkan perilaku politik yang santun, anti korupsi, sederhana dan mampu menampilkan keteladan akhlaqi. Pada saat bersamaan dakwah kultural mampu menampilkan pesona melalui karya, melalui kontribusi dan prestasi di semua bidang. Hingga membuat para prajurit dakwah dapat menjadi *syakhshiyah barizah* (tokoh panutan karena prestasi dan kontribusi) yang bertebaran di banyak bidang kehidupan.

Pada titik inilah diterapkan *mutual endorsement* (saling mendukung) antara dakwah struktural dan kultural. Dakwah

struktural menghasilkan partai politik yang memiliki pesona publik yang mampu mampu meraup suara signifikan. Dalam konteks ketata-negaraan saat ini posisi partai politik memiliki peluang untuk meng-endorse (mengajukan dan mendukung) para nominator untuk banyak posisi lembaga kuasi pemerintah (semisal KPK, Komisi Penyiaran Indonesia [KPI], Komisi Yudisial dan banyak lagi komisi atau institusi lainnya) yang mayoritas mensyaratkan tidak boleh memiliki ikatan dan bukan anggota partai politik. Disinilah dakwah struktural memberi jalan bagi prajurit dakwah di medan kultural untuk mengisi posisi-posisi strategis. Ini endorsement struktural kepada kultural.

Sebaliknya saat momen pesta demokrasi, para prajurit dakwah di medan kultural dapat memberikan dukungannya dan ini diikuti oleh para pengikut atau followernya kepada partai dakwah yang memang sudah memberikan kinerja publik dan contoh teladan yang baik. Ini *endorsement* kedua dari dakwah kultural kepada dakwah struktural. Saling dukung, saling sinergi inilah disebut *mutual endorsement* yang insya Allah akan memudahkan proses terwujudnya Islam sebaagi rahmtan lil alamin.

Semoga Allah memudahkan dan memberkahi semua prajurit dakwah yang berjuang baik di medan kultural maupun medan struktural.

Membangun Komunikasi Politik

Salah satu petuah Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* yang sangat terkenal adalah, *"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau diam."* Bahkan Al-Qur'an memberikan banyak terminologi terkait dengan 'perkataan' ini: *Qaulan Layyina* (perkataan yang lembut, QS. 20: 44), *Qaulan Sadida* (Perkataan yang jelas, QS. 4:9), *Qaulan Ma'rufa* (Perkataan yang baik, QS. 4: 5), dan *Qaulan Kariima* (Perkataan Mulia, QS. 17: 23). Jika merujuk pada nash Al-Quran tidak kurang ada enam jenis perkataan yang berbeda-beda maksud dan penggunaannya. Karena itu tak heran baginda Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* mengingatkan kita,

إِحْفَظْ لِسَانَكَ

"Jagalah Lisanmu!" (HR. Ibnu Asakir)

Dalam konteks inilah, saya diminta Pesiden PKS M. Sohibul Iman untuk menemani beliau bertemu dengan Pak Jokowi. Mestinya Ustadz Taufik Ridho sebagai Sekertaris Jenderal yang menemani beliau, namun Ustadz Taufik berhalangan karena sedang mengikuti sebuah acara di luar negeri. Melalui tulisan ini

ada beberapa hal yang ingin saya *share* sebagai bahan pelajaran bersama.

Pertama, sudah menjadi doktrin kita bahwa *nahnu du›at qobla kulli syai›in*, kita ini da'i sebelum dikenal dalam berbagai profesi apa pun. Karena itu partai kita disebut Partai Dakwah, karena pada hakekatnya kita ingin menjadikan partai ini sebagai sarana amal sholeh dan dakwah. Salah satu sarana dakwah yang baik adalah berkomunikasi dengan berbagai *'Qaulan'* diatas.

Sebelum memiliki partai, ruang dakwah kita terbatas. Sekarang dengan adanya Partai, medan dakwah kita meluas. Dulu zaman kita berkoalisi dengan Pak SBY, ada banyak kebijakan publik yang senafas dengan syariat dan berbagai kepentingan umat yang dapat kita perjuangkan.

Sebelum memiliki partai, ruang dakwah kita terbatas. Sekarang dengan adanya Partai, medan dakwah kita meluas. Dulu zaman kita berkoalisi dengan Pak SBY, ada banyak kebijakan publik yang senafas dengan syariat dan berbagai kepentingan umat yang dapat kita perjuangkan. Dalam konteks inilah, walaupun kita tegas menyatakan tetap berada diluar pemerintahan, tapi tidak menghalangi kita memberi masukan pada Pak Jokowi apa saja suara publik, suara umat yang dititipkan kepada beliau. Karena kita percaya, dengan kekuatan akhlaq dan hujjah kita, posisi di dalam atau di luar pemerintahan tidak menghalangi efektivitas kita mengawal agenda dakwah dan umat.

Kedua, kita perlu *mizholah siyasiyah* (payung politik). Hasil syura memutuskan Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi pilihan kita. Walaupun demikian, dengan tetap memegang teguh etika

koalisi kita dengan KMP —ini dibuktikan dengan kehadiran dan kontribusi kita selama dua tahun keberada-anya— tidak menghalangi kita untuk berkomunikasi dengan pihak atau partai di luar KMP. Tentu sejalan dengan kebijakan besar kita untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. *Plus* mengirim pesan pada semua pihak baik di KMP, Pemerintah, media, hingga publik, bahwa kita punya kebijakan partai sendiri yang mesti dihormati dan tidak otomatis harus seragam serta sama dengan pihak manapun. Apalagi, disadari bahwa membangun koalisi strategis dan permanen masih jauh dari harapan. Dengan begitu sebagai partai politik kita pun tidak terkunci atau terkucil sendirian. Sebenarnya ini adalah hal yang wajar dan dilakukan oleh banyak partai. Kecuali kita ada dalam koalisi strategis dan ideologis.

Dalam pandangan pribadi, karena bukan koalisi strategis dan ideologis, tapi mendekati bentuk koalisi strategis-pragmatis, beberapa keputusan KMP pun tidak populer di mata publik. Misalnya pernyataan bersama pada 20 November 2015 yang cenderung mendukung Setya Novanto dengan prinsip *right or wrong is my KMP*, sebetulnya kurang sejalan dengan *i›diluu huwa aqrobu lit taqwa* —berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.

Ketiga, ini sedikit personal, saya pribadi sejak dulu dikenal — dengan olok-olok tentunya— sebagai Jokowi Lover: pendukung Jokowi. Ada beberapa yang sering saya sampaikan tentang ‹kelebihan› Jokowi. Beberapa sudah saya sampaikan pada tulisan awal di Al-Intima'. Diantaranya dalam *Tsunami Jokowi* (ditulis dua tahun sebelum Pilpres 2014 sesaat setelah Jokowi menang Pilgub DKI 2012 lalu). Prediksi saya terbukti dengan kemenangan Jokowi di 2014. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa buat

publik sederhana: *likulli marhalah rijaaluha* (dalam tiap tahapan ada *rijal* [orang-orang]-nya). Banyak yang meragukan bahkan memandang Jokowi dengan selalu mengungkap kelemahan dan kesalahannya, yang dalam beberapa hal ada yang serius, tapi selalunya hal sepele. Misalnya salah sebut tempat lahir Bung Karno di Blitar padahal seharusnya Surabaya. Atau yang terakhir, saya belum cek kebenarannya dan dianggap benar, beliau menyebut Merauke sebagai Ujung Barat Indonesia. Ini memang salah. Tapi bandingkan dengan fokusnya memperbaiki infrastruktur, memutus rantai beban subsidi yang tidak efektif hingga ketahanannya untuk selalu turba (turun ke bawah) mulai Iedul Adha di Aceh (belum ada lima Presiden terakhir melakukan ini), natal dan tahu baru di tanah Papua dan Hari Pahlawan di Aceh. Belum lagi target dana desa yang sekarang sudah di angka 660 juta per desa pada tahun 2016.

Dalam pertemuan, Pak Jokowi menyampaikan keinginan sederhananya ingin hanya 10% di Istana dan 90% di lapangan. Beberapa pihak berpendapat Jokowi sudah gagal dalam tahun pertama, jangankan bicara lima tahun. Tapi saya berpendapat sebaliknya. Memang banyak kelompok sudah mengelilingi beliau, tapi itulah hakikat kekuasan. Intinya, hubungan dengan Jokowi sekarang dan akan datang dapat membawa kebaikan selama dilakukan dengan niat tulus, transparan dan untuk kepentingan organisasi.

Keempat, sesuai dengan sunnah Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam,* silaturahim adalah perbuatan mulia. Banyak musuh jadi kawan dan simpatisan jadi kader dengan senjata silaturahim. Tentu silaturahim yang tulus, bermartabat dan untuk kepentingan bangsa dan negara. So, *tahaaddu tahaabbu,* saling memberilah maka

kalian saling mencintai. DPP sudah memberi contoh, keluarlah dari mihrab kalian wahai pencinta Ilahi. Karena medan amal kita adalah bersama para penghuni bumi.

Meneropong Politik Ekonomi Indonesia

Kali ini saya sedikit keluar dari bahasan politik internal dan izin menengok sejenak kondisi politik ekonomi Indonesia. Baik yang terkait dengan perkembangan ekonomi, maupun dampaknya pada politik dalam negeri. Karena, ada hubungan yang erat antara kondisi ekonomi satu bangsa dengan kestabilan politiknya.

Ambilah contoh sederhana bagaimana kegemilangan Ikhwanul Muslimin di Mesir dengan memenangi Pileg, Pilkada dan Pilpresnya, dalam kajian Fareed Zakaria—kolumnis Politik CNN dan New York Times—harus berakhir tragis salah satunya karena kondisi ekonomi Mesir pasca Revolusi Musim Semi Arab belum juga membaik, sehingga kesabaran publik tidak terwujud. Walau faktor utamanya, tentu, adalah konspirasi kudeta terhadap Presiden Mursi.

Contoh kedua adalah kisah Turki dengan Erdogannya. Dukungan solid publik Turki pada AK Party di antara sebabnya adalah keberhasilan Kabinet Erdogan membuat Turki meningkat

statusnya dari status negara dunia ketiga menjadi standar negara maju dalam hal infrastruktur dan pendapatan per kapita.

Jadi ada hubungan erat antara perkembangan ekonomi satu negara dengan dinamika politik satu bangsa.

Lalu bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Khususnya sejak Presiden Jokowi menjadi nakhoda negeri ini?

Dalam pandangan saya, secara sederhana ekonomi Indonesia akan tumbuh walau menghadapi banyak tantangan. Kemampuan pemerintah dan pihak swasta di tanah air bekerja dengan kreatif dan inovatif akan menentukan seberapa besar pertumbuhan ekonomi kita. Walaupun jika ekonomi tumbuh, tidak dengan sendirinya *distribution of wealth* (pemerataan kemakmuran) dapat terjadi dengan sendirinya. Apatah lagi dengan *rasio gini* yang kian mengkhawatirkan (diatas 0.4), kondisi kesenjangan ekonomi sudah masuk lampu kuning.

Jadi, ekonomi Indonesia hingga 2019 akan berjalan dan tumbuh walau lambat. Artinya, persaingan politik hingga 2019 akan berjalan normal, tidak ada chaos dan tidak memberi peluang bagi perubahan mendadak, khususnya dalam perpindahan kekuasaan di dalam negeri. Karena itu, PKS harus menyiapkan diri dengan baik menuju kontestasi politik 2019 yang memberi keuntungan bagi kubu pemerintah dan para pendukungnya karena kondisi ekonomi yang tidak terlalu buruk bagi masyarakat.

Berikut beberapa fenomena ekonomi yang mendasari prediksi diatas:

Pertama, Pak Jokowi saya kategorikan *very simple man*, sebagian mengatakan *a man with no value*, karena seringkali dasar pengambilan keputusannya bukan afiliasi nilai, apatah

lagi ideologinya. Fokusnya sekarang adalah infratsruktur dan infrastruktur. Ditambah kecepatan dan kecepatan. Makanya beberapa prosedur dan izin disederhanakan walau berpotensi menghadapi masalah dikemudian hari. Misal belum kelarpun, sudah di tanda tangani prasasti peletakkan batu pertama kereta cepat. Pembuatan MRT di Jakarta, jalan tol lintas Sumatera hingga percepatan pemungsian waduk Jatigede yang lebih 10 tahun mangkrak.

Dalam beberapa hal, itu ditanggapi positif karena memang isu konektivitas dan biaya logistik sangat membelenggu ekonomi kita. Sudah menahun. Plus, percepatan infrastrukur ditambah 'keberanian' memutus rantai subsidi BBM—menurut saya ini langkah cerdas menyehatkan APBN—membuat kita berinvestasi pada sektor yang tepat walau pahit diawal. Tidak heran rating Moody's pada ekonomi Indonesia naik lagi ke *investment grade* walau pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2014 dan 2015 masih di bawah zaman SBY. Jadi ada plus minusnya.

Kedua, kondisi ekonomi kita memang masih sulit mencapai target pertumbuhan sama atau diatas 7% pertahun. Ini memang batas minimal pertumbuhan agar angka pengangguran kita tidak bertambah. Namun memang dalam pandangan para pengamat, ekonomi dunia masih akan lamban dan bergerak rendah hingga 2020. Pertumbuhan ekonomi dunia yang berkisar 2.5 - 3% per tahun belum membuat Indonesia dapat melompat pertumbuhannya. Apalagi Cina sebagai tujuan

... kisah sukses Gojek —tanpa punya satupun sepeda motor— mampu merajai pasar ojek dengan 150 ribu motornya, menjadi contoh nyata betapa potensi ekonomi Indonesia sangat menjanjikan.

ekspor utama komoditas kita pertumbuhan ekonominya sedang di bawah 7% (6.9% di 2015). Plus harga komoditas yang rendah membuat penerimaan Indonesia memang tertekan. Belum lagi harga minyak yang turun juga menekan penerimaan dollar kita.

Tapi dengan pasar yang besar—jika kita bisa kelola—ekonomi Indonesia tetap prospektif. Pertumbuhan kelas menengah (USD 2 - 20 /day) hampir 7 juta pertahun dengan angka mendekati 134 juta adalah jaminan pasar yang captive. Tapi dengan MEA itu pun jadi peluang dan tantangan sekaligus. Presiden Jokowi *pede* biar kita terlecut bekerja. Tapi birokrasi yang lamban membuat daya saing kita sangat rendah.

Ketiga, kisah sukses Gojek—tanpa punya satupun sepeda motor—mampu merajai pasar ojek dengan 150 ribu motornya, menjadi contoh nyata betapa potensi ekonomi Indonesia sangat menjanjikan. Banyak *startup* bisnis (seperti: bukalapak.com, layanan JNE, hingga perusahaan penyedia jasa broker perumahan) yang sukses mengembangkan bisnisnya. Dan dalam banyak hal, inovasi serta ketekunan selalu menjadi kata kunci.

Akhirnya kondisi ekonomi Indonesia akan terus maju selangkah demi selangkah menuju negara maju. Yang artinya, partai politik yang akan fit (sesuai) adalah mereka yang selalu meningkatkan kapasitas dan kualitas organisasi serta SDM nya. Semoga Allah SWT memberi kita kekuatan dan sikap amanah untuk menjaga kerja dan kinerja partai ini agar selalu mempesona publik yang kian cerdas dan mapan ini. *Wallahu a'lam bishawab.*

Menangkap Masa Depan Politik Indonesia

Dunia politik selalu melahirkan bintang di panggung. Setelah Jokowi di Solo dan Risma di Surabaya, Ahok di DKI sedang jadi pusat perhatian. Baik karena pilihan sikapnya yang tegas tanpa tedeng aling-aling, plus keberaniannya memutuskan maju independen. Sebelumnya, ketegasannya tidak mengawal APBD DKI banyak mendapat apresiasi. Yang memusuhi dan menentang Ahok pun tak kalah banyak.

Tapi saya tidak akan bicara tentang orang per orang, apatah lagi mencari manakah bintang panggung yang dari PKS. Insya Allah semua kader, baik yang di grass root ataupun yang sedang mendapat amanah jabatan publik, kini sedang tekun bekerja. Dan bila tiba waktu dan momentumnya, insya Allah akan muncul sosok kader dan pimpinan PKS yang dicintai anggota dan publik. Namun fokus saya, bagaimana kita harus dapat menangkap masa depan.

Saat pengumuman kesepakatan dibelinya Nokia oleh Microsoft,

CEO Nokia Sthepen Elop mengatakan, *"We didn't do anything wrong, but somehow, we lost"*, Kami tidak melalukan sesuatu yang salah, tapi kami kalah. Memang dunia bisnis memiliki speed di atas dunia politik. Daur ide, gagasan dan praktek bisnis berjalan jauh lebih cepat dibanding dunia politik. Namun, rumusnya sama, siapa tidak bersiap diri, siapa tidak berinovasi dan siapa tidak menangkap masa depan, siap-siap ditinggal zaman. Dalam bahasa politik, siap-siap ditinggal konstituen.

Lalu apa saja langkah yang harus diambil agar kita dapat menangkap masa depan politik di tanah air? Sebatas pengetahuan saya yang dangkal, ada beberapa prinsip dan pengetahuan yang harus selalu kita pegang teguh.

Pertama, dunia politik sejatinya dunia amanah. Kita yang masuk dalam gelanggang politik memasuki medan yang mensyaratkan integritas dan moralitas menjadi mata uang paling bernilai. Ini disebabkan politik memberi kita kuasa untuk mengelola urusan publik. Dan selalunya pengawasan di ruang publik jauh lebih longgar dibandingkan ruang privat. Pertanggung jawaban ABPN atau APBD (entah karena jumlah yang besar atau rumit—atau dibuat rumit) jauh lebih kompleks ketimbang pertanggung jawaban sebuah Rencana Belanja dan Pendapatan Tahunan sebuah perusahaan. Belum lagi jebakan labirin kekuasaan dan perizinan yang sering menjadi celah kebijakan pejabat publik lebih memihak mereka yang bayar ketimbang menjaga kepentingan publik.

...dunia politik sejatinya dunia amanah. Kita yang masuk dalam gelanggang politik memasuki medan yang mensyaratkan integritas dan moralitas menjadi mata uang paling bernilai.

Dalam beberapa kasus, kepentingan publik jangka pendek tidak terganggu dan semua seolah mengikuti prosedur, namun qolbu seorang mukmin mestinya tahu ini tidak sesuai dengan sumpah jabatan karena dapat memperkaya seseorang atau pihak lain. Jadi, moral, etika dan integritas (dalam bahasa seserhana: IMAN) merupakan tangga utama menuju masa depan.

Kedua, 'craftmanship', keterampilan mengelola satu atau dua isu yang dapat memberi trade mark dan penisbatan pada kita. Jokowi dan Risma punya trade mark pasar tradisional dan taman serta kali yang rapi. Bupati Yoyok dinisbatkan anti korupsi karena transparansi anggaran. Ahok tegas dan berani baik kasus APBD ataupun maju independen. Ridwan Kamil urus taman Kota Bandung. Semua seperti mudah dan sederhana. Padahal, ada banyak persiapan, ide, para pihak yang terlibat dan perhitungan detail yang harus dilakukan. Bukan semata untuk pencitraan tapi untuk mewujudkan sebuah mimpi dan harapan publik. Masyarakat haus pada air bersih, sekolah berkualitas yang terjangkau hingga sampah yang terkelola dengan baik. Masa depan politik Indonesia terletak pada siapapun yang mampu memberi fakta pada harapan sederhana publik.

Terakhir, mental melayani. *Sayyidu qaum khadimuhum...* pemimpin satu kaum adalah pelayan kaum tersebut. Itulah yang dicontohkan salafus shaleh seperti Umar bin Khatab yang rela *hirosah* (ronda) untuk melayani rakyatnya. Begitupun dengan cicitnya, Umar bin Abdul Azis, yang setiap akan tidur selalu bertanya; apa yang aku jawab saat Tuhanku bertanya bagaimana pelayanan pada rakyatku. Bersahaja, bermoral dan amanah serta menjaga hal ihwal rakyat dan publik, dengan melupakan diri sendiri atau menjauhkan diri dan juga keluarga dari kekuasaan.

Adalah episode indah saat Khalifah Umar bin Abdul Azis mematikan lampu milik negara seiring datangnya anggota keluarganya untuk membincangkan urusan yang bukan urusan negara.

Masa depan politik Indonesia kian membuat kita butuh kembali pada nilai-nilai keikhlasan, pelayanan, membenamkan diri dan nafsu hingga disiplin untuk selalu memberikan yang terbaik bagi umat, bangsa dan negara.

Fenomena Gerakan Sosial Partisan

Sebuah fenomena menarik berkembang di masyarakat. Sebutan GSP (Gerakan Sosial Partisan) mulai banyak muncul dalam jagad perpolitikan nasional. GSP berbeda dengan Gerakan Sosial yang kita kenal sebelumnya. Saat kisruh KPK dengan Kepolisian muncul gerakan sosial yang mendukung KPK; mulai dari karikatur dan meme tentang Cicak vs Buaya hingga berbondong-bondong masyarakat bersedia menjadi pagar hidup untuk melindungi KPK. Puncak Gerakan Sosial sebelumnya terjadi pada 1998 dalam bentuk Gerakan Reformasi yang meruntuhkan rezim Orde Baru.

Gerakan Sosial selama ini selalunya berbentuk netral. Mendukung nilai atau publik interest. Anti Korupsi, Melawan kezaliman Pengusaha (ingat kasus koin untuk Prita), simpati untuk korban bencana, dst. Belakangan muncul GSP. Gerakan Sosial yang tidak netral lagi tapi dengan tegas memihak/ partisan pada satu orang atau kelompok. Tidak netral lagi. Di Indonesia dimulai dengan munculnya relawan Pak Jokowi baik

saat maju sebagai Cagub 2012 DKI ataupun saat Capres 2014. Tim kerja Relawan dalam beberapa hal melampaui kerja partai pendukungnya. Tidak heran jika selepas perhelatan Pilgub dan Pilpres, Pak Jokowi masih merawat Relawannya.

Di luar negeri, GSP sejatinya sudah tampak saat ***The Rockie Senator*** dari Chicago, Barrack Hussein Obama, maju sebagai kandidat Capres dari Partai Demokrat pada 2008. Ketimbang mengandalkan sumbangan dari para ***lobyist***, ***the Wall Street connection*** hingga industriailis besar, Obama dan timnya memilih pendanaan cara retail dengan nominal 5, 10 atau 20 dollar.

Sekarang fenomena GSP terlihat jelas dalam kasus Teman Ahok, relawan Ahok dengan kreatifnya membuka stand di berbagai mall plus penjualan *merchandise*nya untuk biaya kampanye. Banyak pro dan kontra termasuk pandangan—dalam bingkai teori konspirasi—bahwa Teman Ahok digerakkan sekelompok konglomerat pendukung Ahok. Menurut penulis, semua pandangan sah-sah saja. Tapi bahwa ada GSP dan sudah jadi fenomena pun sebuah fakta. Sebagian masyarakat Yogya pun membuat Konvensi Publik untuk menjaring calon walikota dari Publik. Seringnya, GSP ini kian tampak saat Pilkada dimana publik atau relawan memilih mendukung calon dari jalur independen.

Di luar negeri, GSP sejatinya sudah tampak saat The Rockie Senator dari Chicago, Barrack Hussein Obama, maju sebagai kandidat Capres dari Partai Demokrat pada 2008. Ketimbang mengandalkan sumbangan dari para lobyist, the Wall Street

connection hingga industriailis besar, Obama dan timnya memilih pendanaan cara retail dengan nominal 5, 10 atau 20 dollar. Bahkan mereka yang ingin ikut hadir dalam kampanye terbuka diminta membeli tiket seperti membeli tiket konser musik dengan nominal 10,15 atau 20 dollar. Plus penjualan *merchandise*: pin, stiker, t-shirt hingga topi. Hasilnya Obama mampu dua kali memenangkan Pilpres 2008 dan 2012.

Kenapa GSP muncul dan apa implikasinya bagi Parpol dan khususnya PKS? *Pertama,* GSP muncul salah satu sebab utamanya adalah karena kegagalan parpol melakukan kaderisasi kepemimpinan. Banyak pimpinan populer sekarang walau diusung parpol sejatinya bukan kaderisasi parpol. Bu Risma awalnya adalah birokrat kepala dinas pertamanan Kota Surabaya, Jokowi pengusaha furnitur dari Solo, Ridwan Kamil berprofesi sebagai arsitek. Itu juga yang terjadi pada banyak bupati dan walikota lainnya. Partai politik mesti jujur melihat fakta ini sebagai sebuah introspeksi.

Kedua, level kepercayaan publik pada parpol, politisi dan parlemen secara ajek dalam lima tahun terakhir selalu ada pada level yang rendah. Sebaik apapun PKS berusaha memperbaiki diri, pandangan umum melihat parpol bukan sebagai lembaga yang layak dipercaya. Belum lagi jika melihat konflik intra parpol yang berlarut-larut dimana publik melihat drama yang jauh dari simpati publik. Faktor ini salah satu yang mendorong publik lebih memilih calon perseorangan/independen ketimbang mendukung calon parpol.

Ketiga, pola kampanye parpol yang mahal, kurang kreatif hingga instan berkebalikan dengan pola murah karena didukung dana publik dan relawan, pola kreatif melalui media sosial hingga

kampanye yang bersifat substansial dan *long term* (pembelaan kebijakan, pendampingan dan pemberdayaan) hingga melibatkan publik membuat publik melihat GSP sebagai jawaban dari kebuntuan dan pesimisme publik terhadap politik.

Lalu apa yang harus dilakukan? Syiar kembali pada Jati Diri Partai Dakwah diikuti dengan slogan dan program kerja *'Berkhidmat untuk Rakyat'* merupakan langkah yang sangat sesuai dengan *public demand*. Menjadikan kembali partai sebagai wadah perjuangan, menjadi *island of integrity* hingga jembatan perekat ummat merupakan langkah awal bagi munculnya dukungan publik pada PKS. Tapi jalan panjang ini mesti ditekuni dan dijaga dengan seksama. Hingga publik kembali menggantungkan harapannya pada PKS. *Wallahu a'lam bishawab.*

Mencari Figur DKI 1

Jakarta bukan cuma ibukota Indonesia. Jakarta juga jadi barometer kekuatan politik nasional. Sering disebut, DKI 1 (sebutan utk Gubernur Jakarta) setara dengan RI 3 (di bawah Presiden dan Wakil Presiden). Siapa jadi Gubernur Jakarta besar peluang menjadi tokoh nasional. Pak Jokowi memenangkan pertarungan PILGUB DKI pada 2012 dan memenangkan Pilpres pada 2014. Karena itu, Pilgub DKI yang masuk dalam paket Pilkada Serentak 2017 sangat strategis. Karena pemenangnya memiliki peluang membawa pengaruh dalam pesta rakyat di 2019 yang akan berlangsung bersamaan Pileg dan Pilpresnya.

Tidak heran enam bulan terakhir ini, salah satu isu publik yang selalu muncul ke permukaan adalah Pilgub DKI. Apatah lagi ditambah dengan *move* yang dilakukan berbagai calon, termasuk *incumbent* Pak Ahok dan Pak Djarot. Menjadi lebih menarik lagi tatkala, Pak Ahok yang mendapatkan elektabilitas tertinggi belakangan menyatakan akan maju via jalur independen melalui Teman Ahok. Kontroversi dan ketegangan menjadi multi arah. Karena awalnya diprediksi, karena kedekatan baik personal

Di manakah tokoh umat yang mampu melawan hegemoni birokrasi dengan keberhasilan tidak didikte para Sekda, Kepala Dinas dan kawan-kawannya? Mana contoh heroik kepala daerah yang berani melawan legislatif untuk menjaga dana APBD?

ataupun ideologi, duet Ahok-Djarot akan melanjutkan kiprahnya dengan didukung PDIP plus Pak Jokowi sebagai pihak yang menyatakan: 'Pak Ahok adalah kawan saya'. Namun dengan pernyataan maju independen, PDIP pun menjalankan agenda mengusung calon lain untuk melawan Pak Ahok. Pada saat yang sama barisan umat memunculkan nama-nama mulai dari Adyaksa Daud, Yusril Ihza Mahendra, Yusuf Mansyur hingga pengusaha muda Sandiaga Uno ataupun Jenderal Syafrie Syamsudin. Berbagai move ini ditingkahi dengan cerita temuan kerugian negara dalam kasus RS Sumber Waras, penghentian dan kasus suap reklamasi pantai membuat Pilgub DKI menyedot banyak perhatian publik.

Bagi umat sendiri, Pilgub DKI punya tempat tersendiri karena beberapa hal. Pertama, dalam sejarah bahwa figur yang memiliki elektabilitas tertinggi untuk menjadi DKI 1 adalah sosok Pak Ahok yang notabene bukan Muslim, etnis Cina dan pada saat yang sama memiliki pesona publik yang tinggi. Itu dibuktikan dengan hasil survey beberapa lembaga. Sebetulnya tidak ada masalah Pak Ahok menjadi Gubernur DKI, karena konstitusi pun menegaskan bahwa jangankan Gubernur DKI, Presiden RI pun syarat utamanya adalah Warga Negara Indonesia. Namun, bagaimanapun kisah dan prestasi Pak Ahok merupakan tantangan tersendiri bagi kita umat Islam. Dimanakah tokoh umat yang mampu melawan hegemoni birokrasi dengan keberhasilan tidak didikte para Sekda, Kepala

Dinas dan kawan-kawannya? Mana contoh heroik kepala daerah yang berani melawan legislatif untuk menjaga dana APBD untuk kasus seperti UPS yang digelumbungkan dari harga sekitar 20 juta menjadi 400 juta? Mana contoh kepala daerah yang mampu merapihkan sungai dan merelokasi penghuni pinggir sungai yang tinggal di tanah negara?

Daftar ini dapat terus bertambah panjang. Jadi siapapun lawan Pak Ahok dalam Pilgub DKI mestinya adalah mereka yang mampu menghadirkan *beauty contest*. Pertarungan keindahan dan kemampuan, pertarungan kinerja dan intergritas, pertarungan yang mendewasakan publik dan demokrasi.

Jadi siapapun yang akan dicalonkan dari kalangan umat mestilah memiliki beberapa syarat: (1) Memiliki kapasitas dan komitmen penuh untuk melayani warga Jakarta. Bisa figur yang berasal dari jalur kepala daerah atau mereka yang telah membuktikan diri sukses memimpin institusinya, (2) Tidak memiliki dosa masa lalu. Karena siapapun yang diajukan akan diletakkan dalam aquarium publik yang memiliki kaca pembesar. Dosa atau kesalahan apa pun dimasa lalu akan menjadi konsumsi publik yang diekspos media, khususnya media sosial, (3) Memiliki tim dan strategi kampanye yang akurat dan tepat. *Micro campaign*, pendekatan kampanye per kelurahan, persatuan kaum hingga kelas sosial menuntut ada isu dan agenda yang tajam, jelas dan masuk dalam logika publik, (4) Semua syarat ini juga bergantung dengan medan tempurnya. Jika hanya dua pasangan calon yang maju, peluang menangnya jauh lebih besar ketimbang tiga pasangan calon yang bertanding. Dalam konteks ini wajar jika semua pihak memang menunggu keputusan PDIP yang memiliki 28 kursi; lebih banyak dari syarat 24 kursi untuk mengusung pasangan calon.

Namun, waktu yang tersedia tidak banyak hingga ke bulan

Februari 2017; jadwal pendaftaran untuk pasangan calon independen adalah 3-7 Agustus, sedangkan pendaftaran untuk calon dari parpol adalah 8 – 12 Agustus 2016. Karena itu, berkumpulnya semua elemen umat—mulai dari politisi, ulama, pengusaha, aktivis, mahasiswa, hingga para tokoh perempuan dan pemuda, termasuk para akademisi dan praktisi marketing atau pengamat politiknya—untuk berkomunikasi dan bahu membahu mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya bagi hadirnya figur DKI 1 yang mampu menjaga marwah umat di bumi betawi ini menjadi keniscayaan. Semoga Allah SWT memberi kita ketulusan hati, kelembutan sikap dan ketajaman pikiran untuk sama-sama memikul beban umat ini.

Logika Tokoh dan Peluang Politik

Ada yang berubah di medan politik dalam kurun lima tahun terakhir ini. Kekuatan partai politik kian 'tunduk' pada logika ketokohan. Salah satu bukti awal yang diikuti oleh bukti berikutnya adalah Pilkada DKI 2012 dan Pilpres 2014.

Ketokohan lokal Pak Jokowi di Solo yang kemudian menyeruak menjadi salah satu bintang di nasional membawanya masuk dalam pertarungan Pilkada DKI 2012. Itupun pada *injury time*. Bahkan pada beberapa pekan sebelum masa pendaftaran, Pak Jokowi masih menyatakan *'tidak mikir'* maju ke Pilkada DKI 2012. Namun *last minute*, tentu berdasarkan survey dan peluang menang, PDIP dan Gerindra menduetkan Jokowi-Ahok yang akhirnya menang. Salah satu unsur utama yang jadi pertimbangan kenapa memajukan Jokowi di DKI pada 2012 adalah popularitas Jokowi yang memang tinggi.

Hal yang sama terjadi saat Pilpres 2014. Dengan menggunakan momentum kemenangan Pilkada DKI 2012, fenomena ketokohan Jokowi terus dijaga dan ditingkatkan. Puncaknya saat PDIP menjadi pemenang Pileg 2014; dan Ibu Megawati

yang pantas untuk maju dalam Pilpres—karena kerja kerasnya memenangkan PDIP pada Pileg 2014—ternyata berhadapan dengan realita bahwa Jokowi memiliki popularitas dan elektabilitas di atasnya. Dari beberapa sumber data hasil survey diketahui bahwa pilpres dapat dimenangkan PDIP hanya jika Jokowi yang dimajukan.

Fenomena sekarang pun sama. Petahana Gubernur DKI Pak Ahok yang menabung banyak simpati publik saat berani melawan DPRD, mengawal anggaran hingga kasus gonta-ganti eselon satu dan dua, membuat popularitas dan elektabilitasnya hingga saat ini tertinggi dibanding calon lain. Maka terjadilah kembali fenomena partai politik harus mengakui logika ketokohan. Tiga Parpol—Nasdem, Hanura dan Golkar—mendukung Pak Ahok baik maju melalui independen atau melalui Parpol. Terlepas bahwa di kemudian hari jalur Parpol yang dipilih, tetapi munculnya Teman Ahok dan juga Relawan Jokowi yang terpisah dari mekanisme struktur Partai—lihat tulisan sebelumnya tentang *Gerakan Sosial Partisan*—kian menegaskan bahwa Logika tokoh tidak bisa lagi diletakkan di bawah Logika Parpol.

Lalu apa pelajaran yang bisa diambil? Pertama, logika sederhana publik. Apalagi di negara berkembang. Memahami Tokoh jauh lebih mudah dan connect dibanding dengan memahami Partai. Contohnya visi, misi ataupun program kerja Parpol. Bahkan dalam sebuah survey yang dilakukan DPP PKS bersama lembaga survey eksternal diketahui logika sederhana publik bahwa: Seperti apa penampilan, image dan persepsi pimpinan parpol, seperti itu pula publik mempersepsi parpolnya. Jika pimpinan parpol —tidak harus ketua umum— dipersepsi cerdas, *charming* (mempesona) dan selalu bekerja, maka publik pun menyematkan

sifat tersebut pada parpolnya. Jadi sangat penting menyiapkan barisan tokoh yang jadi etalase publik sesuai dengan persepsi yang parpol inginkan dari publik.

Pertama, logika sederhana publik. Apalagi di negara berkembang. Memahami Tokoh jauh lebih mudah dan connect dibanding dengan memahami partai. Contohnya visi, misi ataupun program kerja parpol.

Kedua, ada banyak jalan menjadi tokoh. Seperti adagium 'Banyak Jalan Menuju Roma'. Pak SBY membangunnya melalui jalur menteri dan meledak popularitasnya saat terjadi momentum konflik dengan atasannya saat itu. Pak Jokowi juga Ibu Risma membangun ketokohannya melalui jabatannya sebagai walikota. Pak Ahok dan Kang Aher melalui posisinya sebagai Gubernur. Namun ada juga beberapa artis/selebriti yang masuk dunia politik melalui popularitas karena sering tampil di media, TV khususnya. Misalnya Pak Rano Karno, Dedi Mizwar, Teh Desi Ratnasari, dll. Sebagian yang lain membangun ketokohan melalui kerja sosialnya. Memang tidak ada jalan tunggal dan momentum yang sama. Tapi rata-rata mereka adalah orang-orang terbaik atau terpopuler atau terunik pada bidangnya.

Ketiga, rata-rata para tokoh ini memang *charming* (menawan dan mempesona publik). Termasuk media. Baik karena kinerjanya, ramah publik dan ramah media, anti korupsi ataupun memiliki satu isu yang kuat melekat padanya. Kadang berupa hal kecil—seperti naik pesawat ekonomi sambil *ngantri* ataupun sikap pembelaannya pada masyarakat kecil.

Sebagai partai kader, yang memiliki sistem tarbiyah yang rapi, PKS mestinya memiliki banyak persediaan tokoh yang mampu

memesona publik. Tinggal syaratnya satu: segeralah berinteraksi dengan publik. Mulai dari komunitas yang kecil dan dilakukan secara terus menerus. Itu pula yang dicontohkan baginda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat *radhiyallahu anhum*. Tentu dengan tetap menjaga niat yang lurus semata karena Allah SWT.

Ahok dan Fenomena DKI

Melalui proses yang tidak ada dalam pikiran dan tidak ada dalam niatan, Partai Keadilan Sejahtera menyalonkan saya untuk maju dalam Pilkada DKI. Masih panjang proses untuk mencapai kata sepakat diantara beberapa partai yang tergabung dalam koalisi. Apatah lagi untuk mendaftar. Mungkin saat tulisan ini terbit sudah jelas siapa saja kandidat definitif pasangan calon DKI 1 dan 2. Saya pribadi memaknai pencalonan ini sebagai bagian dari kasih sayang Allah Ta'ala menjaga saya untuk selalu terikat dan komit dengan nilai-nilai dakwah.

Tapi yang saya bicarakan bukan tentang diri saya. Tapi fenomena seorang Pak Ahok yang mampu mempesona sekitar 30-40 % pemilih DKI. Hal ini menarik karena apa yang terjadi di DKI bisa dilihat sebagai masa depan poliik Indonesia. Semua tahu Pak Ahok bukan orang Betawi atau Jawa sebagai mayoritas suku. Juga bukan berasal dari mayoritas agama dan ras. Dengan karakternya yang tegas, sebagian mempersepsikannya keras, tidak beradab dan terkesan kasar, namun dukungan publik di beberapa survey angkanya mendekati 70 % antara yang suka

dan sangat suka Pak Ahok. Mulai dari karakter berani melawan DPRD, menjaga anggaran hingga mereformasi birokrasi dan bekerja menghadirkan layanan publik untuk masyarakat DKI, memposisikan Pak Ahok sebagai kandidat terkuat terpilih kembali di Pilkada 2017.

Mereka yang disukai publik biasanya adalah mereka yang sudah punya karya. Karena itu bagi mereka yang berniat berkontribusi memperbaiki negeri melalui bidang politik, perlu memikirkan untuk mulai membangun dari desa atau level kabupaten kota.

Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas beberapa faktor yang banyak dipertimbangkan publik DKI. Pertama, dibanding daerah lain, jumlah kelas menengah di DKI tertinggi. Artinya sikap mandiri, well informed, rasional dan result orriented merupakan ciri kelas menengah. Plus sangat tidak menyukai status quo, feodalisme, seremonial dan korupsi. Mereka tahu penyakit korupsi adalah akar dari banyak keburukan. Karena itu hukuman mereka terhadap pelaku korupsi sangat keras, sementara sikap mendukung gerakan atau tokoh anti korupsi sangat tinggi. Jadi mereka yang ingin membangun budaya dan sikap politik yang bersih, anti korupsi, tidak tunduk pada oligarki partai, dan lain-lain bisa menjadikan DKI sabagai ladang amalnya.

Kedua, publik kian tidak memberi perhatian lebih pada latar belakang yang bersifat taken for granted. Tidak melihat latar belakang; selama bersih, anti korupsi, bawa terobosan baru yang diperlukan publik hingga berkinerja tinggi, maka publik terbuka untuk mengapresiasinya. Ini sebetulnya baik untuk demokrasi

kita yang berfungsi sebagai aturan main mengatur sirkulasi kepemimpinan nasional. Bahwa pergantian kepemimpinan di level manapun hanyalah masalah mencari pemimpin yang bisa bekerja efektif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lebih sejahtera, lebih cerdas, lebih sehat dan lebih beradab sebagai bekal membangun negeri. Tidak ada lagi pilkada yang dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan karena urusan ras, suku ataupun agama.

Ketiga, terbuka bagi merit system yang menjadi antitesa dari politik dinasti. Salah satu efek dari demokrasi yang lebih mengarah ke prosedural ketimbang substansial adalah maraknya politik dinasti: Banten, Lampung, sebagian Jawa Barat hingga merambah ke Sumatera dan pulau-pulau lain. Politik dinasti sejatinya merupakan musuh publik untuk segera dewasa. Tidak heran dalam UU Pemilu kita sudah mulai ada pasal yang membatasi munculnya politik dinasti. Pilkada DKI dan pemilih rasional dapat menjadi awal bagi munculnya karakter merit system: bahwa yang terpilih adalah mereka yang puya kapasitas walau bukan dari keluarga utama, bukan pengusaha dan bukan mereka yang didukung kekuatan uang semata.

Keempat, Pilkada DKI juga memberi pelajaran betapa membangun track record yang didasari kapasitas dan integritas adalah sebuah kemestian. Mereka yang disukai publik biasanya adalah mereka yang sudah punya karya. Karena itu bagi mereka yang berniat berkontribusi memperbaiki negeri melalui bidang politik, perlu memikirkan untuk mulai membangun dari desa atau level kabupaten kota. Dari sanalah karya dan peninggalan kita bisa dinilai publik. Dengan konsistensi inilah publik juga diuntungkan, mereka yang diusung adalah mereka yang sudah

punya karya dan punya kelebihan.

Jadi, mari nikmati Pilkada DKI seperti menikmati Liga Inggris yang penuh aksi dan drama namun sangat mengasyikkan dan menyenangkan.

Masa Penulisan

1. Membangun Politik Asketis, April 2013
2. The Jokowi Effect dan Masa Depan Dakwah, Mei 2013
3. Membangun Kelas Menengah Kader, Juni 2013
4. Tsunami Jokowi, Agustus 2013
5. Leadership Factor Pada Pilpres 2014, September 2013
6. Membangun Sistem Keuangan Partai, Oktober 2013\
7. Jati Diri PKS, Nopember 2013
8. Antara Mamma Mia dan Palestina, Desember 2013
9. Nikmatnya Mengenal Dapil, Januari 2014
10. Membangun Pasar Umat, Februari 2014
11. Tiga Pelajaran dari Pemilu 2014, April 2014
12. Menuju Capres Umat, Mei 2014
13. Kekuatan Jangka Panjang, Juni 2014
14. Pilpres 2014, Juli 2014
15. Skenario Pasca Pilpres 2014, Agustus 2014
16. Menyikapi Kemenangan Jokowi, September 2014
17. KMP: Membangun Koalisi Keumatan, Oktober 2014
18. Kabinet Kerja dan Kerja Dakwah, Nopember 2014
19. Faktor Moral, Desember 2014
20. Pemimpin: Membangun Masa Depan, Januari 2015
21. Pro Active Political Party, Februari 2015
22. KPK-Polri: Ujian Kepemimpinan Nasional, Maret 2015
23. Pemerintah: Antara Kapasitas vs Publisitas, April 2015
24. Menembus Batas Pertumbuhan, Mei 2015
25. Be the Elephant, Juni 2015
26. Pilkada Serentak dan Peluang Dakwah, Agustus 2015
27. Suksesi PKS: Jundi, Ibadah, dan Kontribusi, September 2015
28. Membangun Good Party Governance, Oktober 2015
29. Membangun Dakwah Kutural dan Struktural, Desember 2015
30. Membangun Komunikasi Politik, Februari 2016
31. Meneropong Politik Ekonomi Indonesia, Maret 2016
32. Menangkap Masa Depan Politik Indonesia, April 2016
33. Fenomena Gerakan Sosial Partisan, Juni 2016
34. Mencari Figur DKI 1, Juli 2016
35. Logika Tokoh Dan Peluang Politik, Juli 2016
36. Ahok dan Fenomena DKI, Agustus 2016

Mardani Ali Sera



Mardani Ali Sera lahir di Jakarta, 9 April 1968. Lahir dari pasangan M. Ali Sera dan juga Rohati. Menikahi Siti Oniah pada 8 September 1991 dan dikaruniai 9 anak. Masa kecilnya dihabiskan di Galur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pendidikan dasar ditempuhnya di SD Negeri 08 Tanah Tinggi. Kemudian jenjang SMP ditempuhnya di SMP Negeri 71, Jakarta Pusat. Ketika SMA juga bersekolah di wilayah Jakarta yakni di SMA Negeri 1 Budi Utomo, Jakarta Pusat. Memasuki jenjang perkuliahan, penulis diterima di Universitas Indonesia program sarjana jurusan Teknik Mesin. Semasa kuliah terkenal aktif dibidang organisasi salah satunya dalam bidang komunikasi media sebagai jurnalis FTUI. Lulus dari UI mulai mengajar di Universitas Mercu Buana dan melanjutkan pendidikan pasca sarjana dan program doktoralnya di Universitas Teknologi Malaysia. Jenjang pendidikan tersebut masing-masing diselesaikan pada 2000 (S2 Universiti Teknologi Malaysia, Master of Engineering) dan 2004 (S3 Universiti Teknologi Malaysia, Philosophiae Doctorate).

Ketertarikan penulis dalam organisasi membawanya bergabung dengan partai politik. Selepas menyelesaikan studi di Malaysia ia

bergabung dengan partai politik yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Terlibat dalam berbagai kepengurusan partai mulai dari tingkat kecamatan hingga pusat. Dimulai sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PKS (2005-2010), Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai (2010-2011), Majelis Syuro Partai (2010-sekarang), Ketua DPP Bidang Humas (2012-2015), Wakil Sekretaris Jenderal (2015-2016), hingga ketua DPP Bidang Kepemudaan (2016-sekarang). Selain dalam internal partai, penulis menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode. Yakni periode 2009-2014 dan periode 2014-2019. Kini penulis duduk sebagai anggota dari Komisi III DPR RI. Menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 lalu, penulis sempat diusung menjadi calon Wakil Gubernur oleh PKS berpasangan dengan Sandiaga Uno. Namun menjelang detik-detik akhir pendaftaran, PKS yang berkoalisi dengan Gerindra mengumumkan Anies Baswedan – Sandiaga Uno untuk menghadapi Pilgub DKI Jakarta. Berkat kemampuan yang dimiliki, penulis ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan dari pasangan Anies – Sandiaga. Ketika Anies – Sandiaga dinyatakan menang dalam hitung cepat, Prabowo menyebut penulis sebagai 'panglima pemenangan'. Dikarenakan keahlian yang dimiliki penulis dalam menyusun strategi pemenangan dan membuat semua tim berkerja dengan solid tanpa membuat kegaduhan. Terus belajar untuk mengenal dan dekat dengan Allah SWT merupakan motto hidup yang penulis pegang hingga saat ini.